



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2021

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN



Nomor : 28.A/LHP/XIX.MKS/05/2022

Tanggal : 16 Mei 2022

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2021**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2021 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah dilengkapi dengan tanggal dan tempat;
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2021; dan
 - e. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Buku I) wajib ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk seluruh komponen Laporan Keuangan tanpa tanggal dan tempat.

- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	xvii
GAMBARAN UMUM	xix
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xxii
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
3. NERACA	4
4. LAPORAN OPERASIONAL	6
5. LAPORAN ARUS KAS	8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	13
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	15
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN	17
2.1. Ekonomi Makro	17
2.2. Kebijakan Keuangan	21
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA	23
3.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	23
3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	35
3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan	37
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	39
4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah	39
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	39
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	40
4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO	40

4.3.2	Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban	41
4.3.3	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	42
4.3.4	Kebijakan Akuntansi Aset	43
4.3.5	Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas	57
4.3.6	Kebijakan Akuntansi Konsolidasi	58
4.4.	Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	59
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	60
5.1.	Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Realisasi Anggaran	66
5.2.	Penjelasan atas Pos Laporan Perubahan SAL	97
5.3.	Penjelasan atas Pos Neraca	98
5.4.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	141
5.5.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas	159
5.6.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	169
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	171
BAB VII	PENUTUP	172

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020	18
Tabel 2.1.2	PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020	18
Tabel 2.1.3	Persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020	18
Tabel 2.1.4	Persentase PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020	19
Tabel 2.1.5	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kabupaten luwu, 2020	20
Tabel 2.1.6	Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Luwu, 2020.....	20
Tabel 3.1	Realisasi Kinerja APBD T.A 2021 Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	21
Tabel 5.1	Pendapatan – LRA	61
Tabel 5.2	Pendapatan Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah TA. 2021	61
Tabel 5.3	Pendapatan Asli Daerah – LRA	62
Tabel 5.4	Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA	63
Tabel 5.5	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	64
Tabel 5.6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA	65
Tabel 5.7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	66
Tabel 5.8	Pendapatan Transfer – LRA	67
Tabel 5.9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	67
Tabel 5.10	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	71
Tabel 5.11	Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil-LRA	71
Tabel 5.12	Bantuan Keuangan – LRA	72
Tabel 5.13	Bantuan Keuangan – LRA	72
Tabel 5.14	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah – LRA	73
Tabel 5.15	Rincian Belanja	74

Tabel 5.16	Rincian Belanja Operasi	74
Tabel 5.17	Belanja Operasi Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021	74
Tabel 5.18	Rincian Belanja Pegawai	76
Tabel 5.19	Rincian Belanja Pegawai Berdasarkan Perangkat Daerah TA. 2021	77
Tabel 5.20	Rincian Belanja Barang dan Jasa	79
Tabel 5.21	Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah TA. 2021	81
Tabel 5.22	Rincian Belanja Hibah	83
Tabel 5.23	Belanja Hibah Berdasarkan Perangkat Daerah TA. 2021	83
Tabel 5.24	Rincian Belanja Bantuan Sosial	84
Tabel 5.25	Rincian Belanja Modal	84
Tabel 5.26	Belanja Modal Berdasarkan Perangkat Daerah TA. 2021	85
Tabel 5.27	Rincian Belanja Modal Tanah	87
Tabel 5.28	Belanja Modal Tanah Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021	87
Tabel 5.29	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88
Tabel 5.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021	89
Tabel 5.31	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91
Tabel 5.32	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021	92
Tabel 5.33	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	93
Tabel 5.34	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021	93
Tabel 5.35	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	95
Tabel 5.36	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Perangkat Daerah TA. 2021	95
Tabel 5.37	Rincian Belanja Tak Terduga	96
Tabel 5.38	Rincian Penyaluran Belanja Tak Terduga	96
Tabel 5.39	Rincian Transfer	97
Tabel 5.40	Rincian Transfer Bagi Hasil	97
Tabel 5.41	Rincian Transfer Bantuan Keuangan	98
Tabel 5.42	Rincian Surplus / (Defisit)	98
Tabel 5.43	Pembiayaan Netto	99
Tabel 5.44	Rincian Pembiayaan	99

Tabel 5.45	Rincian Perbandingan SILPA dengan Kas	100
Tabel 5.46	Rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	100
Tabel 5.47	Rincian Aset	102
Tabel 5.48	Rincian Aset Lancar	102
Tabel 5.49	Rincian Kas di Kas Daerah	103
Tabel 5.50	Rincian Rencana Penggunaan SILPA	105
Tabel 5.51	Rincian Kas BLUD	106
Tabel 5.52	Rincian Kas Dana BOS	107
Tabel 5.53	Rincian Sisa Kas di Bendahara FKTP	107
Tabel 5.54	Rincian Piutang Pajak	109
Tabel 5.55	Rincian Piutang Retribusi	111
Tabel 5.56	Rekap Piutang Lain-lain PAD yang Sah	112
Tabel 5.57	Rekap Piutang Transfer Antar Daerah	113
Tabel 5.58	Rekap Penyisihan Piutang	114
Tabel 5.59	Rekap Beban Dibayar Dimuka	115
Tabel 5.60	Rincian Persediaan	115
Tabel 5.61	Rincian Investasi Jangka Panjang	116
Tabel 5.62	Rincian Dana Bergulir	117
Tabel 5.63	Rincian Penyisihan Dana Bergulir	118
Tabel 5.64	Rincian Nilai Bersih Dana Bergulir	119
Tabel 5.65	Rincian Investasi Jangka Panjang	119
Tabel 5.66	Nilai Penyertaan Modal Ke PDAM	120
Tabel 5.67	Rincian Aset Tetap	121
Tabel 5.68	Daftar Aset Tanah yang disewakan	123
Tabel 5.69	Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin	126
Tabel 5.70	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	131
Tabel 5.71	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	134
Tabel 5.72	Aset Tetap Lainnya	136
Tabel 5.73	Konstruksi Dalam Pengerjaan	138
Tabel 5.74	Penambahan KDP 2021	138
Tabel 5.75	Pengurangan KDP 2021	139
Tabel 5.76	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan 2021 dan 2020	139
Tabel 5.77	Mutasi Aset Lainnya	140

Tabel 5.78	Mutasi Aset Tak Berwujud	142
Tabel 5.79	Rincian Hasil Kajian pada Aset Tidak Berwujud Lainnya	143
Tabel 5.80	Rincian Software pada Aset Tak Berwujud Lainnya	143
Tabel 5.81	Aset Lain-Lain	144
Tabel 5.82	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	145
Tabel 5.83	Rincian Kewajiban	146
Tabel 5.84	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	146
Tabel 5.85	Rincian Utang PFK	146
Tabel 5.86	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	147
Tabel 5.87	Rincian Utang Belanja	148
Tabel 5.88	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	148
Tabel 5.89	Rincian Utang Retensi	149
Tabel 5.90	Rincian Pendapatan - LO	149
Tabel 5.91	Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO	150
Tabel 5.92	Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO	151
Tabel 5.93	Rincian Pendapatan Pajak Retribusi Daerah - LO	151
Tabel 5.94	Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan - LO	152
Tabel 5.95	Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	153
Tabel 5.96	Rincian Pendapatan Transfer - LO	153
Tabel 5.97	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	154
Tabel 5.98	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	154
Tabel 5.99	Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	156
Tabel 5.100	Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	156
Tabel 5.101	Rincian Beban - LO	157
Tabel 5.102	Rincian Beban Operasi - LO	157
Tabel 5.103	Rincian Beban Pegawai - LO	158
Tabel 5.104	Rincian Beban Barang dan Jasa - LO	158
Tabel 5.105	Rincian Beban Hibah - LO	159
Tabel 5.106	Rincian Beban Bantuan Sosial - LO	160
Tabel 5.107	Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO	160
Tabel 5.108	Rincian Beban Lain-Lain - LO	161
Tabel 5.109	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	161

Tabel 5.110 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	162
Tabel 5.111 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	164
Tabel 5.112 Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	164
Tabel 5.113 Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	165
Tabel 5.114 Rincian Beban Bagi Hasil - LO	166
Tabel 5.115 Rincian Beban Bantuan Keuangan - LO	166
Tabel 5.116 Rincian Surplus/Defisit dari Operasi - LO	166
Tabel 5.117 Rincian Suplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO	167
Tabel 5.118 Rincian Suplus/Defisit dari Pos Luar Biasa - LO	167
Tabel 5.119 Rincian Arus Kas Bersih	168
Tabel 5.120 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	169
Tabel 5.121 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Pajak Daerah	169
Tabel 5.122 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Pajak Daerah	170
Tabel 5.123 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Retribusi Daerah	170
Tabel 5.124 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	171
Tabel 5.125 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi-Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	171
Tabel 5.126 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi-Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	172
Tabel 5.127 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi-Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA	172
Tabel 5.128 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi-Penerimaan Dana Alokasi Khusus	173
Tabel 5.129 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi-Penerimaan Dana Penyesuaian	174
Tabel 5.130 Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	175
Tabel 5.131 Rincian Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	175
Tabel 5.132 Rincian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	175
Tabel 5.133 Rincian Penerimaan Pendapatan Hibah	176
Tabel 5.134 Rincian Arus Kas Keluar - Aktivitas Operasi	176
Tabel 5.135 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi	177
Tabel 5.136 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	177
Tabel 5.137 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Keuangan	177
Tabel 5.138 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	178

Tabel 5.139 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	178
Tabel 5.140 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	178
Tabel 5.141 Rincian Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	179
Tabel 5.142 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	179
Tabel 5.143 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	179
Tabel 5.144 Rincian Saldo Akhir Kas	180
Tabel 5.145 Laporan Perubahan Ekuitas	180
Tabel 5.146 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya	181

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana TA. 2021 dan 2020..... 101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.a	Laporan Realisasi Pemanfaatan Dana Kapitasi Program JKN di FKTP Tahun Anggaran 2021
Lampiran 1.b	Laporan Realisasi Belanja BLUD RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2021
Lampiran 1.c	Laporan Pemanfaatan Dana BOS SD Per 31 Desember 2021
Lampiran 1.d	Laporan Pemanfaatan Dana BOS SMP Per 31 Desember 2021
Lampiran 1.e	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2021
Lampiran 1.f	Belanja Bantuan Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021
Lampiran 1.g	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun 2021
Lampiran 1.h	Belanja Bantuan Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2021
Lampiran 1.i	Daftar Penerima Hibah Berupa Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2021
Lampiran 1.j	Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu Tahun 2021
Lampiran 1.k	Register SP2D Belanja Tidak Terduga Tahun 2021
Lampiran 1.l	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Desa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BHRD, & BHPD) TA. 2021
Lampiran 1.m	Rekapan Realisasi Penggunaan Anggaran Covid-19 Tahun 2021 Per 31 Desember 2021
Lampiran 1.n	Laporan Realisasi Dana Covid Di Kecamatan Per 31 Desember 2021
Lampiran 2.1	Daftar Sisa Kas Di Bendahara Penerima Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2021
Lampiran 2.1.1	Rincian Sisa Kas Di Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2021
Lampiran 2.2	Daftar Sisa Kas Di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2021
Lampiran 2.3	Sisa Kas Di Bendahara BLUD RSUD Batara Guru Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2021
Lampiran 2.4	Rekap Dana Kapitasi JKN Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2021
Lampiran 2.5	Daftar Sisa Kas Di Bendahara Dana BOS Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2021
Lampiran 2.6	Daftar Sisa Kas di Kas Lainnya (Utang PFK) Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2021

Lampiran 3	Daftar Mutasi Piutang Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1	Daftar Mutasi Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.1	Daftar Piutang Pajak Hotel pada DPKD Kab. Luwu TA 2009 – TA 2012 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.2a	Daftar Tunggakan Pajak Restoran dan Rumah Makan TA 2012 Kab. Luwu Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.2b	Daftar Tunggakan Pajak Restoran dan Rumah Makan TA 2011 Kab. Luwu Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.2c	Daftar Tunggakan Pajak Restoran dan Rumah Makan TA 2010 Kab. Luwu Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.2d	Daftar Tunggakan Pajak Restoran dan Rumah Makan TA 2009 Kab. Luwu Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.2e	Daftar Tunggakan Pajak Restoran dan Rumah Makan TA 2008 Kab. Luwu Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.2f	Daftar Piutang Pajak Restoran dan Rumah Makan Kab. Luwu TA. 2020 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.3a	Daftar Tunggakan Reklame Tahun 2008 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.3b	Daftar Piutang Pajak Reklame TA 2020 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.3c	Daftar Piutang Reklame TA 2021 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.4a	Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2008 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.4b	Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2009 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.4c	Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2010 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.4d	Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2011 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.4e	Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2013 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.4f	Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2014 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.4g	Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2015 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.4h	Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2016 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.4i	Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2017 Per 31 Desember 2021

Lampiran 3.1.4j	Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2018 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.4k	Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2019 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.4l	Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA. 2020 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.5	Laporan Piutang PBB-P2 Tahun 2009 Sampai Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.1.6	Piutang Pajak Air Bawah Tanah TA 2019 Per 31 Desember 2020
Lampiran 3.2	Daftar Mutasi Piutang Pendapatan – Retribusi Daerah Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.2.1	Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan TA. 2020 Pemerintah Kab. Luwu Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.3	Rekap Piutang Pendapatan – Lain-lain Pendapatan yang sah Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.3.1a	Rekap Piutang BPJS Kesehatan RSUD Batara Guru TA 2019 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.3.1b	Rekap Piutang BPJS Kesehatan RSUD Batara Guru TA 2020 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.3.1c	Rekap Piutang BPJS Kesehatan RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.3.2a	Rekap Piutang BPJS Ketenagakerjaan RSUD Batara Guru TA 2020 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.3.2b	Rekap Piutang BPJS Ketenagakerjaan RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.3.3a	Rekap Piutang Jasaraharja RSUD Batara Guru TA 2018 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.3.3b	Rekap Piutang Jasaraharja RSUD Batara Guru TA 2019 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.3.3c	Rekap Piutang Jasaraharja RSUD Batara Guru TA. 2020 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.3.3d	Rekap Piutang Jasaraharja RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.3.4	Rekap Piutang Jampersal RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.3.5	Rekap Piutang Klaim Pelayanan Covid-19 RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.3.6a	Rekap Piutang Lainnya RSUD Batara Guru TA. 2020 Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.3.6b	Rekap Piutang Lainnya RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2021

Lampiran 3.4	Rekap Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2021
Lampiran 3.4.1	Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok per 31 Desember 2021
Lampiran 3.4.2	Rincian Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) Pajak Air Permukaan PDAM dan Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawito Pajak Air Permukaan PT.Vale dan Pajak Air Permukaan Tangka Manipi Per 31 Desember 2021
Lampiran 4	Rekap Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2021
Lampiran 4.1	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Per 31 Desember 2021
Lampiran 4.2	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Kurang Pungut PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Kegiatan Pembebasan Lahan dan Terdapat Kehilangan Potensi Penerimaan Pajak Negara Per 31 Desember 2021
Lampiran 4.3	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran Panjar pada Bendahara Pengeluaran DPKD yang belum disetor ke Kas Daerah Per 31 Desember 2021
Lampiran 4.4	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran Kas Tekor TA. 2011 Per 31 Desember 2021
Lampiran 4.5	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2020 yang belum disetor ke Kas Daerah Per 31 Desember 2021
Lampiran 4.6	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Penerimaan Retribusi SKRD/SSRD Tahun 2020 yang belum disetor ke Kas Daerah Per 31 Desember 2021
Lampiran 5	Saldo Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2021
Lampiran 5.1	Rincian Saldo Beban Dibayar Dimuka Per SKPD Per 31 Desember 2021
Lampiran 6	Rekapitulasi Persediaan Per 31 Desember 2021
Lampiran 6.1	Rincian Persediaan Per SKPD Per 31 Desember 2021
Lampiran 7	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2021
Lampiran 7.1	Daftar Tunggakan Dana Bergulir TA 2001 Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2021
Lampiran 7.2	Daftar Tunggakan Dana Bergulir TA 2002 Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2021
Lampiran 7.3	Daftar Tunggakan Dana Bergulir TA 2003 Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2021

Lampiran 7.4	Daftar Tunggakan Dana Bergulir TA 2004 Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2021
Lampiran 7.5	Daftar Tunggakan Dana Bergulir TA 2001 s.d 2004 Dinas Kelautan dan Perikanan Per 31 Desember 2021
Lampiran 7.6	Rekapitulasi Laporan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Penerima Bantuan Perkuatan Modal Usaha Tahun 2007 (Agustus dan November 2007) Per 31 Desember 2021
Lampiran 7.7	Rekapitulasi Laporan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Penerima Bantuan Perkuatan Modal Usaha Tahun 2009 Per 31 Desember 2021
Lampiran 7.8	Rekapitulasi Laporan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Penerima Bantuan Perkuatan Modal Usaha Tahun 2010 Per 31 Desember 2021
Lampiran 8	Daftar Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal) Per 31 Desember 2021
Lampiran 8.1	Rincian Penyertaan Modal PDAM Per 31 Desember 2021
Lampiran 9	Daftar Mutasi Aset Tetap Per SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Per 31 Desember 2021
Lampiran 9.1	Daftar Mutasi Aset Tetap Per SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Per 31 Desember 2021
Lampiran 9.2	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Per 31 Desember 2021
Lampiran 9.3	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2021
Lampiran 9.3.1	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2021
Lampiran 10	Daftar Mutasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2021
Lampiran 10.1	Daftar Pelunasan <i>Dump</i> Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2012 Per 31 Desember 2018 (Berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 544/XII/2006 Tanggal 21 Desember 2006)
Lampiran 10.1.2.1	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Penganggaran Kegiatan PKK pada BPMD tidak mempunyai dasar hukum TA 2007 Per 31 Desember 2021
Lampiran 10.1.2.2	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Kerugian yang disebabkan Panjar pada Bendahara Pengeluaran DPKD yang belum dipertanggungjawabkan Tahun 2008 Per 31 Desember 2021
Lampiran 10.1.2.3	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Belanja Jasa Kantor Lainnya Tahun 2008 Per 31 Desember 2021
Lampiran 10.1.2.4	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Rapelan CPNS 2007 Per 31 Desember 2021

Lampiran 10.1.2.5	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Belanja SPPD TA. 2011 Per 31 Desember 2021
Lampiran 10.1.2.6	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Bukti Pertanggungjawaban pengeluaran biaya koordinasi dan konsultasi diragukan keabsahannya di BPKAD TA. 2007 Per 31 Desember 2021
Lampiran 10.1.2.7	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran TKI BOP 2006 Per 31 Desember 2021
Lampiran 10.1.2.8	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran TKI BOP 2007 Per 31 Desember 2021
Lampiran 10.1.2.9	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran Honor Ganda atas Biaya Perjalanan Dinas 2007 Per 31 Desember 2021
Lampiran 10.1.2.10	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran atas Belanja Pegawai Honorarium PNS TA. 2015 Per 31 Desember 2021
Lampiran 10.1.2.11	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran atas Ketekoran Kas TA. 2008 pada Dinas Kesbang dan Linmas Per 31 Desember 2021
Lampiran 10.1.2.12	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Kurang Setor PAD Dinas Perhubungan TA. 2017 Per 31 Desember 2021
Lampiran 10.1.2.13	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Penerimaan Retribusi SKRD/SSRD Tahun 2019 yang belum disetor ke Kas Daerah Per 31 Desember 2021
Lampiran 10.2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga – Kerjasama Pemanfaatan Per 31 Desember 2021
Lampiran 10.3	Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2021
Lampiran 10.3.1	Aset Tak Berwujud Lainnya – Amortisasi Per 31 Desember 2021
Lampiran 10.4	Rekapitulasi Aset Lainnya – Aset Rusak Berat dan Barang Non Operasional Per 31 Desember 2021
Lampiran 11	Saldo Hutang Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2021
Lampiran 12	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2021
Lampiran 12.1	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka – Reklame TA. 2020 Per 31 Desember 2021
Lampiran 12.2	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka – Reklame Per 31 Desember 2021
Lampiran 13	Saldo Utang Beban Per 31 Desember 2021
Lampiran 13.1	Rincian per SKPD Saldo Hutang Beban Per 31 Desember 2021
Lampiran 13.2.1	Saldo Hutang Beban – BLUD RSUD Batara Guru TA. 2020 Per 31 Desember 2021

Lampiran 13.2.2	Saldo Utang Beban – BLUD RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2021
Lampiran 13.3	Saldo Utang Klaim Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2021
Lampiran 13.4	Rekapitulasi Utang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Masa Pajak Aktif 2016 s/d 2021 Per 31 Desember 2021
Lampiran 13.4.1	Rincian Utang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Masa Pajak 2016 s/d 2021
Lampiran 13.5.1	Rincian Utang Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Per 31 Desember 2021
Lampiran 13.5.2	Rincian Utang Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru TA. 2020 Per 31 Desember 2021
Lampiran 14	Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2021

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2021 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2021 yang didasarkan pada kriteria:

- a. kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. kecukupan pengungkapan;
- c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas Yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Luwu yang memiliki 57 OPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2021;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Luwu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Luwu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang

dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 28.B/LHP/XIX.MKS/05/2022 tanggal 16 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 16 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



 Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., ACPA, 
CPA (Aust), CFrA, CSFA, CA.
Register Negara Akuntan No. RNA-13085

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2021;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern, termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2021 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajiban penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 22 Maret 2022 s.d. 20 April 2022 berdasarkan Surat Tugas Nomor 118/ST/XIX.MKS/03/2022 tanggal 18 Maret 2022.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu yang terdiri dari (a) Laporan Ralisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Arus Kas; (e) Laporan Operasional; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Belopa, 16 Mei 2022

BUPATI LUWU,



Dr. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

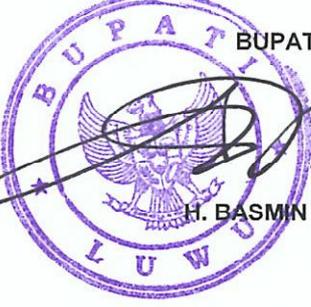
(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	ANGGARAN 2021	REALISASI (Audited) 2021	(%)	REALISASI (Audited) 2020
1	PENDAPATAN - LRA	5.1.1	1.422.726.713.381,67	1.404.537.109.394,18	98,72	1.451.964.727.852,71
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	118.757.324.971,00	132.465.563.071,18	111,54	123.160.815.946,09
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	25.000.000.000,00	26.841.950.253,94	107,37	23.594.549.937,60
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	8.629.667.350,00	7.232.109.399,00	83,81	6.694.425.568,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	4.835.573.382,00	5.310.079.034,00	109,81	5.220.161.952,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	80.292.084.239,00	93.081.424.384,24	115,93	87.651.678.488,49
7	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	1.225.142.728.580,67	1.205.682.389.554,00	98,41	1.242.720.707.326,62
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1	1.164.323.319.656,00	1.153.148.608.581,00	99,04	1.162.171.725.375,00
9	Dana Perimbangan - LRA	5.1.1.2.1.1	953.455.599.656,00	942.280.888.581,00	98,83	941.735.488.375,00
10	Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	5.1.1.2.1.2	17.862.280.000,00	17.862.280.000,00	100,00	27.430.797.000,00
11	Dana Desa - LRA	5.1.1.2.1.3	193.005.440.000,00	193.005.440.000,00	100,00	193.005.440.000,00
12	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	5.1.1.2.2	60.819.408.924,67	52.533.780.973,00	86,38	80.548.981.951,62
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.2.1	55.602.137.125,67	48.012.052.973,00	86,35	46.735.662.951,62
14	Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.2.2	5.217.271.799,00	4.521.728.000,00	86,67	33.813.319.000,00
15	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	78.826.659.830,00	66.389.156.769,00	84,22	86.083.204.580,00
16	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	13.364.244.040,00	11.297.246.769,00	84,53	29.038.754.580,00
17	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	65.462.415.790,00	55.091.910.000,00	84,16	57.044.450.000,00
18	BELANJA	5.1.2	1.486.615.370.652,67	1.403.953.088.257,09	94,44	1.419.041.706.888,30
19	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	958.329.340.705,67	893.420.451.269,00	93,23	861.759.627.266,30
20	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	565.433.966.121,00	552.095.552.930,00	97,64	501.489.422.514,00
21	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	378.183.844.680,67	327.489.336.935,00	86,60	315.280.744.276,30
22	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	14.107.029.904,00	13.273.561.404,00	94,09	44.001.424.476,00
23	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	604.500.000,00	562.000.000,00	92,97	988.036.000,00
24	BELANJA MODAL	5.1.2.2	263.560.156.664,00	247.060.309.711,09	93,74	286.351.885.895,00
25	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	299.537.090,00	71.067.680,00	23,73	228.592.550,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	42.746.390.821,00	39.407.536.203,00	92,19	49.722.400.150,00
27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	51.534.318.234,00	48.455.261.295,09	94,03	60.253.228.410,00
28	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	150.862.960.281,00	148.769.092.132,00	98,61	142.180.178.739,00
29	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	18.116.950.238,00	10.357.352.401,00	57,17	33.967.486.037,00
30	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	2.107.454.429,00	1.421.335.930,00	67,44	7.774.407.311,00
31	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	2.107.454.429,00	1.421.335.930,00	67,44	7.774.407.311,00
32	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	262.618.418.854,00	262.050.991.347,00	99,78	263.155.786.416,00
33	BELANJA BAGI HASIL	5.1.2.4.1	3.362.966.854,00	2.795.532.359,00	83,13	2.650.339.416,00
34	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kab/Kota dan Desa	5.1.2.4.1.1	2.500.000.000,00	2.167.392.308,00	86,70	2.053.811.784,00
35	Belanja Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Kab/Kota kepada Pemerintah desa	5.1.2.4.1.2	862.966.854,00	628.140.051,00	72,79	596.527.632,00
36	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.5	259.255.452.000,00	259.255.458.988,00	100,00	260.505.447.000,00
37	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa	5.1.2.5.1	259.255.452.000,00	259.255.458.988,00	100,00	260.505.447.000,00
38	SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.3	(63.888.657.271,00)	584.021.137,09	(0,91)	32.923.020.964,41

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	ANGGARAN 2021	REALISASI (Audited) 2021	(%)	REALISASI (Audited) 2020
39	PEMBIAYAAN	5.1.4				
40	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	68.388.657.271,00	68.388.657.270,92	100,00	38.465.636.306,51
41	Penggunaan SiLPA	5.1.4.1.1	68.388.657.271,00	68.388.657.270,92	100,00	38.465.486.306,51
42	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	5.1.4.1.2	0,00	0,00	0,00	150.000,00
43	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	4.500.000.000,00	4.317.000.000,00	95,93	3.000.000.000,00
44	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	4.500.000.000,00	4.317.000.000,00	95,93	3.000.000.000,00
45	PEMBIAYAAN NETTO		63.888.657.271,00	64.071.657.270,92	100,29	35.465.636.306,51
46	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SEBELUM KOREKSI		0,00	64.655.678.408,01	100,00	68.388.657.270,92
47	KOREKSI SILPA		0,00	0,00	0,00	0,00
48	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.6	0,00	64.655.678.408,01	100,00	68.388.657.270,92

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	Audited 2021	Audited 2020
1	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	5.2	68.388.657.270,92	38.465.486.306,51
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.1	68.388.657.270,92	38.465.486.306,51
3	Sub Total (1-2)	5.2.2	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	64.655.678.408,01	68.388.657.270,92
5	Sub Total (3+4)	5.2.4	64.655.678.408,01	68.388.657.270,92
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.5	0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir (5+6)	5.2.6	64.655.678.408,01	68.388.657.270,92

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	Audited 2021	Audited 2020
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	30.764.792.020,01	47.385.606.493,92
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	20.544.000,00	98.254.066,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	800,00	17.432.949,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	29.919.591.575,00	20.615.902.769,00
7	Kas Dana BOS	5.3.1.1.5	121.995.355,00	480.900.859,00
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.6	218.402.205,00	278.461.747,00
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.7	1.458.181,00	9.748.528,00
10	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.8	4.000.000.000,00	0,00
11	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9	10.665.334.693,46	10.621.940.963,46
12	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.10	1.046.353.843,00	1.429.812.693,00
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.3.1.1.11	5.996.278.246,00	5.306.726.006,00
14	Piutang Lain-Lain PAD yang sah	5.3.1.1.12	12.062.000.759,00	4.577.565.392,00
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.13	0,00	50,00
16	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.14	20.160.296.960,00	12.399.120.565,00
17	Piutang Lainnya	5.3.1.1.15	278.409.815,00	79.582.310,00
18	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.16	(8.654.596.768,00)	(8.585.939.627,57)
19	Beban dibayar dimuka	5.3.1.1.17	144.790.837,87	378.082,19
20	Persediaan	5.3.1.1.18	12.934.581.186,51	24.773.116.010,04
21	JUMLAH ASET LANCAR		119.680.233.708,85	119.488.609.856,04
22	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
23	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1		
24	Dana bergulir	5.3.1.2.1.1	31.484.625,00	243.766.800,00
25	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		31.484.625,00	243.766.800,00
26	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
27	Penyertaan Modal	5.3.1.2.2.1	55.538.229.212,00	53.818.343.590,00
28	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		55.538.229.212,00	53.818.343.590,00
29	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		55.569.713.837,00	54.062.110.390,00
30	ASET TETAP	5.3.1.3		
31	Tanah	5.3.1.3.1	406.813.392.578,00	407.498.291.538,00
32	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	552.777.043.600,42	532.184.863.103,89
33	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.020.372.163.216,20	981.003.101.710,12
34	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.653.669.071.852,11	1.460.796.980.345,77
35	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	93.441.466.806,21	87.641.523.089,21
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	34.794.235.282,46	40.812.234.321,46
37	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.341.503.275.475,18)	(1.024.374.624.677,33)
38	JUMLAH ASET TETAP		2.420.364.097.860,22	2.485.562.369.440,12
39	DANA CADANGAN			
40	Dana Cadangan		0,00	0,00
41	JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
42	ASET LAINNYA	5.3.1.4		
43	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	3.783.557.647,00	123.662.000,00
44	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.2	1.617.725.000,00	0,00
45	Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.3	23.601.807.901,00	23.329.454.264,00
46	Aset Lain-lain	5.3.1.4.4	53.117.944.478,40	29.102.665.324,00
47	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.5	(16.049.950.883,00)	(14.006.102.717,00)
48	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.6	(23.731.206.944,00)	0,00
49	JUMLAH ASET LAINNYA		42.339.877.199,40	38.549.678.871,00
50	JUMLAH ASET		2.637.953.922.605,47	2.697.662.768.557,16

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	Audited 2021	Audited 2020
51	KEWAJIBAN	5.3.2		
52	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
53	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	1.458.181,00	399.396.075,00
54	Pendapatan diterima dimuka	5.3.2.1.2	293.710.210,15	266.780.052,61
55	Utang Belanja	5.3.2.1.3	19.892.125.817,90	18.947.769.505,45
56	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	296.182.524,00	88.971.300,00
57	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		20.483.476.733,05	19.702.916.933,06
58	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
59	Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
60	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
61	JUMLAH KEWAJIBAN		20.483.476.733,05	19.702.916.933,06
62	EKUITAS	5.3.3		
63	EKUITAS	5.3.3.1	2.617.470.445.872,42	2.677.959.851.624,00
64	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.637.953.922.605,47	2.697.662.768.557,06

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini


BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	Audited 2021	Audited 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	PENDAPATAN - LO	5.4.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	27.153.111.897,86	24.289.929.758,68	2.863.182.139,18	11,79
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	6.825.409.994,15	8.105.146.121,65	(1.279.736.127,50)	(15,79)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	5.999.631.274,00	10.526.867.958,00	(4.527.256.684,00)	(43,01)
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	5.4.1.1.4	100.716.980.268,67	71.060.604.982,01	29.656.375.286,66	41,73
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO		140.695.133.434,68	113.982.568.820,34	26.712.564.614,34	23,44
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.2.1	1.153.148.608.581,00	1.162.171.725.375,00	(9.023.116.794,00)	(0,78)
10	Bagi Hasil Pajak - LO	5.4.1.2.1.1	15.464.452.631,00	12.341.107.623,00	3.123.345.008,00	25,31
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	5.4.1.2.1.2	8.412.174.623,00	3.776.062.462,00	4.636.112.161,00	122,78
12	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	5.4.1.2.1.3	647.227.070.000,00	652.082.657.000,00	(4.855.587.000,00)	(0,74)
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	5.4.1.2.1.4	271.177.191.327,00	273.535.661.290,00	(2.358.469.963,00)	(0,86)
14	DID	5.4.1.2.1.5	17.862.280.000,00	27.430.797.000,00	(9.568.517.000,00)	(34,88)
15	Dana Desa	5.4.1.2.1.6	193.005.440.000,00	193.005.440.000,00	0,00	0,00
16	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2	61.137.521.022,00	84.151.335.360,68	(23.013.814.338,68)	(27,35)
17	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	5.4.1.2.2.1	56.615.793.022,00	50.338.016.360,68	6.277.776.661,32	12,47
18	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi - LO	5.4.1.2.2.3	4.521.728.000,00	33.813.319.000,00	(29.291.591.000,00)	(86,63)
19	Jumlah Pendapatan Transfer-LO		1.214.286.129.603,00	1.246.323.060.735,68	(32.036.931.132,68)	(2,57)
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3				
21	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	47.631.267.528,92	51.351.499.650,40	(3.720.232.121,48)	(7,24)
22	Pendapatan Lainnya - LO	5.4.1.3.2	0,00	341.085.086,00	(341.085.086,00)	(100,00)
23	Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	5.4.1.3.3	55.091.910.000,00	57.044.450.000,00	(1.952.540.000,00)	(3,42)
24	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO		102.723.177.528,92	108.737.034.736,40	(6.013.857.207,48)	(5,53)
25	JUMLAH PENDAPATAN - LO		1.457.704.440.566,60	1.469.042.664.292,42	(11.338.223.725,82)	(0,77)
26						
27	BEBAN	5.4.2				
28	BEBAN OPERASI	5.4.2.1				
29	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	546.080.013.930,00	508.073.711.514,00	38.006.302.416,00	7,48
30	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	332.667.998.463,22	310.004.074.464,46	22.663.923.998,76	7,31
31	Beban Hibah	5.4.2.1.3	13.273.561.404,00	30.799.034.476,00	(17.525.473.072,00)	(56,90)
32	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	13.764.390.000,00	988.036.000,00	12.776.354.000,00	1.293,11
33	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	340.305.929,09	445.754.436,10	(105.448.507,01)	(23,66)
34	Beban Lain-lain	5.4.2.1.6	2.809.396.553,00	2.016.153.099,00	793.243.454,00	39,34
35	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.2				
36	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.1	48.586.237.435,00	44.811.709.816,27	3.774.527.618,73	8,42
37	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.2	21.405.008.912,00	25.836.977.874,00	(4.431.968.962,00)	(17,15)
38	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.2.3	118.631.475.646,00	86.472.723.736,40	32.158.751.909,60	37,19
39	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.2.4	3.991.760,00	0,00	3.991.760,00	100,00
40	Beban Amortisasi Aset Tidak berwujud	5.4.2.2.5	2.043.848.166,00	1.769.279.315,00	274.568.851,00	15,52
41	BEBAN TRANSFER	5.4.2.3				
42	Beban Bagi Hasil	5.4.2.3.1	2.795.532.359,00	2.650.339.416,00	145.192.943,00	5,48
43	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3.2	259.255.449.988,00	260.505.447.000,00	(1.249.997.012,00)	(0,48)
44	JUMLAH BEBAN		1.361.657.210.545,31	1.274.373.241.147,23	87.283.969.398,08	6,85
45	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3	96.047.230.021,29	194.669.423.145,19	(98.622.193.123,90)	(50,66)

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	Audited 2021	Audited 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
46	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
47	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.1	0,00	556.641.392,00	(556.641.392,00)	(100,00)
48	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	5.4.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	5.4.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
51	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	556.641.392,00	(556.641.392,00)	(100,00)
52	POS LUAR BIASA	5.4.5				
53	Pendapatan Luar Biasa	5.4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
54	BEBAN LUAR BIASA	5.4.5.2				
55	Beban Tak Terduga		1.421.335.930,00	7.522.248.111,00	(6.100.912.181,00)	(81,10)
56	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(1.421.335.930,00)	(7.522.248.111,00)	6.100.912.181,00	(81,10)
57	SURPLUS/DEFISIT - LO	5.4.6	94.625.894.091,29	187.703.816.426,19	(93.077.922.334,90)	(49,59)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini


BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	Audited 2021	Audited 2020
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	26.841.950.253,94	23.594.549.937,60
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	7.211.566.399,00	6.694.425.568,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	5.310.079.034,00	5.220.161.952,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	5.5.1.1.4	93.044.224.384,24	86.883.793.283,49
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	15.464.452.631,00	12.341.107.623,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1.6	8.412.174.623,00	3.776.062.462,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7	647.227.070.000,00	652.082.657.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8	271.177.191.327,00	273.535.661.290,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.1.9	210.867.720.000,00	220.436.237.000,00
12	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	5.5.1.1.10	48.012.052.973,00	29.012.328.779,00
15	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.5.1.1.11	0,00	17.723.334.172,62
16	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi	5.5.1.1.12	4.521.728.000,00	33.813.319.000,00
17	Penerimaan Pendapatan Hibah	5.5.1.1.13	66.389.156.769,00	86.083.204.580,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas		1.404.479.365.394,18	1.451.196.842.647,71
19	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
20	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	552.095.552.930,00	501.489.422.514,00
21	Pembayaran Barang	5.5.1.2.2	327.508.336.935,00	315.280.744.276,30
22	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.3	13.273.561.404,00	44.001.424.476,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	562.000.000,00	988.036.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.5	259.255.458.988,00	260.505.447.000,00
25	Pembayaran TakTerduga	5.5.1.2.6	1.421.335.930,00	7.774.407.311,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.1.2.7	2.167.392.308,00	2.053.811.784,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.1.2.8	628.140.051,00	596.527.632,00
28	Pembayaran Investasi Jangka Pendek	5.5.1.2.9	4.000.000.000,00	0,00
29	Jumlah Arus Keluar Kas		1.160.911.778.546,00	1.132.689.820.993,30
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		243.567.586.848,18	318.507.021.654,41
31	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
32	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
33	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.1	0,00	583.569.205,00
34	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.2	37.200.000,00	65.400.000,00
35	Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.3	0,00	118.916.000,00
36	Jumlah Arus Masuk Kas		37.200.000,00	767.885.205,00
37	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
38	Perolehan Tanah	5.5.2.2.1	71.067.680,00	228.592.550,00
39	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	39.388.536.203,00	49.722.400.159,00
40	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	48.455.261.295,09	60.253.228.410,00
41	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	148.769.092.132,00	142.180.178.739,00
42	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	10.357.352.401,00	33.967.486.037,00
43	Jumlah Arus Keluar Kas		247.041.309.711,09	286.351.885.895,00
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(247.004.109.711,09)	(285.584.000.690,00)
45	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
46	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
47	Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir	5.5.3.1.1	0,00	150.000,00
48	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	150.000,00
49	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
50	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.3.2.1	4.317.000.000,00	3.000.000.000,00
51	Pengembalian Dana BOS	5.5.3.2.2	0,00	0,00
52	Jumlah Arus Keluar Kas		4.317.000.000,00	3.000.000.000,00
53	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(4.317.000.000,00)	(2.999.850.000,00)

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	Audited 2021	Audited 2020
54	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
55	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
56	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	86.987.729.473,00	73.441.534.595,00
57	Jumlah Arus Masuk Kas		86.987.729.473,00	73.441.534.595,00
58	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
59	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	86.987.729.473,00	73.431.786.067,00
60	Pembayaran Utang PFK 2020	5.5.4.2.2	8.290.347,00	1.023.908,00
61	Jumlah Arus Keluar Kas		86.996.019.820,00	73.432.809.975,00
62	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(8.290.347,00)	8.724.620,00
63	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(7.761.813.209,91)	29.931.895.584,41
64	Saldo Awal Kas BUD & Bendahara Pengeluaran		68.788.053.345,92	38.856.157.761,51
65				
66	Saldo Akhir Kas BUD & Bendahara Pengeluaran		61.026.240.136,01	68.788.053.345,92
67	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		20.544.000,00	98.254.066,00
68	Saldo Akhir Kas	5.5.5	61.046.784.136,01	68.886.307.411,92

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI LUWU



H. BASMIN MATTAYANG



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	Audited 2021	Audited 2020
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	2.677.959.851.624,10	2.474.043.787.495,29
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	94.625.894.091,29	187.703.816.426,19
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
4	Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3.1	0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.3.2	0,00	0,00
6	Koreksi ekuitas lainnya	5.6.3.3	(155.115.299.842,97)	16.212.247.702,62
7	EKUITAS AKHIR (1 sd 6)	5.6.4	2.617.470.445.872,42	2.677.959.851.624,10

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan


BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG



BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Luwu harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Lapoan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan, terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran atau disingkat LRA adalah laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA ini mengandung 4 unsur, antara lain: pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih atau disingkat LP SAL merupakan laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, dalam PSAP Nomor 1 paragraf 41 dijelaskan bahwa Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Saldo anggaran lebih awal
 - 2) Penggunaan saldo anggaran lebih
 - 3) Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
 - 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
 - 5) Lain-lain
 - 6) Saldo anggaran lebih akhir
- c. Neraca merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, pada tanggal tertentu. Di dalam laporan neraca, ada 3 unsur yang harus ada di dalamnya, antara lain: aset, kewajiban, dan ekuitas.
- d. Laporan Operasional atau disingkat LO adalah jenis laporan keuangan pemerintah (pusat/daerah) yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi, yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Sama halnya jenis laporan keuangan pemerintah lain, dalam laporan operasional, terdapat beberapa unsur laporan, antara lain: pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
- e. Laporan Arus Kas atau disingkat LAK, menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode



- tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Penerimaan kas adalah semua arus kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah; dan
 - 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/daerah
- f. Laporan Perubahan Ekuitas atau disingkat LPE, berdasarkan PSAP Nomor 1, Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya Pos:
- 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus atau defisit pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi- koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode periode sebelumnya;
 - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
 - 4) Ekuitas akhir
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan atau disingkat CALK merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang nenuat catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan aruas kas.

Selain itu, jenis laporan keuangan pemerintah ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan keuangan BUMD dan Laporan Keuangan BLUD RSUD Batara Guru dan Dana di luar APBD Kabupaten Luwu (Dana BOS).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
- d. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan
- e. Menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam



mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- x. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
- y. Peraturan Bupati Luwu Nomor 70 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;



- z. Peraturan Bupati Luwu Nomor 77 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu;
- aa. Peraturan Bupati Luwu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dan Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Luwu;
- bb. Peraturan Bupati Luwu Nomor 105 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pemerintah Kabupaten Luwu;
- cc. Peraturan Bupati Luwu Nomor 106 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
- dd. Peraturan Bupati Luwu Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
- ee. Peraturan Bupati Luwu Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;
- ff. Peraturan Bupati Luwu Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 132 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
- gg. Peraturan Bupati Luwu Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu;
- hh. Peraturan Bupati Luwu Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Luwu; dan
- ii. Peraturan Bupati Luwu Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penyajian informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran yang berkenaan, yang nantinya akan menjadi acuan dan target bagi penentu kebijakan untuk tahun berikutnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan



BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian
- 3.2 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.3 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO
 - 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
 - 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
 - 4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset
 - 4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
 - 4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP



BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; Konstruksi; Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Nilai PDRB Kabupaten Luwu atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2020 mencapai 15,66 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,22 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 14,44 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 9,16 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 9,73 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Luwu mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6,26 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu mencapai 52,38 persen, angka ini menurun dari 53,88 persen di tahun 2019. Berikutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 10,14 persen (naik dari 9,75 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 8,62 persen (naik dari 8,10 persen di tahun 2019).



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.1.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun 2019 (Miliar Rp)	Tahun 2020 (Miliar Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.201,86	8.353,52
2	Pertambangan dan Penggalian	429,52	442,96
3	Industri Pengolahan	668,83	638,79
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12,10	12,56
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,07	2,24
6	Konstruksi	1.349,18	1.378,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.587,98	1.587,78
8	Transportasi dan Pergudangan	135,69	124,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110,28	107,71
10	Informasi dan Komunikasi	335,04	378,67
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	218,61	230,74
12	Real Estate	881,80	936,34
13	Jasa Perusahaan	4,19	4,1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	726,50	737,80
15	Jasa Pendidikan	545,34	587,38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	398,30	459,28
17	Jasa lainnya	50,38	48,96
Produk Domestik Regional Bruto		15.657,67	16.031,07

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun 2019 (Miliar Rp)	Tahun 2020 (Miliar Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.747,14	4.762,22
2	Pertambangan dan Penggalian	227,42	231,82
3	Industri Pengolahan	457,47	426,68
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,93	12,60
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,56	1,68
6	Konstruksi	823,64	839,60
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.173,45	1.166,66
8	Transportasi dan Pergudangan	81,81	73,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	72,56	69,70
10	Informasi dan Komunikasi	309,75	349,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	136,65	144,48
12	Real Estate	572,49	605,59
13	Jasa Perusahaan	2,56	2,45
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	446,86	446,08
15	Jasa Pendidikan	354,86	380,69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	278,88	313,27
17	Jasa lainnya	29,93	28,88
Produk Domestik Regional Bruto		9.728,96	9.855,91

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.3
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	52,38	52,11
2	Pertambangan dan Penggalian	2,74	2,76
3	Industri Pengolahan	4,27	3,98
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01
6	Konstruksi	8,62	8,60



Tabel 2.1.3
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,14	9,90
8	Transportasi dan Pergudangan	0,87	0,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,70	0,67
10	Informasi dan Komunikasi	2,14	2,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,40	1,44
12	Real Estate	5,63	5,84
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,64	4,60
15	Jasa Pendidikan	3,48	3,66
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,54	2,86
17	Jasa lainnya	0,32	0,31
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.4
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,98	0,32
2	Pertambangan dan Penggalian	6,86	1,93
3	Industri Pengolahan	10,49	(6,73)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,09	5,54
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,83	7,88
6	Konstruksi	8,81	1,94
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,65	(0,58)
8	Transportasi dan Pergudangan	9,36	(9,84)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,09	(3,95)
10	Informasi dan Komunikasi	9,97	12,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,47	5,74
12	Real Estate	5,80	5,78
13	Jasa Perusahaan	8,09	(4,07)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	12,17	(0,17)
15	Jasa Pendidikan	7,62	7,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,93	12,33
17	Jasa lainnya	8,31	(3,51)
Produk Domestik Regional Bruto		6,26	1,30

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu tahun 2020 adalah sebesar 362.027 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu merupakan 4,09 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pertumbuhan suatu daerah dalam satu periode. Kabupaten Luwu memiliki pertumbuhan ekonomi 1,30 persen jika dibandingkan secara regional dengan wilayah Luwu Raya (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo), maka Kabupaten Luwu menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Luwu Utara yang pertumbuhannya sebesar 7,11 persen dan Palopo sebesar 6,75 persen.



Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu adalah 46,18 ribu jiwa. Jika dilihat trennya, selama empat tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu relatif menurun. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu mencapai 50,58 ribu jiwa dan terus menurun hingga pada tahun 2020 mencapai 46,18 ribu jiwa atau 12,76 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Luwu.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu tahun 2020 berada pada angka 70,39 dan mengalami perkembangan sebesar 1,14 persen dibandingkan tahun 2019. IPM Kabupaten Luwu berada pada peringkat 11 dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

2.1.3 Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Luwu sebanyak 161.069 jiwa dimana sebanyak 153.113 penduduk bekerja sedangkan sisanya yaitu sekitar 7.956 penduduk merupakan pengangguran atau dapat dikatakan bahwa 4,94 persen penduduk usia produktif merupakan pengangguran. Jika dilihat dari pendidikan tertinggi, penduduk yang menanggung paling banyak merupakan lulusan SMA dan Perguruan Tinggi, yaitu sebanyak 4.194 dan 1.972 jiwa.

Tabel 2.1.5

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kabupaten Luwu, 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (1)	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja (%) (5=2:4)
	Bekerja (2)	Pengangguran (3)	Jumlah Angkatan Kerja (4=2+3)	
SD	60.847	817	61.664	99
SMP	31.151	973	32.124	97
SMA	41.487	4.194	45.681	91
Perguruan Tinggi	19.628	1.972	21.600	91
Jumlah	153.113	7.956	161.069	95
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bukan Angkatan Kerja (6)		Jumlah (7=4+6)	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja (%) (8=4:7)
SD	39.113		100.777	61
SMP	26.320		58.444	55
SMA	30.387		76.068	60
Perguruan Tinggi	7.071		28.671	75
Jumlah	102.891		263.960	61

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu



Tabel 2.1.6

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Luwu, 2020

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	23.560	10.948	34.508
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	25.210	6.011	31.221
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2.842	734	3.576
Buruh/Karyawan/Pegawai	21.339	14.838	36.177
Pekerja bebas	4.649	1.243	5.892
Pekerja keluarga/tidak dibayar	19.195	22.544	41.739
Jumlah/Total	96.795	56.318	153.113

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

2.1.4 Gini Ratio

Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Luwu yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,396. Angka ini meningkat 0,044 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2019 yang sebesar 0,352.

2.2 Kebijakan Keuangan

Selama tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Luwu melakukan perubahan anggaran yakni :

1. Peraturan Bupati Luwu tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor 05 Tahun 2021 Tanggal 05 Januari 2021 yakni adanya kekurangan alokasi anggaran untuk belanja pegawai;
2. Perubahan II dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 37 Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sehubungan dengan refocusing anggaran;
3. Perubahan III dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 47 Tahun 2021 tanggal 06 April 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sehubungan dengan terjadinya bencana puting beliung di beberapa desa di Kecamatan Lamasi Timur yang menyebabkan sebagian rumah masyarakat rusak berat dan rusak ringan;
4. Perubahan IV dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 50 Tahun 2021 tanggal 26 April 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yakni adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur;

Selain kebijakan tentang perubahan adanya pandemic Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 juga menyusun hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis,



- efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
2. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
 3. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;
 4. Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
 6. Belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dikelola di Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 7. Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok utang, Penyertaan Modal (Investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun bersangkutan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

3.1 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Arah Kebijakan Umum (AKU) Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 menggariskan bahwa Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Realisasi keuangannya.

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD TA. 2021
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
4	PENDAPATAN				
4.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	79.342.474.294,00	90.745.406.695,00	11.402.932.401,00	114,37
4.1.01	Dinas Kesehatan	24.505.066.294,00	23.079.649.651,00	(1.425.416.643,00)	94,18
4.1.02	RSUD Batara Guru	53.837.408.000,00	66.739.129.044,00	12.901.721.044,00	123,96
4.1.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.000.000.000,00	926.628.000,00	(73.372.000,00)	92,66
4.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	1.566.367.350,00	1.195.685.799,00	(370.681.551,00)	76,33
4.2.01	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000,00	141.090.000,00	(8.910.000,00)	94,06
4.2.02	Dinas Perhubungan	310.000.000,00	276.015.000,00	(33.985.000,00)	89,04
4.2.03	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	231.367.350,00	232.479.450,00	1.112.100,00	100,48
4.2.04	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	0,00
4.2.05	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	800.000.000,00	546.101.349,00	(253.898.651,00)	68,26
4.3	Urusan Pilihan	2.078.250.000,00	1.877.653.000,00	(200.597.000,00)	90,35
4.3.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	169.350.000,00	73.910.000,00	(95.440.000,00)	43,64
4.3.02	Dinas Pariwisata	25.000.000,00	28.590.000,00	3.590.000,00	114,36
4.3.03	Dinas Pertanian	253.900.000,00	35.900.000,00	(218.000.000,00)	14,14
4.3.04	Dinas Perdagangan	1.630.000.000,00	1.739.253.000,00	109.253.000,00	106,70
4.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	1.339.739.621.737,67	1.310.718.363.900,18	(29.021.257.837,49)	97,83
4.4.01	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	20.000.000,00	37.900.000,00	17.900.000,00	189,50
4.4.02	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.314.628.084.551,67	1.283.780.780.690,24	(30.847.303.861,43)	97,65
4.4.03	Badan Pendapatan Daerah	25.091.537.186,00	26.899.683.209,94	1.808.146.023,94	107,21
	JUMLAH PENDAPATAN	1.422.726.713.381,67	1.404.537.109.394,18	(18.189.603.987,49)	98,72
5	BELANJA				
5.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	918.523.193.422,96	853.102.937.472,09	(65.420.255.950,87)	92,88
5.1.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	410.746.008.567,00	390.952.323.275,09	(19.793.685.291,91)	95,18
5.1.02	Dinas Kesehatan	182.330.950.366,00	163.225.718.859,00	(19.105.231.507,00)	89,52
5.1.03	RSUD Batara Guru	101.147.003.573,00	78.048.607.852,00	(23.098.395.721,00)	77,16



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD TA. 2021
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
5.1.04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	162.696.534.627,00	160.104.909.601,00	(2.591.625.026,00)	98,41
5.1.05	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.271.084.765,00	27.132.478.094,00	(138.606.671,00)	99,49
5.1.06	Satuan Polisi Pamong Praja	5.585.729.159,00	5.472.043.603,00	(113.685.556,00)	97,96
5.1.07	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.326.240.401,00	5.157.792.206,00	(168.448.195,00)	96,84
5.1.08	Dinas Sosial	4.673.907.778,96	4.511.379.270,00	(162.528.508,96)	96,52
5.1.09	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.745.734.186,00	18.497.684.712,00	(248.049.474,00)	98,68
5.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	76.154.281.302,00	70.567.354.112,00	(5.586.927.190,00)	92,66
5.2.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5.114.819.041,00	4.944.157.540,00	(170.661.501,00)	96,66
5.2.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.423.860.455,00	3.310.942.353,00	(112.918.102,00)	96,70
5.2.03	Dinas Ketahanan Pangan	5.066.645.931,00	4.948.245.719,00	(118.400.212,00)	97,66
5.2.04	Dinas Pertanahan	3.357.926.133,00	2.541.422.805,00	(816.503.328,00)	75,68
5.2.05	Dinas Lingkungan Hidup	5.097.025.624,00	4.871.312.671,00	(225.712.953,00)	95,57
5.2.06	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.235.717.140,00	4.933.801.626,00	(301.915.514,00)	94,23
5.2.07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.732.063.012,00	7.565.663.869,00	(166.399.143,00)	97,85
5.2.08	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	9.983.798.305,00	7.546.351.233,00	(2.437.447.072,00)	75,59
5.2.09	Dinas Perhubungan	7.380.556.222,00	7.171.213.647,00	(209.342.575,00)	97,16
5.2.10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	5.573.601.410,00	5.424.355.095,00	(149.246.315,00)	97,32
5.2.11	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	3.255.928.699,00	3.069.956.441,00	(185.972.258,00)	94,29
5.2.12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.974.613.979,00	3.829.581.592,00	(145.032.387,00)	96,35
5.2.13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.432.765.399,00	6.188.233.378,00	(244.532.021,00)	96,20
5.2.15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.524.959.952,00	4.222.116.143,00	(302.843.809,00)	93,31
5.3	Urusan Pilihan	49.129.602.152,00	47.628.695.180,00	(1.500.906.972,00)	96,95
5.3.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.421.492.783,00	7.324.848.650,00	(96.644.133,00)	98,70
5.3.02	Dinas Pariwisata	3.905.580.886,00	3.755.379.133,00	(150.201.753,00)	96,15
5.3.03	Dinas Pertanian	30.590.006.857,00	29.502.871.263,00	(1.087.135.594,00)	96,45
5.3.04	Dinas Perdagangan	7.212.521.626,00	7.045.596.134,00	(166.925.492,00)	97,69
5.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	442.808.293.775,71	432.654.101.493,00	(10.154.192.282,71)	97,71
5.4.01	Sekretariat Daerah	28.577.178.122,00	27.817.577.537,00	(759.600.585,00)	97,34
5.4.02	Inspektorat Daerah	7.962.976.461,00	7.389.610.943,00	(573.365.518,00)	92,80
5.4.03	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	7.091.056.794,75	6.920.522.506,00	(170.534.288,75)	97,60
5.4.04	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	274.149.063.880,00	272.559.869.403,00	(1.589.194.477,00)	99,42
5.4.05	Badan Pendapatan Daerah	13.407.527.876,00	12.961.594.445,00	(445.933.431,00)	96,67



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD TA. 2021
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
5.4.06	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	19.138.485.859,00	18.479.508.652,00	(658.977.207,00)	96,56
5.4.07	Sekretariat DPRD	32.104.221.746,00	30.669.649.705,00	(1.434.572.041,00)	95,53
5.4.08	Kecamatan Bajo	2.886.804.670,00	2.641.373.192,00	(245.431.478,00)	91,50
5.4.09	Kecamatan Bajo Barat	1.324.317.332,00	1.217.282.693,00	(107.034.639,00)	91,92
5.4.10	Kecamatan Basse Sangtempe	1.816.032.240,00	1.680.702.924,00	(135.329.316,00)	92,55
5.4.11	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	1.380.699.006,96	1.276.317.256,00	(104.381.750,96)	92,44
5.4.12	Kecamatan Belopa	5.240.269.995,00	4.775.771.296,00	(464.498.699,00)	91,14
5.4.13	Kecamatan Belopa Utara	3.719.226.664,00	3.482.969.819,00	(236.256.845,00)	93,65
5.4.14	Kecamatan Bupon	2.213.120.739,00	1.998.633.322,00	(214.487.417,00)	90,31
5.4.15	Kecamatan Kamanre	2.022.183.019,00	1.812.948.008,00	(209.235.011,00)	89,65
5.4.16	Kecamatan Lamasi	2.946.852.595,00	2.711.868.351,00	(234.984.244,00)	92,03
5.4.17	Kecamatan Lamasi Timur	1.445.477.849,00	1.342.453.814,00	(103.024.035,00)	92,87
5.4.18	Kecamatan Larompong	2.793.857.610,00	2.531.987.943,00	(261.869.667,00)	90,63
5.4.19	Kecamatan Larompong Selatan	2.477.562.281,00	2.314.153.702,00	(163.408.579,00)	93,40
5.4.20	Kecamatan Latimojong	1.283.590.152,00	1.145.272.238,00	(138.317.914,00)	89,22
5.4.21	Kecamatan Ponrang	4.223.837.870,00	3.969.639.648,00	(254.198.222,00)	93,98
5.4.22	Kecamatan Ponrang Selatan	2.859.025.028,00	2.617.719.636,00	(241.305.392,00)	91,56
5.4.23	Kecamatan Suli	2.039.105.074,00	1.828.168.272,00	(210.936.802,00)	89,66
5.4.24	Kecamatan Suli Barat	1.770.498.664,00	1.555.479.596,00	(215.019.068,00)	87,86
5.4.25	Kecamatan Walenrang	3.262.316.200,00	3.075.444.248,00	(186.871.952,00)	94,27
5.4.26	Kecamatan Walenrang Barat	1.504.635.036,00	1.417.028.180,00	(87.606.856,00)	94,18
5.4.27	Kecamatan Walenrang Timur	1.885.916.379,00	1.713.366.217,00	(172.550.162,00)	90,85
5.4.28	Kecamatan Walenrang Utara	2.969.239.122,00	2.745.585.177,00	(223.653.945,00)	92,47
5.4.29	Kecamatan Bua	4.140.310.647,00	3.940.370.989,00	(199.939.658,00)	95,17
5.4.30	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	4.172.904.864,00	4.061.231.781,00	(111.673.083,00)	97,32
	JUMLAH BELANJA	1.486.615.370.652,67	1.403.953.088.257,09	(82.662.282.395,58)	94,44
	SURPLUS / (DEFISIT)	(63.888.657.271,00)	584.021.137,09	64.472.678.408,09	(0,91)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	68.388.657.271,00	68.388.657.270,92	(0,08)	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	68.388.657.271,00	68.388.657.270,92	(0,08)	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.500.000.000,00	4.317.000.000,00	(183.000.000,00)	95,93
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000,00	4.317.000.000,00	0,00	95,93



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD TA. 2021
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
	PEMBIAYAAN NETTO	63.888.657.271,00	64.071.657.270,92	182.999.999,92	100,29
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	64.655.678.408,01	64.655.678.408,01	100,00

Selain itu indikator kinerja SKPD berdasarkan program yang terealisasi dijabarkan seperti di bawah ini :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,75% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengelolaan Pendidikan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 88,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan
 - c. Program Pengembangan Kurikulum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,61% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,96% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pengembangan Kebudayaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,28% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,90% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
1. Dinas Kesehatan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,58% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 84,76% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program peningkatan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 56,78% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 75,20% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,17% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 71,44% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- c. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,23% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program penataan bangunan gedung dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - g. Program penyelenggaraan jalan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,39% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - h. Program pengembangan jasa konstruksi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - i. Program penyelenggaraan penataan ruang dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,59% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,94% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program penataan bangunan dan lingkungannya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,14% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,67% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pengembangan Perumahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,92% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program kawasan permukiman dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,84% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - g. Program peningkatan prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



5. Satuan Polisi Pamong Praja
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,01% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,23% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
6. Dinas Pemadam Kebakaran
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,23% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
7. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,07% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program penanggulangan bencana dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,88% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
8. Dinas Sosial
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,20% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pemberdayaan Sosial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 10,63% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Rehabilitasi Sosial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,41% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program perlindungan dan jaminan sosial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,14% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program penanganan bencana dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,42% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,45% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,88% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program penempatan tenaga kerja dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,10% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Hubungan Industrial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,25% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- e. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,37% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,37% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,47% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Perlindungan Perempuan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 89,44% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,21% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program pemenuhan hak anak (PHA) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,20% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - g. Program Perlindungan Khusus Anak dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
11. Dinas Ketahanan Pangan
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,32% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,69% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Penanganan Kerawanan pangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,75% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program pengawasan keamanan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
12. Dinas Pertanahan
- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program penyelesaian sengketa tanah garapan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,79% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 8,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- d. Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,34% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
13. Dinas Lingkungan Hidup
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,92% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program perencanaan lingkungan hidup dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 46,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,55% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program pengelolaan persampahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,65% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pendaftaran Penduduk dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,71% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pencatatan Sipil dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program pengelolaan profil kependudukan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 78,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,80% sesuai dengan capaian kinerja.
 - b. Program Peningkatan kerjasama Desa dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,07% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,56% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,65% sesuai dengan capaian kinerja.
 - b. Program Pengendalian Penduduk dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 71,74% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 45,96% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
17. Dinas Perhubungan
 - a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,55% sesuai dengan capaian kinerja.
 - b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,02% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pengelolaan Pelayanan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,41% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 18. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 - a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,75% sesuai dengan capaian kinerja.
 - b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,92% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,54% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 19. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,79% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,24% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha Mikro (UMKM) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,15% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program perencanaan dan pembangunan industri dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 88,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program pengendalian izin usaha industri dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,87% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Promosi Penanaman Modal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,32% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,84% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,79% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
21. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,42% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program pengembangan kapasitas daya saing koolahragaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,88% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program pengembangan kapasitas kepramukaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 87,80% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,40% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pembinaan Perpustakaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 83,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program pengelolaan arsip dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,74% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
23. Dinas Perikanan
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,34% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program pengelolaan Perikanan Tangkap dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,51% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program pengelolaan perikanan Budidaya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,81% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
24. Dinas Pariwisata
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,90% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- c. Program pemasaran pariwisata dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 18,51% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
25. Dinas Pertanian
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,71% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,52% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,61% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 84,48% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program penyuluhan pertanian dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
26. Dinas Perdagangan
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,27% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program standardisasi dan perlindungan konsumen dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,54% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
27. Sekretariat Daerah
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,83% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program perekonomian dan pembangunan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
28. Inspektorat Daerah
- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,56% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program penyelenggaraan pengawasan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 66,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
29. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,18% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,40% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,15% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program penelitian dan pengembangan daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,23% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 30. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program pengelolaan keuangan daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,49% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program pengelolaan barang milik daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,63% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 31. Badan Pendapatan Daerah
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,07% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengelolaan pendapatan daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,26% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 32. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,59% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Kepegawaian Daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program pengembangan sumber daya manusia dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,05% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 33. Sekretariat DPRD
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,23% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,61% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 34. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat



- a. Program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,83% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- b. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- c. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- d. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 88,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Pendapatan LRA

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu TA 2021 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp1.422.726.713.381,67 dan terealisasi sebesar Rp1.404.537.109.394,18 atau 98,72% yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA dianggarkan sebesar Rp118.757.324.971,00 dan terealisasi sebesar Rp132.465.563.071,18 atau 111,54%;
- b. Pendapatan Transfer - LRA dianggarkan sebesar Rp1.225.142.728.580,67 dan terealisasi sebesar Rp1.205.682.389.554,00 atau 98,41%; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dianggarkan sebesar Rp78.826.659.830,00 dan terealisasi sebesar Rp66.389.156.769,00 atau 84,22%.

Perincian Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Pada APBD TA 2021 dianggarkan sebesar Rp118.757.324.971,00 dan direalisasikan sebesar Rp132.465.563.071,18 atau 111,54%. Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah, Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp25.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp26.841.950.253,94 atau 107,37%;
- 2) Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp8.629.667.350,00 dan terealisasi sebesar Rp7.232.109.399,00 atau 83,81%;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa dividen pada Bank Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar



- Rp4.835.573.382,00 dan terealisasi sebesar Rp5.310.079.034,00 atau 109,81%; dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp80.292.084.239,00 yang sampai akhir TA 2021 direalisasikan sebesar Rp93.081.424.384,24 atau 115,93%.
- b. Pendapatan Transfer – LRA
- Pada APBD TA 2021 dianggarkan sebesar Rp1.225.142.728.580,67 dan terealisasi sebesar Rp1.205.682.389.554,00 atau 98,41% dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA, dianggarkan sebesar Rp1.164.323.319.656,00 dan terealisasi sebesar Rp1.153.148.608.581,00 atau 99,04%;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA dianggarkan sebesar Rp60.819.408.924,67 dan terealisasi sebesar Rp52.533.780.973,00 atau 86,38%;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Pada APBD TA 2021 dianggarkan sebesar Rp78.826.659.830,00 dan terealisasi sebesar Rp66.389.156.769,00 atau 84,22% dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp13.364.244.040,00 dan terealisasi sebesar Rp11.297.246.769,00 atau 84,53%;
 - 2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp65.462.415.790,00 dan terealisasi sebesar Rp55.091.910.000,00 atau 84,16%

3.2.2 Belanja

Pada APBD Tahun Anggaran 2021, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu dianggarkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja Transfer. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, iringasi dan jaringan serta belanja modal aset tetap lainnya dan yang terakhir adalah belanja tidak terduga. Disamping jenis belanja diatas juga termasuk mengurangi pendapatan adalah transfer bantuan keuangan.

Belanja dan Transfer TA 2021, dialokasikan sebesar Rp1.749.233.789.506,67 dan terealisasi sebesar Rp1.666.004.079.605,09 atau 95,24% yang terdiri atas:

- a. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1.486.615.370.652,67,00 dan terealisasi sebesar Rp1.403.953.088.258,09 atau 94,44% dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp958.329.340.705,67 dan terealisasi sebesar Rp893.439.451.270,00 atau 93,23%;
 - 2) Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp263.560.156.664,00 dan terealisasi sebesar Rp247.041.309.711,09 atau 93,73%;
 - 3) Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp2.107.454.429,00 dan terealisasi sebesar Rp1.421.335.930,00 atau 67,44%;
- b. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp262.618.418.854,00 dan terealisasi sebesar Rp262.050.991.347,00 atau 99,78%.



3.2.3 Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Kabupaten Luwu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dianggarkan sebesar Rp63.888.657.271,00 dan terealisasi sebesar Rp64.071.657.270,92 atau 100,29% terdiri atas:

- Penerimaan Pembiayaan Daerah, dianggarkan sebesar Rp68.388.657.271,00 dan terealisasi sebesar Rp68.388.657.270,92 atau 100%; dan
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.317.000.000,00 atau 95,93% .

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

3.3.1 Pendapatan

Permasalahan:

- Kinerja Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah belum optimal.
- Dana perimbangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi belum sepenuhnya ditransfer ke kasda secara tepat waktu.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pendapatan daerah.
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan retribusi.

Solusi:

- Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui pengembangan lapangan usaha dan jaringan pemasaran.
- Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mengenai dana perimbangan untuk dapat ditransfer tepat waktu.
- Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pendapatan daerah.
- Sosialisasi dan pemberian motivasi kepada pajak dan retribusi.

3.3.2 Belanja

Permasalahan:

- Regulasi dan ketentuan perundang-undangan menyangkut pengelolaan keuangan daerah setiap saat mengalami perubahan sedangkan kemampuan Aparatur dalam mengabsorsi dan mengadopsi berbagai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang baru yang mengatur mekanisme dan tata cara pelaksanaan APBD relative terbatas.
- Kebutuhan dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah.
- Kemampuan daya serap anggaran dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan relative mengalami keterlambatan.



- d. Masih lemahnya perencanaan dari SKPD dalam merencanakan kegiatan terutama kegiatan pembangunan fisik, sehingga masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
- e. Ketidakpatuhan SKPD dalam memenuhi jadwal SPJ dari realisasi anggaran, sehingga menjadikan permasalahan sendiri dalam manajemen pengelolaan kas.
- f. Sering terjadi keterlambatan penyeteroran penerimaan dari Bendahara Penerima (baik PAD maupun bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Pusat) terutama pada akhir tahun, sehingga menjadi penerimaan tahun berikutnya mengakibatkan berkurangnya penerimaan tahun berkenaan.

Solusi:

- a. Perlu perencanaan yang lebih matang, selektif dan komprehensif mengenai program dan kegiatan prioritas dan tetap harus mendasari strategi pembangunan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana melalui sosialisasi dan diklat terutama dalam implementasi dan penyusunan dokumen perencanaan yang merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Untuk mengurangi keterlambatan dalam pertanggungjawaban anggaran (SPJ) maka perlu adanya penerapan sanksi dan pembinaan dengan memperbaiki mekanisme penganggaran dan pencairan anggaran serta pengembangan system informasi manajemen keuangan daerah untuk memberikan informasi yang cepat mengenai kinerja keuangan daerah dan mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran.
- d. Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka ditempuh cara penetapan skala prioritas, disamping itu diupayakan adanya penambahan/peningkatan penerimaan pendapatan daerah.



BAB IV **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu TA 2021, entitas pelaporan yang dalam hal ini PPKD atau BPKD pada Kabupaten Luwu menyusun laporan keuangan yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Sementara itu, untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu merupakan entitas akuntansi yang wajib membuat laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Luwu menyajikan saldo Akun-Akun Tahun 2021 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK-RI tahun



sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Luwu, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Luwu yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

Pendapatan LO menggunakan basis akrual sehingga pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan proses penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.



Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayarmaka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan-LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam



periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi diSKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
 - a. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
 - b. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
2. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
4. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum, Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
5. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum, Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Luwu, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten



Luwu terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

1. Kas dan Setara Kas
 - a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam.
 - b. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
 - c. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
 - d. Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
 - 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara



umum daerah;

- 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
 - e. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:
 - 1) Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas;
 - 2) Kas di Bendahara Penerimaan.
 - f. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Piutang
- a. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
 - b. Piutang diakui sebesar nilai nominal dari piutang. Jika piutang bertambah dicatat di sebelah debet, jika berkurang dicatat di sebelah kredit.
 - c. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaatekonomi lainnya kepada entitas lain.
Piutang dapat diakui ketika:
 - 1) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;
 - 2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - 3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - d. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - 2) jumlah piutang dapat diukur;
 - 3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - 4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - e. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
 - f. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemberian pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda,



commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- 2) Penjualan Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 3) Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - 4) Pemberian fasilitas/jasa Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- g. Kebijakan mengenai penyisihan piutang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2019 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih.
- h. Penyisihan Piutang dan perhitungannya

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dan cara untuk menyesuaikan yaitu dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang dan perhitungannya didasarkan pada umur piutang yang dapat terdiri atas 4 (empat) klasifikasi umur piutang, yaitu :

No	Umur Piutang	Kategori	% Penyisihan
1	0 s.d. 12 bulan	Lancar	5%
2	13 s.d. 36 bulan	Kurang Lancar	10%
3	37 s.d. 60 bulan	Ragu	50%
4	> 60 bulan	Macet	100%

Penyisihan piutang ini bukan merupakan beban belanja, tetapi koreksi agar nilai piutang yang tersaji pada Neraca merupakan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan penyajiannya di Neraca merupakan pengurang dari akun piutang.

3. Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi; dan/atau
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.



-
- b. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
Persediaan dapat meliputi:
- 1) Barang konsumsi termasuk di dalamnya barang pakai habis;
 - 2) Amunisi;
 - 3) Bahan untuk pemeliharaan;
 - 4) Suku cadang;
 - 5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - 6) Pita cukai dan leges;
 - 7) Bahan baku;
 - 8) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - 9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan/atau
 - 10) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- c. Persediaan diakui pada saat:
- 1) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - 2) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. Terhadap persediaan yang rusak/usang tidak dicatat sebagai nilai persediaan dalam lembar muka laporan keuangan (neraca) tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- d. Pengakuan Beban Persediaan
- 1) Pendekatan Aset
Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat dirumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.
 - 2) Pendekatan Beban
Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.
- e. Pengakuan Selisih Persediaan
Selisih Persediaan Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini



diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

f. Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Metode penilaian persediaan adalah menggunakan harga pembelian terakhir.

2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar atau didasarkan pada dokumen yang menyertainya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

g. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

h. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir dan Metode *First In First Out* (FIFO)

i. Metode Penilaian Harga *First In First Out* (FIFO) digunakan untuk persediaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Barang Habis Pakai (BHP) pada kelompok farmasi yang ada pada SKPD Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dan pencatatannya menggunakan metode perpetual.

j. Metode Penilaian Harga Pembelian Terakhir digunakan untuk persediaan selain obat-obatan, Alat Kesehatan dan Barang Habis Pakai (BHP) yang ada pada SKPD Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dan pencatatannya menggunakan metode periodik.

k. Penilaian persediaan untuk barang-barang sejenis alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya terhitung jika dalam segel/kemasan lengkap, terkecuali obat-obatan dan alat kesehatan/reagen yang dapat diidentifikasi harga tiap satuan terkecil, misalnya ampul/vial, tablet, strip, dan benda berharga berupa karcis serta akta-akta.

6. Belanja Dibayar Dimuka

a. Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian;

b. Belanja dibayar dimuka diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas



yang akan dikeluarkan dan akan dipertanggungjawabkan.

5. Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi dua:
 - 1) Investasi Permanen
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali Investasi permanen meliputi:
 - a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat.
 - 2) Investasi Non Permanen
Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
Investasi non permanen meliputi:
 - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- c. Aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- d. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- e. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi non permanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai



- sebesar nilai perolehannya.
- b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga
- f. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- g. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
6. Aset Tetap
- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan.
 - c. Aset Tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
 - d. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 - e. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya.
 - f. Kebijakan batas minimum kapitalisasi hanya diberlakukan untuk jenis belanja peralatan/mesin dan aset tetap lainnya sedangkan batasan minimum untuk tanah, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan tidak dibatasi berapapun besarnya.
 - g. Batasan ini hanya untuk perolehan awal aset tetap melalui pembelian aset tetap atau



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pembangunan baru yang tidak terkait dengan aset yang telah ada. Batas minimum kapitalisasi untuk peralatan dan mesin diatur sebagai berikut:

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
I	Peralatan dan Mesin	
a	Alat Besar	
	- Alat Besar Darat	>= 10.000.000
	- Aalat Besar Apung	>= 10.000.000
	- Alat Bantu	>= 1.000.000
b	Alat Angkutan	
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	>= 5.000.000
	- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	>= 1.000.000
	- Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	>= 5.000.000
	- Alat-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	>= 1.000.000
	- Alat-Alat Angkutan Bermotor Udara	>= 10.000.000
c	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
	- Alat Bengkel Bermesin	>= 1.000.000
	- Alat Bengkel Tak Bermesin	>= 1.000.000
	- Alat Ukur	>= 1.000.000
d	Alat Pertanian	
	- Alat Pengolahan	>= 1.000.000
e	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat Kantor	>= 1.000.000
	- Alat Rumah Tangga	>= 1.000.000
	- Meja dan Kursi Kantor/Rapat/Pejabat	>= 500.000
f	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
	- Alat Studio	>= 1.000.000
	- Alat Komunikasi	>= 1.000.000
	- Peralatan Pemancar	>= 1.000.000
	- Peralatan Komunikasi Navigasi	>= 1.000.000
g	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
	- Alat Kedokteran	>= 1.000.000
	- Alat Kesehatan Umum	>= 1.000.000
h	Alat Laboratorium	
	- Unit Alat Laboratorium	>= 1.000.000
	- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	>= 1.000.000
	- Alat Peraga Praktek Sekolah	>= 500.000
	- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	>= 1.000.000
	- Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	>= 1.000.000
	- Radiation Aplication and Non Destructive	>= 1.000.000
	- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	>= 1.000.000
	- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	>= 1.000.000
	- Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan	>= 1.000.000
i	Alat Persenjataan	
	- Senjata api	>= 1.000.000
	- Persenjataan non Senjata Api	>= 1.000.000
	- Senjata Sinar	>= 1.000.000
	- Alat Khusus Kepolisian	>= 1.000.000
j	Komputer	
	- Komputer Unit	>= 1.000.000
	- Peralatan Komputer	>= 1.000.000
k	Alat Eksplorasi	
	- Alat Eksplorasi Topografi	>= 5.000.000
	- Alat Eksplorasi Geofisika	>= 5.000.000
l	Alat Pengeboran	
	- Alat Pengeboran Mesin	>= 1.000.000
	- Alat Pengeboran Non Mesin	>= 1.000.000
m	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
	- Sumur	>= 3.000.000
	- Produksi	>= 1.000.000
	- Pengolahan dan Pemurnian	>= 1.000.000
n	Alat Bantu Eksplorasi	
	- Alat Bantu Eksplorasi	>= 1.000.000
	- Alat Bantu Produksi	>= 1.000.000
o	Alat Keselamatan Kerja	



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
	- Alat Deteksi	>= 1.000.000
	- Alat Pelindung	>= 1.000.000
	- Alat SAR	>= 1.000.000
	- Alat Kerja Penerbangan	>= 1.000.000
p	Alat Peraga	
	- Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	>= 1.000.000
q	Peralatan Proses/Produksi	
	- Unit Peralatan Proses Produksi	>= 1.000.000
r	Rambu-Rambu	
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	>= 1.000.000
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	>= 1.000.000
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	>= 1.000.000
s	Peralatan Olah Raga	
	- Peralatan Olah Raga	>= 1.000.000
II	Gedung dan Bangunan	
a	Bangunan Gedung	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 25.000.000
	- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 25.000.000
b	Monumen	
	- Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	>= 25.000.000
c	Bangunan Menara	
	- Bangunan Menara Perambuan	>= 25.000.000
d	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
	- Tugu/Tanda Batas	>= 25.000.000
III	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
a	Jalan	
	- Jalan	100.000.000
	- Jembatan	50.000.000
b	Bangunan Air	
	- Bangunan Air Irigasi	10.000.000
	- Bangunan Air Pasang Surut	10.000.000
	- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	10.000.000
	- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.000.000
	- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	10.000.000
	- Bangunan Air Bersih/Baku	10.000.000
	- Bangunan Air Kotor	10.000.000
c	Instalasi	
	- Instalasi Air Bersih/Air Baku	10.000.000
	- Instalasi Air Kotor	10.000.000
	- Instalasi Pengolahan Sampah	10.000.000
	- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10.000.000
	- Instalasi Pembangkit Listrik	10.000.000
	- Instalasi Gardu Listrik	5.000.000
	- Instalasi Pertahanan	10.000.000
	- Instalasi Gas	10.000.000
	- Instalasi Pengaman	5.000.000
	- Instalasi Lain	1.000.000
d	Jaringan	1.000.000
	- Jaringan Air Minum	
	- Jaringan Listrik	1.000.000
	- Jaringan Telepon	1.000.000
	- Jaringan Gas	1.000.000
IV	Aset Tetap Lainnya	
a	Hewan	1.000.000
b	Biota Perairan	
	- Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	1.000.000
	- Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya)	1.000.000
	- Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan sebangsanya)	1.000.000
	- Coeleterata (Ubur-ubur dan sebangsanya)	1.000.000
	- Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan sebangsanya)	1.000.000
	- Amphibia (Kodok dan sebangsanya)	1.000.000



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
	- Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan sebagainya)	1.000.000
	- Mamalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan sebagainya)	1.000.000
	- Algae (Rumput laut dan Tumbuh-Tumbuhan lain yang hidup di dalam air)	1.000.000
	- Biota Perairan lainnya	1.000.000
c	Tanaman	100.000

- h. Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan dan rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tersebut, maka ditetapkan masa manfaat dari masing-masing kelompok aset sebagai berikut:

No	Objek Belanja	Kelompok	Masa Manfaat Awal (Tahun)
1	Alat-alat Besar	Alat-alat Besar Darat	10
		Alat-alat Besar Apung	8
		Alat-alat Bantu	7
2	Alat-alat Angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
		Alat Angkut Apung Bermotor	10
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
		Alat Angkut Bermotor Udara	20
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	10
		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
		Alat Ukur	5
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	4
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	5
		Alat Rumah Tangga	5
		Peralatan Komputer	4
		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	5
		Alat Komunikasi	5
		Peralatan Pemancar	10
7	Alat-alat Kedokteran	Alat Kedokteran	5
		Alat Kesehatan	5
8	Alat Laboratorium	Unit-Unit Laboratorium	8
		Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
9	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	Senjata Api	10
		Persenjataan Non Senjata Api	3
		Amunisi	5
		Senjata Sinar	5
		Alat Keamanan dan Perlindungan	5
10	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
		Bangunan Menara	40



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Objek Belanja	Kelompok	Masa Manfaat Awal (Tahun)
11	Monumen/Bangunan bersejarah	Bangunan Bersejarah	50
		Tugu Peringatan	50
		Candi	50
		Monomen/Bangunan Bersejarah	50
		Tugu Peringatan Lain	50
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
		Rambu-Rambu	50
		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
12	Jalan dan Jembatan	Jalan	10
		Jembatan	50
13	Bangunan Air/Irigasi	Bangunan Air Irigasi	50
		Bangunan Air Pasang Surut	50
		Bangunan Air Rawa	25
		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
		Bangunan Air Bersih/Baku	40
		Bangunan Air Kotor	40
		Bangunan Air	40
14	Instalasi	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
		Instalasi Air Kotor	30
		Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
		Instalasi Pembangkit Listrik	40
		Instalasi Gardu Listrik	40
		Instalasi Pertahanan	30
		Instalasi Gas	30
15	Jaringan	Jaringan Air Minum	30
		Jaringan Listrik	40
		Jaringan Telepon	20
		Jaringan Gas	30
16	Buku dan perpustakaan	Buku	5
		Terbitan	5
		Barang-barang perpustakaan	5
17	Barang bercorak kebudayaan	Barang bercorak kebudayaan	5
		Alat olah raga lainnya	5

- i. Dalam hal penentuan belanja renovasi yang dapat dikapitalisasi, Belanja renovasi/restorasi/overhaul yang dianggarkan dalam pos Belanja Modal di Kapitalisasi dalam Aset Tetap dengan menambah Nilai Perolehan sesuai tahun renovasi/restorasi/overhaul dan menambah masa manfaat, namun tidak dapat melebihi masa manfaat awal aset tetap yang telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu.
- j. Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk seluruh jenis aset tetap yang dimiliki selain tanah dan aset tetap lainnya seperti tanaman dan hewan. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah bulan, maka digunakan pendekatan penyebulanan, yang artinya bulan perolehan aset tetap sebagai dasar perhitungan.
- k. Dalam penerapan penyusutan tidak ditetapkan adanya nilai sisa/ Residu. Dalam hal



- nilai buku aset tetap telah habis dan kondisi aset tetap masih dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, maka aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai peroleh maupun akumulasi penyusutannya. Aset tetap tersebut tetap dicatat dalam aset yang bersangkutan dan dapat dihapuskan jika telah mendapat ijin penghapusan buku dari pejabat yang berwenang.
1. Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Suatu aset tetap tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir.
 - m. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain adalah:
 1. Dihilangkan
 2. Dipertukarkan dengan aset tetap lainnya
 3. Dijadikan Penyertaan Modal
 4. Dijual
 5. Dimusnahkan
 - n. Aset-aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya. Suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca.
7. Dana Cadangan
- a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - b. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
 - c. Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan yang diukur sebesar nilai nominal.
 - d. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
 - e. Pencairan Dana Cadangan
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.



8. Aset Lainnya

a. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

5) Tagihan Jangka Panjang:

- a) Tagihan Penjualan Angsuran
- b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

6) Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

- a) Sewa

7) Kerjasama Pemanfaatan:

- a) Bangun Guna Serah
- b) Bangun Serah Guna

8) Aset Tidak Berwujud :

- a) *Goodwill*
- b) *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
- c) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
- d) Lisensi dan *Franchise*
- e) Hak Cipta (*Copyright*), Paten dan Hak lainnya
- f) Aset Tidak Berwujud Lainnya

9) Aset Lain-lain :

- a) Aset Lain-Lain

b. Tagihan Jangka Panjang

4) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat terjadi penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

5) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Ketetapan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM).

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSP.

3) Bangun Guna Serah (BGS)/*Build, Operate, Transfer* (BOT)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Kerja Sama Pemanfaatan, BGS diakui jika telah melalui mekanisme tender/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didukung oleh Surat Persetujuan Pemanfaatan dari Kepala Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan.



4) Bangun Serah Guna (BSG)/*Build, Transfer, Operate* (BTO)

Kerja Sama Pemanfaatan, BSG diakui jika telah melalui mekanisme tender/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didukung oleh Surat Persetujuan Pemanfaatan dari Kepala Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan.

Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

d. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari :

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal adalah :

- 1) ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
- 3) ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Amortisasi terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dapat dilakukan dengan metode seperti garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun untuk semua kelompok ATB.

e. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.



4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Luwu.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Luwu, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancardalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

- a. Utang lancar merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
 - b. Utang lancar terdiri atas bagian lancar utang jangka panjang dan perhitungan pihak ketiga;
 - c. Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
 - d. Utang perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
 - e. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
 - f. Utang perhitungan pihak ketiga diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran utang perhitungan pihak ketiga yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
 - g. Utang lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- ##### 2. Kewajiban Jangka Panjang.
- a. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
 - b. Utang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri;
 - c. Utang dalam negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri;



- d. Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
- e. Utang luar negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri;
- f. Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
- g. Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten luwu yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini BPKD selaku BUD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan pemerintah kabupaten luwu, Laporan Keuangan BLUD disusun dengan berbasis SAP.

Prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.



4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahkan Lembaran Negara Nomor 5165) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tanggal 30 Desember 2020 dan secara teknis dibantu dengan penggunaan sistem aplikasi SIMDA.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk Tahun Anggaran 2021 telah menerapkan penyusutan dan kapitalisasi aset tetap secara komputersasi dengan bantuan sistem SIMDA BMD sesuai keadaan aset tetap yang sesungguhnya untuk dapat menyajikan saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2021 secara wajar pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021.



BAB V

RINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.404.537.109.394,18 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp132.465.563.071,18; Pendapatan Transfer sebesar Rp1.205.682.389.554,00; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp66.389.156.769,00.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah; Pendapatan Retribusi Daerah; Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah dalam tahun 2021 antara lain mencakup: (i) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah; (ii) potensi-potensi pendapatan baru yang dapat digali; dan (iii) Penegakan Perda Pendapatan.

Pendapatan Transfer dalam tahun 2021 antara lain mencakup Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan yaitu Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Insentif Daerah (DID) yaitu DID dan Dana Desa; Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil yaitu Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bantuan Keuangan yaitu bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam tahun 2021 terdiri dari pendapatan hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Belanja daerah meliputi (i) Belanja Operasi; (ii) Belanja Modal; (iii) Belanja Tidak Terduga; dan (iv) Belanja Transfer. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap yang didalamnya juga terdapat Pengeluaran yang bersumber dari dana BOS dan Dana JKN Kapitasi. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap. Belanja Tidak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi di luar perencanaan pemerintah daerah. Belanja Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan.

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.403.953.088.257,09 yang terdiri atas:

- (i) Belanja Operasi sebesar Rp893.420.451.269,00
- (ii) Belanja Modal sebesar Rp247.060.309.711,09
- (iii) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.421.335.930,00
- (iv) Belanja Transfer sebesar Rp262.050.991.347,00

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah maka Surplus Anggaran yang terjadi pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp584.021.137,09.



Realisasi Pembiayaan Netto pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp64.071.657.270,92 yang merupakan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp68.388.657.270,92 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp4.317.000.000,00.

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

Jumlah anggaran Pendapatan-LRA Tahun 2021 sebesar Rp1.422.726.713.381,67 dan terealisasi sebesar 98,72% atau sebesar Rp1.404.537.109.394,18 mengalami penurunan sebesar Rp47.427.618.458,53 dari Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.451.964.727.852,71.

Pendapatan-LRA terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Bantuan Keuangan disajikan sebagai komponen dari Pendapatan Transfer. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Pendapatan – LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		(%)	2020 Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah-LRA	118.757.324.971,00	132.465.563.071,18	111,54	123.160.815.946,09
2	Pendapatan Transfer-LRA	1.225.142.728.580,67	1.205.682.389.554,00	98,41	1.242.720.707.326,62
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	78.826.659.830,00	66.389.156.769,00	84,22	86.083.204.580,00
Pendapatan – LRA		1.422.726.713.381,67	1.404.537.109.394,18	98,72	1.451.964.727.852,71

Pendapatan berdasarkan perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dalam memungut pendapatan daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Pendapatan Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2020	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	24.505.066.294,00	23.079.649.651,00	94,18
2	RSUD Batara Guru	53.837.408.000,00	66.739.129.044,00	123,96
3	Dinas PUPR	1.000.000.000,00	926.628.000,00	92,66
4	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000,00	141.090.000,00	94,06
5	Dinas Perhubungan	310.000.000,00	276.015.000,00	89,04
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	231.367.350,00	232.479.450,00	100,48
7	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	75.000.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	800.000.000,00	546.101.349,00	68,26
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	169.350.000,00	73.910.000,00	43,64
10	Dinas Pariwisata	25.000.000,00	28.590.000,00	114,36
11	Dinas Pertanian	253.900.000,00	35.900.000,00	14,14



Tabel 5.2

Pendapatan Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2020	%
1	2	3	4	5
12	Dinas Perdagangan	1.630.000.000,00	1.739.253.000,00	106,70
13	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	20.000.000,00	37.900.000,00	189,50
14	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.314.628.084.551,67	1.283.780.780.690,24	97,65
15	Badan Pendapatan Daerah	25.091.537.186,00	26.899.683.209,94	107,21
Jumlah Pendapatan Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah		1.422.726.713.381,67	1.404.537.109.394,18	98,72

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

Target Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp118.757.324.971,00 terealisasi sebesar Rp132.465.563.071,18 atau mencapai 111,54% dari anggaran yang telah ditetapkan. Komponen PAD ini memberikan kontribusi mencapai 9,43% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.404.537.109.394,18. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri atas komponen penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3

Pendapatan Asli Daerah – LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		2020 (%)	2020 Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	25.000.000.000,00	26.841.950.253,94	107,37	23.594.549.937,60
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	8.629.667.350,00	7.232.109.399,00	83,81	6.694.425.568,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	4.835.573.382,00	5.310.079.034,00	109,81	5.220.161.952,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	80.292.084.239,00	93.081.424.384,24	115,93	87.651.678.488,49
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		118.757.324.971,00	132.465.563.071,18	111,54	123.160.815.946,09

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*. *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* diterapkan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah. Sedangkan *Official Assesment* Sistem Pemungutan Pajak yang



memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk. *Official Assesment* meliputi Pajak Reklame, Pajak BPHTB, serta Pajak Bumi Dan Bangunan.

Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah penerimaan asli daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Luwu dari Wajib Pajak dalam Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp26.841.950.253,94 atau 107,37% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 serta mengalami kenaikan sejumlah Rp3.247.400.316,3 dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020 sebesar Rp23.594.549.937,60. Komponen PAD ini memberikan kontribusi sebesar 1,91% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.404.537.109.394,18 dengan rincian pajak daerah sebagai berikut :

Tabel 5.4
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		%	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	105.000.000,00	132.307.251,00	126,01	59.620.804,00
2	Pajak Restoran	1.537.914.670,00	1.872.197.396,00	121,74	1.619.764.217,00
3	Pajak Hiburan	20.000.000,00	7.400.000,00	37,00	9.685.000,00
4	Pajak Reklame	500.000.000,00	687.167.259,00	137,43	586.412.675,00
5	Pajak Penerangan Jalan	11.047.085.330,00	11.260.065.446,00	101,93	10.686.182.683,00
6	Pajak air tanah	15.000.000,00	15.406.996,44	102,71	14.467.280,10
7	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	3.000.000,00	30,00	3.950.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	3.000.000.000,00	2.751.373.174,00	91,71	2.677.206.410,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.765.000.000,00	7.408.907.803,00	109,52	6.084.244.037,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000.000,00	2.704.124.928,50	135,21	1.853.016.831,50
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LRA		25.000.000.000,00	26.841.950.253,94	107,37	23.594.549.937,60

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA dalam Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp7.232.109.399,00 atau 83,81% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp8.629.667.350,00 serta mengalami kenaikan sejumlah Rp537.683.831,00 dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2020 sebesar Rp6.694.425.568,00. Komponen PAD ini memberikan kontribusi sebesar 0,51% dari total penerimaan



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.404.537.109.394,18 dengan rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LRA sebagai berikut

Tabel 5.5
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		%	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Jasa Umum	6.111.367.350,00	5.506.855.050,00	90,11	5.402.825.773,00
	A Retribusi Pelayanan Kesehatan – Kesehatan	3.900.000.000,00	3.138.692.600,00	80,48	3.580.119.023,00
	B Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	141.090.000,00	94,06	136.100.000,00
	C Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	200.000.000,00	255.340.000,00	127,67	118.895.000,00
	D Retribusi Pelayanan Pasar	1.600.000.000,00	1.706.737.000,00	106,67	1.279.417.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	600.000.000,00	838.532.000,00	139,76	613.252.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar-Lods	400.000.000,00	246.310.000,00	61,58	135.955.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	600.000.000,00	621.895.000,00	103,65	530.210.000,00
	E Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30.000.000,00	32.516.000,00	108,39	31.416.000,00
	F Retribusi Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	231.367.350,00	232.479.450,00	100,48	248.958.750,00
	G Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00
	- Retribusi PKB-Mobil Penumpang-Sedan	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.688.950.000,00	1.177.888.000,00	69,74	458.567.000,00
	A Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.235.000.000,00	1.040.078.000,00	84,22	82.560.000,00
	- Retribusi Penyewaan Bangunan	95.000.000,00	37.900.000,00	39,89	32.810.000,00
	- Retribusi Pemakaian Ruangan	90.000.000,00	55.550.000,00	61,72	34.500.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kendaran Bermotor	1.050.000.000,00	946.628.000,00	90,16	15.250.000,00
	B Retribusi Tempat Pelelangan	50.000.000,00	17.060.000,00	34,12	11.378.000,00
	C Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00	19.410.000,00	19,41	10.481.000,00
	D Retribusi Tempat Penginapan/Pasangan/Villa	10.000.000,00	6.090.000,00	60,90	1.590.000,00
	E Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.000.000,00	22.500.000,00	150,00	18.200.000,00
	F Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	278.950.000,00	72.750.000,00	26,08	40.250.000,00
	G Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	294.108.000,00
	- Retribusi Sewa Alat Berat (PUPR)	0,00	0,00	0,00	285.108.000,00
	- Retribusi Sewa Alat Berat (Perikanan)	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	829.350.000,00	547.366.349,00	66,00	833.032.795,00
	A Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	800.000.000,00	546.101.349,00	68,26	829.427.795,00
	C Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum	10.000.000,00	1.265.000,00	12,65	0,00



Tabel 5.5
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		%	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	B Retribusi Izin Usaha Perikanan	19.350.000,00	0,00	0,00	3.605.000,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA		8.629.667.350,00	7.232.109.399,00	83,81	6.694.425.568,00

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA Pemerintah Kabupaten Luwu yang diperoleh dari bagian laba (dividen) atas modal yang ditanamkan dan disertakan pada PT Bank Sulselbar dalam Tahun Anggaran 2021, dianggarkan sejumlah Rp4.835.573.382,00 dan terealisasi 109,81% atau sebesar Rp5.310.079.034,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sejumlah Rp89.917.082,00 dari laba yang diperoleh Tahun 2020 sebesar Rp5.220.161.952,00. Komponen PAD ini memberikan kontribusi sebesar 0,38% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.404.537.109.394,18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		%	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.835.573.382,00	5.310.079.034,00	109,81	5.220.161.952,00
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.835.573.382,00	5.310.079.034,00	109,81	5.220.161.952,00

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Lain-lain PAD yang sah - LRA merupakan penerimaan asli daerah Pemerintah Kabupaten Luwu selain penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Tahun Anggaran 2021, jumlah lain-lain PAD yang sah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu sebesar Rp80.292.084.239,00 dan terealisasi sebesar Rp93.081.424.384,24 atau 115,93% dari target yang telah ditetapkan, serta mengalami kenaikan sejumlah Rp5.429.745.895,75 dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2020 sebesar Rp87.651.678.488,49.

Komponen Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LRA ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 6,63% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.403.537.109.394,18 dengan rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebagai berikut:



Tabel 5.7
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		%	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	31.950.000,00	37.200.000,00	116,43	727.635.205,00
2	Jasa Giro	2.200.000.000,00	2.412.199.447,00	109,65	2.841.119.444,30
3	Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00	1.928.636.109,62	96,43	3.163.092.564,70
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	580.000.000,00	1.103.901.842,30	190,33	310.356.977,97
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	314.404.167,00	10.604.948,00	3,37	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	596.070.329,00	648.845.986,32	108,85	124.853.334,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.537.186,00	2.182.956,00	142,01	1.642.809,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	58.214,00	693.835,00	1.191,87	23.799.339,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	125.648.263,00	257.073.165,00	204,60	113.559.937,00
10	Pendapatan BLUD	53.837.408.000,00	66.739.129.044,00	123,96	60.702.258.677,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	20.605.008.080,00	19.940.957.051,00	96,78	19.577.258.950,00
12	Lain-lain PAD yang sah lainnya	0,00	0,00	0,00	66.101.250,52
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah-LRA		80.292.084.239,00	93.081.424.384,24	115,93	87.651.678.488,49

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp37.200.000,00 merupakan hasil penjualan gedung dan bangunan;
- b. Penerimaan Jasa Giro, merupakan pendapatan atas jasa giro pada rekening kas daerah sebesar Rp2.412.199.447,00;
- c. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.103.901.842,30 merupakan setoran atas kerugian daerah berdasarkan LHP BPK-RI Provinsi Sulawesi Selatan, temuan Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten dan Irjen Kementerian.
- d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp648.845.986,32,00 merupakan setoran atas keterlambatan pekerjaan yang melewati perjanjian kontrak kerja;
- e. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp257.073.165,00 merupakan setoran atas kelebihan pembayaran gaji bagi pegawai yang telah pensiun;
- f. Pendapatan denda retribusi sebesar Rp693.835,00 merupakan penerimaan dana denda keterlambatan pembayaran BPJS;
- g. Pendapatan BLUD, merupakan pendapatan jasa layanan umum BLUD RSUD Batara Guru sebesar Rp66.739.129.044,00;
- h. Pendapatan Bunga merupakan pendapatan atas penempatan uang Pemerintah Kabupaten Luwu sebesar Rp1.928.636.109,62;



- i. Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp19.940.957.051,00 merupakan Dana Kapitasi pada FKTP/Puskesmas yang tersebar di 22 Kecamatan Pemerintah Kabupaten Luwu;

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Pada Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Transfer - LRA dianggarkan sebesar Rp1.225.142.728.580,67 terealisasi 98,41% atau sebesar Rp1.205.682.389.554,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 85,84% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.404.537.109.394,18. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Tabel 5.8
Pendapatan Transfer-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		(%)	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	4	5	6	7
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.164.323.319.656,00	1.153.148.608.581,00	99,04	1.162.171.725.375,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah	60.819.408.924,67	52.533.780.973,00	86,38	80.548.981.951,62
Jumlah Pendapatan Transfer-LRA		1.225.142.728.580,67	1.205.682.389.554,00	98,41	1.242.720.707.326,62

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.164.323.319.656,00 terealisasi 99,04% atau sebesar Rp1.153.148.608.581,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 82,10% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.404.537.109.394,18. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-LRA berupa:

Tabel 5.9
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021		(%)	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
I	Dana Perimbangan				
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.161.695.524,00	23.876.627.254,00	157,48	16.117.170.085,00
	A Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.107.642.000,00	7.740.831.003,00	188,45	5.021.880.202,00
	B DBH PPh Pasal 21	5.207.929.000,00	6.992.326.037,00	134,26	7.121.797.135,00
	C DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	227.220.000,00	530.929.925,00	233,66	0,00
	D DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	178.402.000,00	200.365.666,00	112,31	197.430.286,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.9
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021		2020	Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
E	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	12.000,00	200,00	1,67	0,00
F	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	773.496.000,00	1.195.798.368,00	154,60	289.289.456,00
G	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	219.683.850,00	1.030.267.675,00	468,98	0,00
H	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.299.093.000,00	4.790.021.181,00	145,19	2.682.851.416,00
I	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	19.898.674,00	38.468.049,00	193,32	0,00
J	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00	120,32	788.276.289,00
K	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	0,00	0,00	0,00	15.645.301,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	647.227.070.000,00	647.227.070.000,00	100,00	652.082.657.000,00
A	Dana Alokasi Umum	647.227.070.000,00	647.227.070.000,00	100,00	652.082.657.000,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	291.066.834.132,00	271.177.191.327,00	93,17	273.535.661.290,00
A.	DAK Fisik	157.526.405.000,00	152.219.804.523,00	96,63	146.553.441.704,00
a	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	208.847.000,00	205.661.117,00	98,47	50.120.386.779,00
b	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	25.038.014.000,00	24.165.988.939,00	96,52	0,00
c	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	16.975.653.000,00	15.570.210.426,00	91,72	0,00
d	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	482.981.950,00	96,60	9.750.339.000,00
e	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi (Reguler)	0,00	0,00	0,00	551.250.000,00
f	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	10.076.618.000,00	9.731.947.108,00	96,58	37.412.878.656,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.9
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021		2020	Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	g DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.793.894.000,00	2.882.185.045,00	60,12	0,00
	h DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.946.001.000,00	5.679.380.788,00	95,52	0,00
	i DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.149.999.000,00	1.144.550.000,00	99,53	0,00
	j DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-KB	1.549.349.000,00	1.425.928.000,00	92,03	0,00
	k DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	52.250.000,00	50.000.000,00	95,69	0,00
	l DAK Fisik-Bidang Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.210.844.000,00	6.210.844.000,00	100,00	540.000.000,00
	m DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.668.575.000,00	1.647.744.150,00	98,75	1.163.660.000,00
	n DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	31.719.204.000,00	31.674.757.000,00	99,86	39.848.793.000,00
	o DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	13.811.979.000,00	13.801.991.000,00	99,93	0,00
	p DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	9.254.237.000,00	8.997.832.000,00	97,23	590.028.000,00
	q DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	14.322.809.000,00	14.322.809.000,00	100,00	1.302.000.000,00
	r DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	14.248.132.000,00	14.224.994.000,00	99,84	1.242.789.269,00
	s DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	4.031.317.000,00
	B. DAK Non Fisik	133.540.429.132,00	118.957.386.804,00	89,08	126.982.219.586,00



Tabel 5.9
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021		2020	Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
a	DAK Non Fisik-TPG PNSD	82.690.943.000,00	82.690.943.000,00	100,00	76.032.622.000,00
b	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	885.000.000,00	885.000.000,00	100,00	1.005.000.000,00
c	DAK Non Fisik-TKG PNSD	13.192.324.200,00	10.878.263.000,00	82,46	11.346.457.000,00
d	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.607.400.000,00	4.517.400.000,00	98,05	4.337.400.000,00
e	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.805.500.000,00	2.805.500.000,00	100,00	2.873.630.000,00
f	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.350.371.823,00	9.887.520.395,00	53,88	27.124.949.335,00
g	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	505.783.000,00	0,00	0,00	0,00
h	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.355.239.000,00	0,00	0,00	0,00
i	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	2.091.914.000,00	0,00	0,00	0,00
j	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.359.262.509,00	4.596.068.809,00	105,43	2.930.984.751,00
k	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.302.441.600,00	1.302.441.600,00	100,00	1.331.176.500,00
l	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	322.573.000,00	322.573.000,00	100,00	0,00
m	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	286.177.000,00	286.177.000,00	100,00	0,00
n	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	785.500.000,00	785.500.000,00	100,00	0,00
II	Dana Insentif Daerah (DID)	17.862.280.000,00	17.862.280.000,00	100,00	27.430.797.000,00
A	DID	17.862.280.000,00	17.862.280.000,00	100,00	27.430.797.000,00
III	Dana Desa	193.005.440.000,00	193.005.440.000,00	100,00	193.005.440.000,00
A	Dana Desa	193.005.440.000,00	193.005.440.000,00	100,00	193.005.440.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		1.164.323.319.656,00	1.153.148.608.581,00	99,04	1.162.171.725.375,00

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

Pada Tahun Anggaran 2021 Target Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA berupa Pendapatan Bagi Hasil dan bantuan keuangan sebesar Rp60.819.408.924,67 dan terealisasi 86,38% atau sebesar Rp52.533.780.973,00.



Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 3,74% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.404.537.109.394,18. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA berupa :

Tabel 5.10
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		2020 (%)	2020 Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Bagi Hasil	55.602.137.125,67	48.012.052.973,00	86,35	46.735.662.951,62
2	Bantuan Keuangan	5.217.271.799,00	4.521.728.000,00	86,67	33.813.319.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA		60.819.408.924,67	52.533.780.973,00	86,38	80.548.981.951,62

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA

Pada Tahun Anggaran 2021, Target Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp55.602.137.125,67 dan terealisasi 86,35% atau sebesar Rp48.012.052.973,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 3,42% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.404.537.109.394,18. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA berupa:

Tabel 5.11
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil- LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		2020 (%)	2020 Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55.602.137.125,67	48.012.052.973,00	86,35	46.735.662.951,62
	- Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor	10.500.000.000,00	8.778.651.606,00	83,61	29.012.328.779,00
	- Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor	10.750.000.000,00	7.517.729.126,00	69,93	0,00
	- Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor	15.300.000.000,00	13.114.214.330,00	85,71	0,00
	- Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan	300.000.000,00	281.418.362,00	93,81	0,00
	- Pendapatan bagi hasil pajak rokok	18.752.137.125,67	18.320.039.549,00	97,70	17.723.334.172,62
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil-LRA		55.602.137.125,67	48.012.052.973,00	86,35	46.735.662.951,62

2. Bantuan Keuangan-LRA

Pada Tahun Anggaran 2021 Target Bantuan Keuangan-LRA dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp5.217.271.799,00 dan terealisasi 86,67% atau sebesar Rp4.521.728.000,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 0,32% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp1.404.537.109.394,18. Realisasi Bantuan Keuangan-LRA berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Bantuan Keuangan – LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		2020	
		Anggaran	Realisasi		(%)
1	2	3	4	5	6
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.217.271.799,00	4.521.728.000,00	86,67	33.813.319.000,00
	- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.217.271.799,00	4.521.728.000,00	86,67	33.813.319.000,00
	Bantuan Keuangan-LRA	5.217.271.799,00	4.521.728.000,00	86,67	33.813.319.000,00

Rincian realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp4.521.728.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.13
Bantuan Keuangan-LRA

(dalam Rupiah)

No	Tanggal Transfer	Uraian	Jumlah	Nomor SK
1	2	3	4	5
1	29 Oktober 2021	Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminana Sosial Peserta Biaya iuran lokal pelayanan kesehatan gratis perkabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I	967.932.000,00	2141/X/Tahun 2021
2	29 Oktober 2021	Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminana Sosial Peserta Biaya iuran lokal pelayanan kesehatan gratis perkabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II	967.932.000,00	2142/X/Tahun 2021
3	20 Desember 2021	Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminana Sosial peserta biaya iuran lokal pelayanan kesehatan kgratis perkabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III	967.932.000,00	2345/XI/Tahun 2021
4	31 Desember 2021	Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminana Sosial peserta biaya iuran lokal pelayanan kesehatan gratis perkabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III	967.932.000,00	2695/XII/Tahun 2021
	13 Desember 2021	Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penanganan masyarakat yang terdampak bencana dan banjir di Kabupaten Luwu	500.000.000,00	2106/IX/Tahun 2021
5	17 November 2021	Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung program strategis nasional berupa program pencegahan stunting gizi buruk di Kabupaten Luwu	150.000.000,00	1586/VII/Tahun 2021
		Total	4.521.728.000,00	

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pada Tahun Anggaran 2021 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dianggarkan sebesar Rp78.826.659.830,00 dan terealisasi 84,22% atau sebesar Rp66.389.156.769,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar



4,73% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.404.537.109.394,18. Realisasi tersebut terdiri dari pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.14
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		%	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah	13.364.244.040,00	11.297.246.769,00	84,53	29.038.754.580,00
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	65.462.415.790,00	55.091.910.000,00	84,16	57.044.450.000,00
	Pendapatan Hibah	78.826.659.830,00	66.389.156.769,00	84,22	86.083.204.580,00

Saldo Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp11.297.246.769,00 terdiri dari:

1. Hibah Dana READSI (Pertanian) Tahap I Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp259.527.347,00;
2. Hibah Dana READSI (Pertanian) Tahap II Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.591.881.126,00
3. Hibah Air Minum Perdesaan (AMD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp874.000.000,00
4. Hibah Dana READSI (Pertanian) Tahap III Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.254.838.296,00
5. Hibah Air Minum Perkotaan (AMK) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.317.000.000,00;

Saldo Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp55.091.910.000,00 terdiri atas:

1. Penerimaan Hibah Dana BOS reguler sebesar Rp53.531.910.000,00; dan
2. Penerimaan Hibah Dana BOS Afirmasi dan Kinerja sebesar Rp1.560.000.000,00.

Adapun rincian Penerimaan Hibah Dana BOS pada masing-masing sekolah di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 1.c dan lampiran 1.d**.

5.1.2 BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2021 anggaran belanja dialokasikan sebesar Rp1.486.615.370.652,67 dan terealisasi sebesar Rp1.403.953.088.257,09 atau mencapai 94,44% dari anggaran. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp15.088.618.631,21 dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.419.041.706.888,30. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.15
Rincian Belanja

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		(%)	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	958.329.340.705,67	893.420.451.269,00	93,23	861.759.627.266,30
2	Belanja Modal	263.560.156.664,00	247.060.309.711,09	93,73	286.351.885.895,00
3	Belanja Tidak Terduga	2.107.454.429,00	1.421.335.930,00	67,44	7.774.407.311,00
4	Belanja Transfer	262.618.418.854,00	262.050.991.347,00	99,78	263.155.786.416,00
Jumlah Belanja		1.486.615.370.652,67	1.403.953.088.257,09	94,44	1.419.041.706.888,30

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp958.329.340.705,67 dan terealisasi sebesar Rp893.420.451.269,00 atau mencapai 93,23% dari anggaran. Realisasi belanja operasi tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 5.16
Rincian Belanja Operasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021		(%)	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	565.433.966.121,00	552.095.552.930,00	97,64	501.489.422.514,00
2	Belanja Barang dan Jasa	378.183.844.680,67	327.489.336.935,00	86,60	315.280.744.276,30
3	Belanja Hibah	14.107.029.904,00	13.273.561.404,00	94,09	44.001.424.476,00
4	Belanja Bantuan Sosial	604.500.000,00	562.000.000,00	92,97	988.036.000,00
Jumlah		958.329.340.705,67	893.420.451.269,00	93,23	861.768.299.266,30

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Perangkat Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.17
Belanja Operasi Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	347.406.964.034,00	337.674.010.893,00	97,20	313.113.573.282,00
2	Dinas Kesehatan	155.717.125.906,00	138.144.331.528,00	88,71	129.403.036.065,13
3	RSUD Batara Guru	92.933.909.988,00	71.734.955.100,00	77,19	69.915.208.289,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.728.194.653,00	28.934.804.743,00	97,33	32.552.206.259,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.758.550.092,00	23.628.000.867,00	99,45	19.617.350.739,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.585.729.159,00	5.472.043.603,00	97,96	5.758.857.648,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.326.240.401,00	5.157.792.206,00	96,84	5.670.571.808,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.17
Belanja Operasi Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.946.752.976,00	2.866.489.142,00	97,28	3.774.772.861,00
9	Dinas Sosial	4.637.907.778,96	4.475.409.270,00	96,50	3.526.107.621,00
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5.056.496.041,00	4.890.835.460,00	96,72	5.391.509.865,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.423.860.455,00	3.310.942.353,00	96,70	2.610.862.704,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	5.047.045.931,00	4.928.645.719,00	97,65	2.676.506.623,00
13	Dinas Pertanahan	2.543.389.043,00	2.470.355.125,00	97,13	2.422.509.405,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	5.055.135.624,00	4.829.662.671,00	95,54	5.252.466.467,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.160.343.640,00	4.858.428.126,00	94,15	5.072.333.915,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.708.063.012,00	7.541.663.869,00	97,84	6.477.629.600,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.426.861.870,00	6.112.950.233,00	72,54	4.544.038.343,00
18	Dinas Perhubungan	6.438.983.482,00	6.246.441.247,00	97,01	4.002.448.452,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.435.970.510,00	5.291.756.945,00	97,35	5.013.919.678,00
20	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	3.255.928.699,00	3.069.956.441,00	94,29	3.110.367.389,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.974.613.979,00	3.829.581.592,00	96,35	3.353.076.184,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.587.328.899,00	5.346.589.878,00	95,69	3.233.310.617,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.051.209.952,00	3.780.246.693,00	93,31	3.437.984.363,00
24	Dinas Perikanan	6.864.682.783,00	6.771.675.886,00	98,65	5.792.029.956,17
25	Dinas Pariwisata	3.576.830.886,00	3.433.279.833,00	95,99	2.939.023.130,00
26	Dinas Pertanian	30.481.713.607,00	29.395.888.013,00	96,44	18.035.361.708,00
27	Dinas Perdagangan	5.353.625.611,00	5.198.717.834,00	97,11	8.535.564.115,00
28	Sekretariat Daerah	27.547.528.122,00	26.806.094.537,00	97,31	28.689.462.362,00
29	Inspektorat Daerah	7.873.985.551,00	7.300.856.396,00	92,72	7.525.452.090,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	6.935.425.519,75	6.772.602.506,00	97,65	7.017.630.209,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.144.097.799,00	8.810.992.126,00	96,36	40.725.872.753,00
32	Badan Pendapatan Daerah	13.367.527.876,00	12.921.728.445,00	96,67	12.583.655.069,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.056.985.859,00	18.404.378.152,00	96,58	6.871.126.475,00
34	Sekretariat DPRD	31.667.622.746,00	30.237.215.705,00	95,48	28.210.659.979,00
35	Kecamatan Bajo	2.734.804.670,00	2.492.009.192,00	91,12	2.811.911.084,00
36	Kecamatan Bajo Barat	1.324.317.332,00	1.217.282.693,00	91,92	1.419.735.250,00
37	Kecamatan Basse Sangtempe	1.743.386.631,00	1.611.242.924,00	92,42	1.764.620.832,00



Tabel 5.17

Belanja Operasi Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
38	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	1.367.989.006,96	1.263.607.256,00	92,37	1.374.494.701,00
39	Kecamatan Belopa	4.685.269.995,00	4.225.946.696,00	90,20	4.607.723.604,00
40	Kecamatan Belopa Utara	3.228.106.632,00	2.998.646.219,00	92,89	3.172.414.933,00
41	Kecamatan Bupon	2.056.508.303,00	1.842.611.552,00	89,60	1.984.451.081,00
42	Kecamatan Kamanre	1.891.994.585,00	1.688.329.008,00	89,24	2.068.690.599,00
43	Kecamatan Lamasi	2.770.852.595,00	2.536.119.351,00	91,53	2.699.311.876,00
44	Kecamatan Lamasi Timur	1.429.977.849,00	1.326.953.814,00	92,80	1.402.898.822,00
45	Kecamatan Larompong	2.600.329.810,00	2.339.900.443,00	89,98	2.372.817.945,00
46	Kecamatan Larompong Selatan	2.327.562.281,00	2.165.574.652,00	93,04	2.266.397.435,00
47	Kecamatan Latimojong	1.283.590.152,00	1.145.272.238,00	89,22	1.152.986.291,00
48	Kecamatan Ponrang	3.969.566.580,00	3.716.934.358,00	93,64	3.717.018.431,00
49	Kecamatan Ponrang Selatan	2.709.024.147,00	2.468.752.636,00	91,13	2.735.992.292,00
50	Kecamatan Suli	1.906.497.659,00	1.696.386.272,00	88,98	1.901.671.593,00
51	Kecamatan Suli Barat	1.633.948.664,00	1.419.925.596,00	86,90	1.591.894.086,00
52	Kecamatan Walenrang	3.100.252.617,00	2.914.212.988,00	94,00	3.032.093.865,00
53	Kecamatan Walenrang Barat	1.504.635.036,00	1.417.028.180,00	94,18	1.336.238.649,00
54	Kecamatan Walenrang Timur	1.872.416.379,00	1.699.866.217,00	90,78	1.705.813.987,00
55	Kecamatan Walenrang Utara	2.840.961.786,00	2.617.423.077,00	92,13	2.845.523.611,00
56	Kecamatan Bua	4.113.310.647,00	3.921.370.989,00	95,33	3.802.508.912,00
57	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	4.157.404.864,00	4.045.731.781,00	97,31	3.135.931.364,00
Jumlah Belanja Operasi Berdasarkan Perangkat Daerah		958.329.340.705,67	893.420.451.269,00	93,23	861.759.627.266,30

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp565.433.966.121,00 dan direalisasikan sebesar Rp552.095.552.930,00 atau mencapai 97,64%. Rincian belanja pegawai berdasarkan jenis belanja terdiri atas:

Tabel 5.18
Rincian Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		(%)	2020 Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	393.881.576.474,00	390.615.561.808,00	99,17	386.698.817.248,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	27.561.936.088,00	24.103.813.739,00	87,45	29.097.612.688,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	129.074.298.163,00	122.824.103.998,00	95,16	450.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.18
Rincian Belanja Pegawai
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		(%)	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.163.147.178,00	12.948.402.232,00	98,37	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	533.928.218,00	469.131.153,00	87,86	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	661.680.000,00	651.600.000,00	98,48	0,00
7	Belanja Pegawai BLUD	557.400.000,00	482.940.000,00	86,64	0,00
8	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	301.607.499,00
9	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	176.854.199,00
10	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	1.331.739.000,00
11	Belanja Tunjangan Profesi	0,00	0,00	0,00	72.454.211.980,00
12	Belanja Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	0,00	10.978.579.900,00
Jumlah Belanja Pegawai		565.433.966.121,00	552.095.552.930,00	97,64	501.489.422.514,00

Rincian belanja pegawai per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.19
Pemerintah Kabupaten Luwu
Belanja Pegawai Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021
(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	289.841.573.036,00	283.368.480.395,00	97,77	261.497.456.806,00
2	Dinas Kesehatan	74.276.370.949,00	73.014.498.802,00	98,30	51.656.011.500,00
3	RSUD Batara Guru	20.799.105.910,00	20.577.609.414,00	98,94	18.423.921.448,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.779.262.592,00	8.546.843.746,00	97,35	8.491.736.643,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.893.672.808,00	2.812.787.626,00	97,20	2.348.328.255,00
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	2.104.944.220,00	2.034.636.990,00	96,66	1.939.217.711,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.890.315.233,00	2.879.023.846,00	99,61	2.665.535.568,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.077.824.078,00	2.001.475.328,00	96,33	1.791.911.153,00
9	Dinas Sosial	2.674.028.304,00	2.630.525.210,00	98,37	2.342.366.330,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.565.371.922,00	1.509.738.609,00	96,45	1.349.914.160,00
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	4.085.001.741,00	3.957.762.156,00	96,89	4.128.530.592,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.116.033.563,00	2.051.856.283,00	96,97	1.849.906.403,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	2.441.928.095,00	2.342.299.532,00	95,92	1.844.395.302,00
14	Dinas Pertanahan	1.592.831.908,00	1.530.665.864,00	96,10	1.375.713.894,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	2.084.188.467,00	2.012.296.934,00	96,55	1.914.400.447,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.859.447.719,00	2.792.890.378,00	97,67	2.490.979.886,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.982.400.568,00	2.903.747.259,00	97,36	2.694.788.968,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.19

Pemerintah Kabupaten Luwu
 Belanja Pegawai Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.874.431.175,00	1.782.072.442,00	95,07	1.504.932.509,00
19	Dinas Perhubungan	3.117.621.553,00	3.040.906.913,00	97,54	2.686.872.339,00
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.775.934.849,00	2.645.718.456,00	95,31	2.321.358.235,00
21	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	1.976.257.119,00	1.865.262.889,00	94,38	1.826.364.125,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.518.221.641,00	2.399.951.592,00	95,30	2.375.102.082,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.465.021.999,00	2.385.243.290,00	96,76	2.055.674.025,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.997.711.202,00	2.836.076.208,00	94,61	2.736.538.328,00
25	Dinas Perikanan	3.503.182.534,00	3.441.776.432,00	98,25	3.072.977.136,00
26	Dinas Pariwisata	2.340.698.925,00	2.263.528.773,00	96,70	2.094.152.765,00
27	Dinas Pertanian	14.549.365.437,00	14.217.494.089,00	97,72	13.539.167.262,00
28	Dinas Perdagangan	4.170.764.657,00	4.039.147.254,00	96,84	3.647.137.405,00
29	DPRD Kab. Luwu	0,00	0,00	0,00	12.688.771.722,00
30	KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	592.362.012,00
31	Sekretariat Daerah	8.578.087.008,00	8.322.791.719,00	97,02	8.359.633.718,00
32	Sekretariat DPRD	16.989.219.266,00	16.675.091.817,00	98,15	3.430.526.587,00
33	Kecamatan Bua	3.467.305.248,00	3.423.735.925,00	98,74	2.979.932.799,00
34	Kecamatan Basse Sangtempe	1.381.258.120,00	1.340.229.949,00	97,03	1.352.911.418,00
35	Kecamatan Walenrang Timur	1.494.522.429,00	1.416.995.286,00	94,81	1.302.093.913,00
36	Kecamatan Lamasi Timur	1.126.008.014,00	1.089.933.040,00	96,80	1.044.998.822,00
37	Kecamatan Ponrang Selatan	2.063.019.457,00	1.995.261.636,00	96,72	1.765.958.872,00
38	Kecamatan Bupon	1.396.406.069,00	1.314.707.332,00	94,15	1.273.467.530,00
39	Kecamatan Walenrang Barat	1.171.693.931,00	1.138.087.075,00	97,13	999.263.649,00
40	Kecamatan Walenrang Utara	2.243.404.351,00	2.166.863.414,00	96,59	2.131.953.861,00
41	Kecamatan Lamasi	2.020.323.115,00	1.927.386.977,00	95,40	1.786.564.307,00
42	Kecamatan Kamanre	1.339.826.025,00	1.264.815.857,00	94,40	1.297.066.743,00
43	Kecamatan Bajo Barat	999.253.766,00	958.064.523,00	95,88	1.056.435.250,00
44	Kecamatan Belopa	3.267.402.265,00	3.141.177.696,00	96,14	2.821.949.604,00
45	Kecamatan Larompong Selatan	1.719.040.791,00	1.628.555.230,00	94,74	1.431.148.304,00
46	Kecamatan Larompong	1.898.880.390,00	1.845.331.639,00	97,18	1.623.099.645,00
47	Kecamatan Suli	1.272.884.475,00	1.210.690.907,00	95,11	1.160.173.093,00
48	Kecamatan Suli Barat	990.787.612,00	893.847.596,00	90,22	934.801.086,00
49	Kecamatan Belopa Utara	2.395.799.876,00	2.326.387.514,00	97,10	2.133.625.076,00
50	Kecamatan Bajo	2.144.243.721,00	2.059.412.656,00	96,04	2.007.554.984,00



Tabel 5.19

Pemerintah Kabupaten Luwu
 Belanja Pegawai Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
51	Kecamatan Latimojong	970.758.003,00	923.014.091,00	95,08	822.777.291,00
52	Kecamatan Ponrang	3.008.097.042,00	2.945.572.404,00	97,92	2.635.121.609,00
53	Kecamatan Walenrang	2.483.567.120,00	2.418.327.491,00	97,37	2.266.536.545,00
54	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	1.105.718.593,00	1.058.570.256,00	95,74	1.061.233.826,00
55	Inspektorat Daerah	4.239.791.702,00	4.077.082.604,00	96,16	3.447.355.061,00
56	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	3.214.115.980,00	3.119.208.621,00	97,05	2.782.229.065,00
57	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	4.460.672.294,00	4.293.903.762,00	96,26	18.813.253.448,00
58	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Badan Pendapatan Daerah	6.249.015.295,00	6.124.781.683,00	98,01	6.153.363.384,00
60	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.389.351.959,00	13.111.407.520,00	97,92	2.667.868.013,00
Jumlah Belanja Operasi Berdasarkan Perangkat Daerah		565.433.966.121,00	552.095.552.930,00	97,64	501.489.422.514,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp378.183.844.680,67 dan terealisasi sebesar Rp327.489.336.935,00 atau 86,60%.

Dalam Saldo Belanja Barang dan Jasa terdapat Belanja Transaksi Non RKUD yaitu Belanja Dana BOS yang dianggarkan sebesar Rp47.986.366.411,00 dan terealisasi sebesar Rp45.285.026.740,00 atau sebesar 94,37%; Belanja BLUD yang dianggarkan sebesar Rp70.531.982.069,00 dan terealisasi sebesar Rp49.802.203.431,00 atau sebesar 70,61%; anggaran JKN sebesar Rp20.884.773.066,00 dan terealisasi sebesar Rp4.215.876.702,00 dengan rincian pada **Lampiran 1a – 1d**.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat dapat dilihat pada **Lampiran 1e**.

Tabel 5.20

Rincian Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		(%)	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Barang	85.549.373.459,75	78.255.779.541,00	91,47	0,00
2	Belanja Jasa	130.012.311.496,96	113.056.320.679,00	86,96	0,00
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	6.926.552.152,00
4	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	10.743.613.325,13
5	Belanja Pemeliharaan	10.037.359.433,00	9.756.589.112,00	97,20	15.976.567.485,17



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.20
Rincian Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		(%)	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
6	Belanja Perjalanan Dinas	33.418.451.810,96	30.685.467.432,00	91,82	29.334.613.525,00
7	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	648.000.000,00	647.950.000,00	99,99	4.210.120.000,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOS	47.986.366.411,00	45.285.026.740,00	94,37	0,00
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.531.982.069,00	49.802.203.431,00	70,61	50.529.673.100,00
10	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	73.487.549.297,00
11	Belanja Premi Asuransi	0,00	0,00	0,00	25.808.753.557,00
12	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	4.758.773.702,00
13	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	3.982.845.031,00
14	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/parkir	0,00	0,00	0,00	389.936.400,00
15	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00
16	Belanja Sewa Alat berat	0,00	0,00	0,00	149.750.000,00
17	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	973.910.000,00
18	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	11.155.765.639,00
19	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	959.412.500,00
20	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	544.952.500,00
21	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	179.343.000,00
22	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00	5.861.579.600,00
23	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
24	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	0,00	1.193.010.300,00
25	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	7.439.559.500,00
26	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00	14.350.777.900,00
27	Belanja Barang Dana BOS	0,00	0,00	0,00	27.814.894.214,00
28	Belanja Transportasi	0,00	0,00	0,00	12.032.330.500,00
29	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0,00	0,00	0,00	56.300.000,00
30	Belanja Operasional Sekolah	0,00	0,00	0,00	2.907.200.000,00
31	Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	1.393.451.049,00
32	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	2.085.210.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		378.183.844.680,67	327.489.336.935,00	86,60	315.280.744.276,30

Rincian belanja barang dan jasa per SKPD sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.21
Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)					
No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.972.190.998,00	47.088.830.498,00	94,23	48.610.220.477,00
2	Dinas Kesehatan	81.240.754.957,00	64.929.832.726,00	79,92	77.747.024.565,13
3	RSUD Bataara Guru	72.134.804.078,00	51.157.345.686,00	70,92	51.491.286.841,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.948.932.061,00	20.387.960.997,00	97,32	12.252.007.016,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.864.877.284,00	20.815.213.241,00	99,76	8.038.435.984,00
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	881.840.740,00	840.474.887,00	95,31	1.196.713.653,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.695.413.926,00	2.593.019.757,00	96,20	3.093.322.080,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.248.416.323,00	3.156.316.878,00	97,16	3.878.660.655,00
9	Dinas Sosial	1.309.379.474,96	1.282.884.060,00	97,98	1.183.741.291,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.381.381.054,00	1.356.750.533,00	98,22	2.424.858.701,00
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	971.494.300,00	933.073.304,00	96,05	1.262.979.273,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.307.826.892,00	1.259.086.070,00	96,27	760.956.301,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	2.605.117.836,00	2.586.346.187,00	99,28	832.111.321,00
14	Dinas Pertanahan	950.557.135,00	939.689.261,00	98,86	1.046.795.511,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	2.970.947.157,00	2.817.365.737,00	94,83	3.338.066.020,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.300.895.921,00	2.065.537.748,00	89,77	2.581.354.029,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.725.662.444,00	4.637.916.610,00	98,14	3.782.840.632,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.552.430.695,00	4.330.877.791,00	66,10	3.039.105.834,00
19	Dinas Perhubungan	3.321.361.929,00	3.205.534.334,00	96,51	1.315.576.113,00
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.660.035.661,00	2.646.038.489,00	99,47	2.692.561.443,00
21	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	1.279.671.580,00	1.204.693.552,00	94,14	1.284.003.264,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.456.392.338,00	1.429.630.000,00	98,16	977.974.102,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.908.556.900,00	1.773.846.588,00	92,94	1.177.636.592,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.053.498.750,00	944.170.485,00	89,62	701.446.035,00
25	Dinas Perikanan	3.361.500.249,00	3.329.899.454,00	99,06	1.522.564.920,17
26	Dinas Pariwisata	1.236.131.961,00	1.169.751.060,00	94,63	844.870.365,00
27	Dinas Pertanian	13.200.388.170,00	12.675.652.424,00	96,02	2.774.672.223,00
28	Dinas Perdagangan	1.182.860.954,00	1.159.570.580,00	98,03	4.888.426.710,00
29	DPRD Kab. Luwu	0,00	0,00	0,00	0,00
30	KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sekretariat Daerah	17.821.941.114,00	17.487.302.818,00	98,12	19.646.766.632,00
32	Sekretariat DPRD	14.678.403.480,00	13.562.123.888,00	92,40	12.091.361.670,00
33	Kecamatan Bua	646.005.399,00	497.635.064,00	77,03	822.576.113,00



Tabel 5.21
Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

					(dalam Rupiah)
No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
34	Kecamatan Basse Sangtempe	362.128.511,00	271.012.975,00	74,84	411.709.414,00
35	Kecamatan Walenrang Timur	377.893.950,00	282.870.931,00	74,85	403.720.074,00
36	Kecamatan Lamasi Timur	303.969.835,00	237.020.774,00	77,98	357.900.000,00
37	Kecamatan Ponrang Selatan	646.004.690,00	473.491.000,00	73,30	970.033.420,00
38	Kecamatan Bupon	660.102.234,00	527.904.220,00	79,97	710.983.551,00
39	Kecamatan Walenrang Barat	332.941.105,00	278.941.105,00	83,78	336.975.000,00
40	Kecamatan Walenrang Utara	597.557.435,00	450.559.663,00	75,40	713.569.750,00
41	Kecamatan Lamasi	750.529.480,00	608.732.374,00	81,11	912.747.569,00
42	Kecamatan Kamanre	552.168.560,00	423.513.151,00	76,70	685.516.856,00
43	Kecamatan Bajo Barat	325.063.566,00	259.218.170,00	79,74	363.300.000,00
44	Kecamatan Belopa	1.417.867.730,00	1.084.769.000,00	76,51	1.735.820.000,00
45	Kecamatan Larompong Selatan	608.521.490,00	537.019.422,00	88,25	835.249.131,00
46	Kecamatan Larompong	701.449.420,00	494.568.804,00	70,51	749.718.300,00
47	Kecamatan Suli	633.613.184,00	485.695.365,00	76,65	741.498.500,00
48	Kecamatan Suli Barat	643.161.052,00	526.078.000,00	81,80	627.243.000,00
49	Kecamatan Belopa Utara	832.306.756,00	672.258.705,00	80,77	919.598.857,00
50	Kecamatan Bajo	590.560.949,00	432.596.536,00	73,25	804.356.100,00
51	Kecamatan Latimojong	312.832.149,00	222.258.147,00	71,05	330.209.000,00
52	Kecamatan Ponrang	961.469.538,00	771.361.954,00	80,23	1.081.896.822,00
53	Kecamatan Walenrang	616.685.497,00	495.885.497,00	80,41	765.557.320,00
54	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	262.270.413,96	205.037.000,00	78,18	313.260.875,00
55	Inspektorat Daerah	3.634.193.849,00	3.223.773.792,00	88,71	4.078.097.029,00
56	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	3.721.309.539,75	3.653.393.885,00	98,17	4.235.401.144,00
57	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	4.683.425.505,00	4.517.088.364,00	96,45	4.261.916.051,00
58	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Badan Pendapatan Daerah	7.118.512.581,00	6.796.946.762,00	95,48	6.430.291.685,00
60	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.667.633.900,00	5.292.970.632,00	93,39	4.203.258.462,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah		378.183.844.680,67	327.489.336.935,00	86,60	315.280.744.276,30

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp14.107.029.904,00 dan terealisasi sebesar Rp13.273.561.404,00 atau 94,09%. Rincian Belanja Hibah dengan perincian per jenis belanja hibah adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.22
Rincian Belanja Hibah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		%	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	50.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	12.786.410.000,00	11.952.941.500,00	93,48	27.338.757.222,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904,00	1.170.619.904,00	100,00	12.273.167.254,00
4	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	0,00	0,00	0,00	4.339.500.000,00
Jumlah		14.107.029.904,00	13.273.561.404,00	94,09	44.001.424.476,00

Rincian Belanja Hibah per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.23
Belanja Hibah Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.593.200.000,00	7.216.700.000,00	95,04	3.005.895.999,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	11.808.462.600,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	9.230.586.500,00
4	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.196.487.900,00
5	Dinas Pertanian	2.731.960.000,00	2.502.741.500,00	91,61	1.721.522.223,00
6	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	90.700.000,00
7	Kecamatan Kamanre	0,00	0,00	0,00	86.107.000,00
8	Kecamatan Belopa	0,00	0,00	0,00	49.954.000,00
9	Kecamatan Suli Barat	0,00	0,00	0,00	29.850.000,00
10	Kecamatan Belopa Utara	0,00	0,00	0,00	119.191.000,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	0,00	0,00	0,00	16.662.667.254,00
12	Sekretariat Daerah	1.147.500.000,00	996.000.000,00	86,80	0,00
13	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.213.750.000,00	1.187.500.000,00	97,84	0,00
15	Bada Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.170.619.904,00	1.170.619.904,00	100,00	0,00
16	Dinas Sosial	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi Berdasarkan Perangkat Daerah		14.107.029.904,00	13.273.561.404,00	94,09	44.001.424.476,00

Belanja hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Luwu kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.



Rincian Anggaran dan Realisasi Penyaluran Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 1f**.

Rincian anggaran dan Realisasi Penyaluran Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki SKT dapat dilihat pada **Lampiran 1g**

Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dapat dilihat pada **Lampiran 1h**.

Rincian anggaran dan Realisasi Hibah Berupa Bantuan Keuangan Partai Politik dapat dilihat pada **Lampiran 1i**.

Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Covid-19 pada Dinas Kesehatan dan beberapa Kecamatan di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada **Lampiran 1m-1n**.

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp604.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp562.000.000,00 atau 92,97%.

Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada individu dapat dilihat pada **Lampiran 1j**.

Tabel 5.24
Rincian Belanja Bantuan Sosial

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		%	2020 Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	604.500.000,00	562.000.000,00	92,97	892.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak direncanakan	0,00	0,00	0,00	96.036.000,00
Jumlah		604.500.000,00	562.000.000,00	92,97	988.036.000,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp263.560.156.664,00 dan terealisasi 93,74% atau sebesar Rp247.060.309.711,09 mengalami penurunan sebesar Rp39.291.576.183,91 dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp286.351.885.895,00. Komponen Belanja ini menyerap dana sebesar 17,60% dari total belanja secara keseluruhan sebesar Rp1.403.953.088.257,09. Realisasi belanja modal tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 5.25
Rincian Belanja Modal

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		(%)	2020 Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	299.537.090,00	71.067.680,00	23,73	228.592.550,00
2	Peralatan dan Mesin	42.746.390.821,00	39.407.536.203,00	92,19	49.722.400.159,00
3	Gedung dan Bangunan	51.534.318.234,00	48.455.261.295,09	94,03	60.253.228.410,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.862.960.281,00	148.769.092.132,00	98,61	142.180.178.739,00
5	Aset Tetap Lainnya	18.116.950.238,00	10.357.352.401,00	57,17	33.967.486.037,00
Jumlah Belanja Modal		263.560.156.664,00	247.060.309.711,09	93,74	286.351.885.895,00

Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Perangkat Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.26
Belanja Modal Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.339.044.533,00	53.278.312.382,09	84,12	70.307.126.956,00
2	Dinas Kesehatan	26.613.824.460,00	25.081.387.331,00	94,24	19.245.753.599,00
3	RSUD Batara Guru	8.213.093.585,00	6.313.652.752,00	76,87	20.558.174.673,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	132.968.339.974,00	131.170.104.858,00	98,65	129.246.752.349,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.512.534.673,00	3.504.477.227,00	99,77	12.286.739.370,00
6	Dinas Sosial	36.000.000,00	35.970.000,00	99,92	10.000.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.798.981.210,00	15.631.195.570,00	98,94	1.051.638.600,00
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	58.323.000,00	53.322.080,00	91,43	155.187.380,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	19.600.000,00	19.600.000,00	100,00	22.200.000,00
13	Dinas Pertanahan	814.537.090,00	71.067.680,00	8,72	260.095.050,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	41.890.000,00	41.650.000,00	99,43	0,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75.373.500,00	75.373.500,00	100,00	13.800.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	39.500.000,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.556.936.435,00	1.433.401.000,00	92,07	1.554.336.000,00
18	Dinas Perhubungan	941.572.740,00	924.772.400,00	98,22	5.000.000,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	137.630.900,00	132.598.150,00	96,34	34.575.260,00
20	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	285.690.500,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	845.436.500,00	841.643.500,00	99,55	563.846.000,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	473.750.000,00	441.869.450,00	93,27	0,00
24	Dinas Perikanan	556.810.000,00	553.172.764,00	99,35	346.225.400,00
25	Dinas Pariwisata	328.750.000,00	322.099.300,00	97,98	584.140.600,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.26

Belanja Modal Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
26	Dinas Pertanian	108.293.250,00	106.983.250,00	98,79	328.342.086,00
27	Dinas Perdagangan	1.858.896.015,00	1.846.878.300,00	99,35	330.166.500,00
28	Sekretariat Daerah	1.029.650.000,00	1.011.483.000,00	98,24	12.993.904.995,00
29	Inspektorat Daerah	88.990.910,00	88.754.547,00	99,73	1.227.003.977,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	155.631.275,00	147.920.000,00	95,05	595.016.000,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	279.092.798,00	276.550.000,00	99,09	187.628.700,00
32	Badan Pendapatan Daerah	40.000.000,00	39.866.000,00	99,67	246.439.380,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81.500.000,00	75.130.500,00	92,18	190.577.330,00
34	Sekretariat DPRD	436.599.000,00	432.434.000,00	99,05	1.690.375.000,00
35	Kecamatan Bajo	152.000.000,00	149.364.000,00	98,27	493.062.390,00
36	Kecamatan Bajo Barat	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
37	Kecamatan Basse Sangtempe	72.645.609,00	69.460.000,00	95,61	25.980.000,00
38	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	12.710.000,00	12.710.000,00	100,00	49.030.000,00
39	Kecamatan Belopa	555.000.000,00	549.824.600,00	99,07	2.306.505.500,00
40	Kecamatan Belopa Utara	491.120.032,00	484.323.600,00	98,62	1.284.661.000,00
41	Kecamatan Bupon	156.612.436,00	156.021.770,00	99,62	667.157.000,00
42	Kecamatan Kamanre	130.188.434,00	124.619.000,00	95,72	464.074.000,00
43	Kecamatan Lamasi	176.000.000,00	175.749.000,00	99,86	743.823.000,00
44	Kecamatan Lamasi Timur	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	13.000.000,00
45	Kecamatan Larompong	193.527.800,00	192.087.500,00	99,26	664.736.650,00
46	Kecamatan Larompong Selatan	150.000.000,00	148.579.050,00	99,05	491.813.000,00
47	Kecamatan Latimojong	0,00	0,00	0,00	57.520.200,00
48	Kecamatan Ponrang	254.271.290,00	252.705.290,00	99,38	1.223.796.000,00
49	Kecamatan Ponrang Selatan	150.000.881,00	148.967.000,00	99,31	416.292.000,00
50	Kecamatan Suli	132.607.415,00	131.782.000,00	99,38	483.964.000,00
51	Kecamatan Suli Barat	136.550.000,00	135.554.000,00	99,27	653.491.000,00
52	Kecamatan Walenrang	162.063.583,00	161.231.260,00	99,49	643.174.450,00
53	Kecamatan Walenrang Barat	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
54	Kecamatan Walenrang Timur	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	16.550.000,00
55	Kecamatan Walenrang Utara	128.277.336,00	128.162.100,00	99,91	639.740.000,00
56	Kecamatan Bua	27.000.000,00	19.000.000,00	70,37	623.108.000,00
57	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Berdasarkan Perangkat Daerah		263.560.156.664,00	247.060.309.711,09	93,74	286.343.213.895,00



5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp299.537.090,00 dan terealisasi sebesar Rp71.067.680,00 atau mencapai 23,73% dari anggaran. Realisasi Belanja Tanah ini mengalami penurunan sebesar Rp157.524.870,00 atau 31,09% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp228.592.550,00. Realisasi belanja modal Tanah tersebut merupakan pengadaan tanah untuk Bangunan Gedung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Belanja Modal Tanah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		2020	Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung	299.537.090,00	71.067.680,00	23,73	228.592.550,00
	- Tanah untuk Bangunan Air	299.537.090,00	71.067.680,00	0,00	0,00
	-Tanah Untuk Kebun Campuran	0,00	0,00	0,00	9.937.500,00
	- Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	218.655.050,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah	299.537.090,00	71.067.680,00	23,73	228.592.550,00

Belanja Modal Tanah berdasarkan perangkat daerah Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.28
Belanja Modal Tanah Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	9.937.500,00
2	Dinas Pertanahan	299.537.090,00	71.067.680,00	23,73	218.655.050,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah Berdasarkan Perangkat Daerah	299.537.090,00	71.067.680,00	23,73	228.592.550,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp42.746.390.821,00 dan terealisasi sebesar Rp39.407.536.203,00 atau mencapai 92,19% dari anggaran. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin ini mengalami penurunan sebesar Rp10.314.863.956,00 atau 79,26% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp49.722.400.159,00 dengan rincian :



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.29
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		2020	Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Bantu	249.800.000,00	248.800.000,00	99,60	1.655.776.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan	7.386.161.120,00	5.841.622.300,00	79,09	3.528.879.000,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	8.915.516.440,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	734.279.500,00	702.052.000,00	95,61	503.970.280,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.520.160.690,00	19.327.069.296,00	99,01	10.548.718.643,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit	1.326.964.000,00	1.284.893.150,00	96,83	2.830.972.959,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	189.082.500,00	187.998.500,00	99,43	622.371.372,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	129.686.800,00	121.101.800,00	93,38	477.065.186,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	6.630.900,00	6.500.000,00	98,03	53.739.500,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	9.300.000,00	9.300.000,00	100,00	2.100.000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.840.674.885,00	3.154.865.945,00	82,14	6.580.000,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	4.663.616.426,00	4.174.312.390,00	89,51	19.679.843.779,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit - Unit Laboratorium	500.000.000,00	495.550.000,00	99,11	28.960.000,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	15.000.000,00	0,00	0,00	770.833.000,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer	814.395.300,00	712.775.250,00	87,52	0,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengeboran Mesin	20.160.000,00	19.919.000,00	98,80	0,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00



Tabel 5.29
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		2020	Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	132.150.000,00	132.106.150,00	99,97	88.674.000,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	624.400.000,00	614.342.400,00	98,39	0,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Olahraga	25.000.000,00	24.950.000,00	99,80	0,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD	2.533.928.700,00	2.324.378.022,00	91,73	0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		42.746.390.821,00	39.407.536.203,00	92,19	49.722.400.159,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan perangkat daerah Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021
 (dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.136.531.900,00	18.008.148.696,00	99,29	12.421.977.840,00
2	Dinas Kesehatan	11.986.585.426,00	10.872.873.190,00	90,71	11.521.336.781,00
3	RSUD Batara Guru	7.383.093.585,00	5.487.733.967,00	74,33	13.327.296.225,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	165.000.000,00	157.680.000,00	95,56	0,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	182.500.000,00	181.476.000,00	99,44	377.398.800,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	36.000.000,00	35.970.000,00	99,92	10.000.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.800.000,00	49.800.000,00	100,00	0,00
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	155.187.380,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	19.600.000,00	19.600.000,00	100,00	22.200.000,00
13	Dinas Pertanahan	0,00	0,00	0,00	41.440.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	41.890.000,00	41.650.000,00	99,43	0,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75.373.500,00	75.373.500,00	100,00	13.800.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	39.500.000,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	749.437.000,00	670.599.000,00	89,48	1.554.336.000,00
18	Dinas Perhubungan	941.572.740,00	924.772.400,00	98,22	5.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	119.630.900,00	115.598.150,00	96,63	34.575.260,00
20	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	187.924.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	35.500.000,00	35.400.000,00	99,72	42.200.000,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	473.750.000,00	441.869.450,00	93,27	0,00
24	Dinas Perikanan	20.160.000,00	19.919.000,00	98,80	0,00
25	Dinas Pariwisata	28.750.000,00	23.400.000,00	81,39	29.000.000,00
26	Dinas Pertanian	108.293.250,00	106.983.250,00	98,79	328.342.086,00
27	Dinas Perdagangan	84.600.000,00	84.600.000,00	100,00	20.500.000,00
28	Sekretariat Daerah	1.029.650.000,00	1.011.483.000,00	98,24	6.175.518.060,00
29	Inspektorat Daerah	48.990.910,00	48.990.910,00	100,00	178.053.617,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	53.600.000,00	47.950.000,00	89,46	204.250.000,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	79.083.200,00	78.300.000,00	99,01	187.628.700,00
32	Badan Pendapatan Daerah	40.000.000,00	39.866.000,00	99,67	246.439.380,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81.500.000,00	75.130.500,00	92,18	190.577.330,00
34	Sekretariat DPRD	436.599.000,00	432.434.000,00	99,05	1.148.340.000,00
35	Kecamatan Bajo	2.000.000,00	0,00	0,00	16.300.000,00
36	Kecamatan Bajo Barat	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
37	Kecamatan Basse Sangtempe	19.100.000,00	16.860.000,00	88,27	25.980.000,00
38	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	12.710.000,00	12.710.000,00	100,00	49.030.000,00
39	Kecamatan Belopa	0,00	0,00	0,00	143.870.000,00
40	Kecamatan Belopa Utara	21.500.000,00	17.900.000,00	83,26	24.750.000,00
41	Kecamatan Bupon	6.600.000,00	6.488.400,00	98,31	47.100.000,00
42	Kecamatan Kamanre	55.190.320,00	52.434.000,00	95,01	11.000.000,00
43	Kecamatan Lamasi	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	254.085.000,00
44	Kecamatan Lamasi Timur	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	13.000.000,00
45	Kecamatan Larompong	43.527.800,00	43.282.500,00	99,44	96.955.000,00
46	Kecamatan Larompong Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Kecamatan Latimojong	0,00	0,00	0,00	57.520.200,00
48	Kecamatan Ponrang	4.271.290,00	4.271.290,00	100,00	35.300.000,00
49	Kecamatan Ponrang Selatan	0,00	0,00	0,00	25.900.000,00
50	Kecamatan Suli	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	49.120.000,00
51	Kecamatan Suli Barat	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	29.500.000,00
52	Kecamatan Walenrang	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	118.255.500,00



Tabel 5.30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
53	Kecamatan Walenrang Barat	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
54	Kecamatan Walenrang Timur	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	16.550.000,00
55	Kecamatan Walenrang Utara	10.000.000,00	9.989.000,00	99,89	44.800.000,00
56	Kecamatan Bua	27.000.000,00	19.000.000,00	70,37	20.495.000,00
57	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Perangkat Daerah		42.746.390.821,00	39.407.536.203,00	92,19	49.563.832.159,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp51.534.318.234,00 dan terealisasi sebesar Rp48.455.261.295,09 atau mencapai 94,03% dari anggaran. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin ini mengalami penurunan sebesar Rp11.797.967.114,91 atau 80,42% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp60.253.228.410,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		(%)	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	47.474.019.083,00	44.945.610.865,09	94,67	57.985.239.110,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	515.000.000,00	0,00	0,00	494226000
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.990.299.151,00	2.958.298.210,00	98,93	23.246.000,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Rambu - Rambu	0,00	0,00	0,00	1.750.517.300,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	555.000.000,00	551.352.220,00	99,34	0,00
Jumlah Belanja Gedung Dan Bangunan		51.534.318.234,00	48.455.261.295,09	94,03	60.253.228.410,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan perangkat daerah Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 5.32

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.928.562.395,00	24.764.157.922,09	91,96	28.977.955.462,00
2	Dinas Kesehatan	12.627.239.034,00	12.302.567.193,00	97,43	7.724.416.818,00
3	RSUD Batara Guru	555.000.000,00	551.352.220,00	99,34	5.297.959.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.123.120.000,00	6.119.984.800,00	99,95	4.736.158.300,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	584.800.000,00	584.091.500,00	99,88	2.554.677.070,00
8	Dinas Pertanahan	515.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	807.499.435,00	762.802.000,00	94,46	0,00
11	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	97.766.500,00
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	690.096.500,00	686.603.500,00	99,49	361.417.000,00
13	Dinas Perikanan	105.785.000,00	105.577.700,00	99,80	0,00
14	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	449.437.800,00
16	Dinas Perdagangan	1.770.796.015,00	1.758.778.300,00	99,32	226.469.000,00
17	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	6.700.290.000,00
18	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	1.048.950.360,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	102.031.275,00	99.970.000,00	97,98	195.271.000,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	200.009.598,00	198.250.000,00	99,12	0,00
21	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	542.035.000,00
22	Kecamatan Basse Sangtempe	53.545.609,00	52.600.000,00	98,23	0,00
23	Kecamatan Belopa	50.000.000,00	49.492.600,00	98,99	815.828.000,00
24	Kecamatan Belopa Utara	180.000.032,00	179.212.650,00	99,56	134.508.000,00
25	Kecamatan Bupon	0,00	0,00	0,00	86.602.000,00
26	Kecamatan Ponrang	42.000.000,00	41.870.000,00	99,69	0,00
27	Kecamatan Suli Barat	0,00	0,00	0,00	236.802.000,00
28	Kecamatan Walenrang	147.063.583,00	146.231.260,00	99,43	0,00
29	Kecamatan Walenrang Utara	51.769.758,00	51.719.650,00	99,90	66.685.100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Perangkat Daerah		51.534.318.234,00	48.455.261.295,09	94,03	60.253.228.410,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp150.862.960.281,00 dan terealisasi sebesar Rp148.769.092.132,00 atau mencapai 98,61 % dari anggaran. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan ini mengalami kenaikan sebesar Rp6.439.017.393,00 atau sebesar 104,52% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp142.180.178.739,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.33
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	2021		2020	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	98.293.329.039,00	97.952.542.302,00	99,65	121.996.612.892,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jembatan	9.075.337.935,00	7.732.690.970,00	85,21	3.820.075.847,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Irigasi	19.149.924.739,00	19.092.872.420,00	99,70	3.265.736.455,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	16.917.442.367,00	16.742.327.544,00	98,96	2.017.788.495,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	149.516.800,00
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Kotor	4.740.103.201,00	4.671.106.303,00	98,54	10.930.448.250,00
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.000.000.000,00	1.905.946.948,00	95,30	0,00
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jaringan Listrik	56.823.000,00	56.822.080,00	100,00	0,00
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jaringan Telepon	350.000.000,00	340.217.000,00	97,20	0,00
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	275.000.000,00	274.566.565,00	99,84	0,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		150.862.960.281,00	148.769.092.132,00	98,61	142.180.178.739,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan perangkat daerah Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.34
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

No.	Perangkat Daerah	2021		2020	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	350.000.000,00	340.217.000,00	97,20	0,00
2	Dinas Kesehatan	2.000.000.000,00	1.905.946.948,00	95,30	0,00
3	RSUD Batara Guru	275.000.000,00	274.566.565,00	99,84	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	126.680.219.974,00	124.892.440.058,00	98,59	124.510.594.049,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.745.234.673,00	2.738.909.727,00	99,77	6.481.291.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.714.181.210,00	15.546.395.570,00	98,93	1.051.638.600,00



Tabel 5.34

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	58.323.000,00	53.322.080,00	91,43	0,00
8	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	119.840.000,00	119.640.000,00	99,83	160.229.000,00
9	Dinas Perikanan	430.865.000,00	427.676.064,00	99,26	346.225.400,00
10	Dinas Pariwisata	200.000.000,00	198.899.300,00	99,45	105.702.800,00
11	Dinas Perdagangan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	83.197.500,00
12	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	49.654.000,00
13	Kecamatan Bajo	150.000.000,00	149.364.000,00	99,58	476.762.390,00
14	Kecamatan Belopa	505.000.000,00	500.332.000,00	99,08	1.346.807.500,00
15	Kecamatan Belopa Utara	289.620.000,00	287.210.950,00	99,17	1.125.403.000,00
16	Kecamatan Bupon	150.012.436,00	149.533.370,00	99,68	533.455.000,00
17	Kecamatan Kamanre	74.998.114,00	72.185.000,00	96,25	453.074.000,00
18	Kecamatan Lamasi	150.000.000,00	149.749.000,00	99,83	339.842.000,00
19	Kecamatan Larompong	150.000.000,00	148.805.000,00	99,20	567.781.650,00
20	Kecamatan Larompong Selatan	150.000.000,00	148.579.050,00	99,05	491.813.000,00
21	Kecamatan Ponrang	208.000.000,00	206.564.000,00	99,31	1.188.496.000,00
22	Kecamatan Ponrang Selatan	150.000.881,00	148.967.000,00	99,31	390.392.000,00
23	Kecamatan Suli	129.107.415,00	128.282.000,00	99,36	434.844.000,00
24	Kecamatan Suli Barat	112.550.000,00	111.554.000,00	99,12	387.189.000,00
25	Kecamatan Walenrang	0,00	0,00	0,00	524.918.950,00
26	Kecamatan Walenrang Utara	66.507.578,00	66.453.450,00	99,92	528.254.900,00
27	Kecamatan Bua	0,00	0,00	0,00	602.613.000,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Perangkat Daerah		150.862.960.281,00	148.769.092.132,00	98,61	142.180.178.739,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp18.116.950.238,00 dan terealisasi sebesar Rp10.357.352.401,00 atau mencapai 57,17% dari anggaran. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya ini mengalami penurunan sebesar Rp23.610.133.636,00 atau sebesar 30,49% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp33.967.486.037,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.35
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		2020	Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku	0,00	0,00	0,00	25.110.664.964,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	3.004.001.735,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	860.969.890,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	4.991.849.448,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Bahan Perpustakaan/Terekam dan Bentuk Mikro	18.000.000,00	17.000.000,00	94,44	0,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Aset Tidak berwujud	175.000.000,00	174.563.637,00	99,75	0,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	17.923.950.238,00	10.165.788.764,00	56,72	0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		18.116.950.238,00	10.357.352.401,00	57,17	33.967.486.037,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan perangkat daerah Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.36
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.923.950.238,00	10.165.788.764,00	56,72	28.907.193.654,00
2	RSUD Batara Guru	0,00	0,00	0,00	1.932.919.448,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	2.863.435.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
5	Dinas Pariwisata	100.000.000,00	99.800.000,00	99,80	0,00
6	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	68.442.935,00
7	Inspektorat Daerah	40.000.000,00	39.763.637,00	99,41	0,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	0,00	0,00	0,00	195.495.000,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	18.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Perangkat Daerah		18.116.950.238,00	10.357.352.401,00	57,17	33.967.486.037,00



5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.421.335.930,00 atau 67,44% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp2.107.454.429,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37
Rincian Belanja Tak Terduga

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		(%)	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Tak Terduga	2.107.454.429,00	1.421.335.930,00	67,44	7.774.407.311,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		2.107.454.429,00	1.421.335.930,00	67,44	7.774.407.311,00

Realisasi Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak di harapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Rincian penyaluran belanja tak terduga sebesar Rp1.421.335.930,00 dapat dilihat terinci pada **Lampiran 1k** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.38
Rincian Penyaluran Belanja Tak Terduga

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	REKANAN	KONTRAK/SPMK/NPHD/TANGGAL	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	BPKD	Belanja tidak terduga untuk penanganan Bencana Banjir Kecamatan Bua Kabupaten Luwu	Surat Keputusan Nomor 157/II/2021 tanggal 9 Februari 2021	145.140.000,00
2	BPKD	Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Korban Bencana Kebakaran	Telaahan Staf Nomor 900/969/BPKD/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021	10.000.000,00
3	BPKD	Belanja Tidak Terduga untuk penanganan banjir di Kecamatan Walenrang, Kecamatan Larompong, Kecamatan Larompong Selatan	Surat Keputusan Nomor 525/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan Surat Keputusan Nomor 532/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dan Surat Keputusan Nomor 533/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021	150.000.000,00
4	BPKD	Belanja tidak terduga Bencana banjir di Kec. Walenrang timur, Kec. Walenrang, Kec. Walenrang Utara dan Kec. Lamasi	Surat Keputusan Nomor 570/IX/2021 tanggal 23 September 2021	132.874.000,00
5	BPKD	Belanja Tidak Terduga penanganan bencana banjir di Kecamatan Bua	Surat Keputusan Nomor 690/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021	66.550.500,00
6	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kab. Luwu	Surat Keputusan Nomor 584/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021	750.000.000,00
7	BPKD	Belanja Tidak Terduga Pemanfaatan Anggaran BTT		166.771.430,00
Jumlah Penyaluran Belanja Tak Terduga				1.421.335.930,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp262.050.991.347,00 atau 99,78% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD



setelah perubahan sebesar Rp262.618.418.854,00. Realisasi Belanja Transfer ini mengalami penurunan sebesar Rp1.104.795.069,00 atau sebesar 99,58% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp263.155.786.416,00 dengan rincian dapat dilihat pada **lampiran 1k** sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rincian Transfer

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		(%)	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Transfer Bagi Hasil	3.362.966.854,00	2.795.532.359,00	83,13	2.650.339.416,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	259.255.452.000,00	259.255.458.988,00	100,00	260.505.447.000,00
Jumlah		262.618.418.854,00	262.050.991.347,00	99,78	263.155.786.416,00

5.1.1.1.1 Transfer Bagi Hasil

Saldo Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.795.532.359,00 atau 83,13% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp3.362.966.854,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil ini mengalami kenaikan sebesar Rp145.192.943,00 atau sebesar 105,48% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.650.339.416,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.40
Rincian Transfer Bagi hasil

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		(%)	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kab/Kota dan Desa	2.500.000.000,00	2.167.392.308,00	86,70	2.053.811.784,00
	- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	2.500.000.000,00	2.167.392.308,00	86,70	2.053.811.784,00
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Kab/Kota dan Pemerintah Desa	862.966.854,00	628.140.051,00	72,79	596.527.632,00
	- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	862.966.854,00	628.140.051,00	72,79	596.527.632,00
Jumlah		3.362.966.854,00	2.795.532.359,00	83,13	2.650.339.416,00

Dalam Realisasi Transfer Bagi Hasil terdapat Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Ke Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 yang tersalurkan ke 207 Pemerintah Desa.

5.1.1.1.2 Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp259.255.458.988,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp259.255.452.000,00. Realisasi Bantuan



Keuangan ini mengalami penurunan sebesar Rp1.249.988.012,00 atau sebesar 99,52% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp260.505.447.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41
Rincian Transfer Bantuan Keuangan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		2020 (%)	2020 Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	259.255.452.000,00	259.255.458.988,00	100	0,00
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	260.505.447.000,00
Jumlah		259.255.452.000,00	259.255.458.988,00	100	260.505.447.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa merupakan bantuan kepada 207 Pemerintah Desa Kabupaten Luwu sebesar Rp259.255.458.988,00. Untuk pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam 1 (satu) tahun dibagi menjadi 3 (tiga) tahap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 8 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 38 Tahun 2021 atas lampiran Peraturan Bupati Luwu tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021.

5.1.3 SURPLUS / (DEFISIT)

Selisih Pendapatan daerah dengan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) APBD. Surplus terjadi apabila pendapatan lebih besar dari belanja daerah. Defisit terjadi apabila pendapatan lebih kecil dari belanja daerah. Realisasi Surplus sebesar Rp584.021.137,09 atau (0,91%) dari anggaran sebesar (Rp63.888.657.271,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.42
Rincian Surplus / (Defisit)

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		2020 (%)	2020 Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Daerah	1.422.726.713.381,67	1.404.537.109.394,18	98,72	1.451.964.727.852,71
2	Belanja Daerah	1.486.615.370.652,67	1.403.953.088.257,09	94,44	1.419.041.706.888,30
Suplus/(Defisit) = (1)-(2)		(63.888.657.271,00)	584.021.137,09	(0,91)	32.923.020.964,41

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp63.888.657.271,00 dan terealisasi sebesar Rp64.071.657.270,92 atau mencapai 100,29% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.43
Pembiayaan Netto

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		(%)	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Penerimaan Pembiayaan	68.388.657.271,00	68.388.657.270,92	100,00	38.465.636.306,51
2	Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000,00	4.317.000.000,00	95,93	3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto (1-2)		63.888.657.271,00	64.071.657.270,92	100,29	35.465.636.306,51

Realisasi pembiayaan daerah tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 5.44
Rincian Pembiayaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021		(%)	2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Penerimaan Pembiayaan	68.388.657.271,00	68.388.657.270,92	100,00	38.465.636.306,51
-	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	68.388.657.271,00	68.388.657.270,92	100,00	38.465.486.306,51
	Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan	47.013.391.896,00	47.013.391.895,92	100,00	0,00
	Sisa belanja lainnya	21.375.265.375,00	21.375.265.375,00	100,00	0,00
-	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000,00	4.317.000.000,00	95,93	3.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.500.000.000,00	4.317.000.000,00	95,93	3.000.000.000,00
-	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan		63.888.657.271,00	64.071.657.270,92	100,29	35.465.636.306,51

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Luwu pada Tahun Anggaran 2021 merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp68.388.657.271,00 dan terealisasi sebesar Rp68.388.657.270,92 atau 100%;

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 merupakan Penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.317.000.000,00 atau 95,93%.



5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

Nilai SILPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp64.655.678.408,01 mengalami penurunan sebesar Rp3.732.978.862,91 atau 94,54% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp68.388.657.270,92.

Tabel 5.45
Rincian Perbandingan SILPA dengan Kas

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2021	2020
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	30.764.792.020,01	47.385.606.493,92
2	Kas di Bendahara Penerimaan	20.544.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	800,00	17.432.949,00
4	Kas di BLUD	29.919.591.575,00	20.615.902.769,00
5	Kas di Bendahara FKTP	218.402.205,00	278.461.747,00
6	Kas di Bendahara BOS	121.995.355,00	480.900.859,00
7	Kas Lainnya	1.458.181,00	9.748.528,00
A	Jumlah Kas	61.045.325.955,01	68.388.657.270,92
B	Jumlah SiLPA	64.655.678.408,01	68.388.657.270,92
C	Selisih (B-C)	3.608.894.272,00	0,00

Terdapat selisih antara SiLPA Tahun 2021 dengan saldo Kas Tahun 2021 di Neraca sebesar 3.608.894.272,00. Selisih ini terjadi karena penghapusan utang PFK tahun 2006 berdasarkan SK Bupati Luwu nomor 677/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp389.647.547,00 dan Deposito BLUD RSUD Batara Guru yang jatuh temponya melewati 3 bulan sehingga disajikan sebagai Investasi Jangka Pendek sebesar Rp4.000.000.000,00, dan Kas Lainnya sebesar Rp1.458.181,00,00 yang merupakan saldo utang PFK di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.46
Rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
1	2	3	4
1)	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	68.388.657.270,92	38.465.486.306,51
2)	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	68.388.657.270,92	38.465.486.306,51
3)	Sub Total (1-2)	0,00	0,00
4)	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	64.655.678.408,01	68.388.657.270,92
5)	Sub Total (3+4)	64.655.678.408,01	68.388.657.270,92



Tabel 5.46
Rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(dalam Rupiah)			
No.	Uraian	2021	2020
1	2	3	4
6)	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7)	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6)	64.655.678.408,01	68.388.657.270,92

Penjelasan atas rincian Laporan Perubahan SAL seperti pada Tabel 5.47 sebagai berikut:

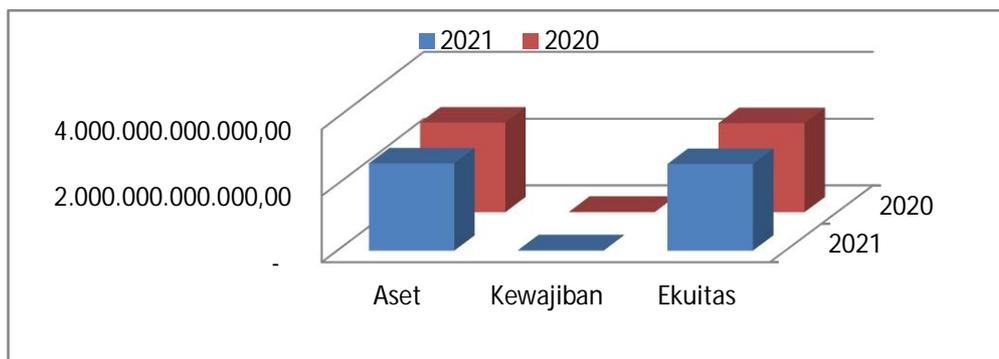
- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal
 Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 adalah sebesar Rp68.388.657.270,92;
- 2) Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2020 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar Rp68.388.657.270,92;
- 3) Tidak Terdapat selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan SAL;
- 4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu pada Tahun Anggaran 2021 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp64.655.678.408,01.
- 5) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya sebesar Rp0,00;
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir
 Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp64.655.678.408,01.

5.3 NERACA

Untuk Posisi Keuangan per 31 Desember 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, sebagai berikut:

Aset	Rp2.635.868.918.705,47
Kewajiban	Rp 20.483.476.733,05
Ekuitas	Rp2.615.385.441.972,42

Grafik 5.1
Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana T.A. 2021 dan 2020





Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana T.A. 2021 dan 2020 disajikan pada **Grafik 5.1**

5.3.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.635.868.918.705,47 mengalami penurunan sebesar Rp61.793.849.851,69 atau sebesar (2,29%) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2.697.662.768.557,16 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47
Rincian Aset

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Aset Lancar	119.680.233.708,85	119.488.609.856,04	191.623.852,81	0,16
2	Investasi Jangka Panjang	55.569.713.837,00	54.062.110.390,00	1.507.603.447,00	2,79
3	Aset Tetap	2.418.279.093.960,22	2.485.562.369.440,12	(67.283.275.479,90)	(2,71)
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	42.339.877.199,40	38.549.678.871,00	3.790.198.328,40	9,83
	Jumlah Aset	2.635.868.918.705,47	2.697.662.768.557,16	(61.793.849.851,69)	(2,29)

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan. Jumlah aset lancar Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 adalah Rp119.680.233.708,85 mengalami kenaikan sebesar Rp191.623.852,81 atau sebesar 0,16% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp119.488.609.856,04 dengan rincian:

Tabel 5.48
Rincian Aset Lancar

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Kas di Kas Daerah	30.764.792.020,01	47.385.606.493,92	(16.620.814.473,91)	(35,08)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	20.544.000,00	98.254.066,00	(77.710.066,00)	(79,09)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	800,00	17.432.949,00	(17.432.149,00)	(100,00)
4	Kas di BLUD	29.919.591.575,00	20.615.902.769,00	9.303.688.806,00	45,13
5	Kas Dana BOS	121.995.355,00	480.900.859,00	(358.905.504,00)	(74,63)
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	218.402.205,00	278.461.747,00	(60.059.542,00)	(21,57)
7	Kas Lainnya	1.458.181,00	9.748.528,00	(8.290.347,00)	(85,04)



Tabel 5.48
Rincian Aset Lancar

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
8	Investasi Jangka Pendek	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00
8	Piutang Pajak Daerah	10.665.334.693,46	10.621.940.963,46	43.393.730,00	0,41
9	Piutang retribusi Daerah	1.046.353.843,00	1.429.812.693,00	(383.458.850,00)	(26,82)
10	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.996.278.246,00	5.306.726.006,00	689.552.240,00	12,99
11	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	12.062.000.759,00	4.577.565.392,00	7.484.435.367,00	163,50
12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	50,00	(50,00)	(100,00)
13	Piutang Transfer Antar Daerah	20.160.296.960,00	12.399.120.565,00	7.761.176.395,00	62,59
14	Piutang Lainnya	278.409.815,00	79.582.310,00	198.827.505,00	249,84
15	Penyisihan Piutang	(8.654.596.768,00)	(8.585.939.627,57)	(68.657.140,42)	0,80
16	Beban Dibayar Dimuka	144.790.837,87	378.082,19	144.412.755,68	38.196,13
17	Persediaan	12.934.581.186,51	24.773.116.010,04	(11.838.534.823,53)	(47,79)
Jumlah Aset Lancar		119.680.233.708,85	119.488.609.856,04	191.623.852,81	0,16

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas di Kas daerah merupakan saldo Bank Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp30.764.792.020,01 dan Rp47.385.606.493,92 yang dikelola langsung oleh BUD berupa 7 (tujuh) rekening giro dan 4 (empat) bilyet deposito yang terdapat pada empat bank, yaitu PT Bank Sulselbar Cabang Belopa; Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Belopa; Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Belopa; dan Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Belopa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49
Rincian Kas Di Kas Daerah

(Dalam Rupiah)

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	2021	2020
A.	PT. Bank Sulsel Cabang Belopa			
1	092.001.001.8	RKUD	30.529.596.763,01	47.137.155.163,11
2	092.001.004.2	Dana PAD	235.195.257,00	248.443.133,00
3	092.001.015.8	PBB	0,00	0,00
4	092.001.012.3	TPTGR	0,00	0,00
5	092.101.0000007361	Deposito	0,00	0,00
6	092.101.0000007379	Deposito	0,00	0,00
7	092.101.0000007387	Deposito	0,00	0,00
8	092.101.0000007395	Deposito	0,00	0,00
B.	BNI Cabang Belopa			
1	0878.495.11	Pemda. Kab Luwu	0,00	0,00
C.	BRI Cabang Palopo			
1	214801.000224.30.5	Pemda. Kab Luwu	0,00	0,00
D.	BTN Cabang Palopo			
1	00074.01.30.0000152.1	Pemda. Kab Luwu	0,00	8.197,81
Saldo Kas di Kas Daerah			30.764.792.020,01	47.385.606.493,92

Penggunaan masing-masing Rekening Giro dijelaskan sebagai berikut:



1. Rekening giro Nomor 092.001.000000001.8 pada PT Bank Sulsel (BPD) Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari PAD serta transfer dari Provinsi dan Dana dari Pusat. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.529.596.763,01.
2. Rekening Giro Nomor 092.001.000000004.2 pada PT Bank Sulsel (BPD) Cabang Belopa merupakan Rekening Dana Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk pencairan dan penerimaan jasa giro serta untuk menampung Dana Pendapatan Asli Daerah selain PBB dan BPHTB. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2020 sebesar Rp235.195.257,00 merupakan penerimaan jasa giro untuk bulan Desember 2021.
3. Rekening Giro Nomor 92.001.000000015.8 pada PT Bank Sulsel (BPD) Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Luwu, khususnya Dana PBB dan BPHTB. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 setelah seluruh saldo dilimpahkan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).
4. Rekening Giro Nomor 92.001.000000012.3 pada PT Bank Sulsel (BPD) Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Luwu khususnya Dana yang berasal dari penyetoran TPTGR. Saldo Rekening per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 setelah seluruh saldo dilimpahkan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).
5. Rekening Giro Nomor 0878.495.11 pada PT Bank BNI Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Luwu selaku mitra kerja. Rekening ini digunakan untuk menampung dana kapitasi JKN dari Puskesmas/FKTP. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 .
6. Rekening Giro Nomor 214801.000224.30.5 pada PT Bank BRI Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Luwu selaku mitra kerja. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.
7. Rekening Giro Nomor 00074.01.30.0000152.1 pada PT Bank BTN Cabang Palopo merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk menampung pencairan dan penerimaan jasa giro serta menampung penerimaan dana BPHTB karena Bank BTN selaku mitra kerja merupakan pengelola perumahan bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Luwu. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan jasa giro untuk bulan Desember.

Nilai Kas di Kas Daerah TA 2021 sebesar Rp30.764.792.020,01 merupakan sisa kas akhir tahun yang tersimpan di rekening Kas daerah berupa SiLPA yang dapat digunakan untuk anggaran tahun berikutnya. Namun kas tersebut bukan merupakan SiLPA murni, yang dengan kata lain angka tersebut sebagian telah dialokasikan pada belanja (program dan kegiatan) untuk tahun mendatang. Rincian kas yang dibatasi penggunaannya dapat dilihat pada **Tabel 5.48** berikut:



Tabel 5.50
Rincian Rencana Penggunaan SiLPA

(Dalam Rupiah)		
No. 1	URAIAN 2	NILAI 3
I	SILPA KAS DI KASDA TAHUN 2021	30.764.792.020,01
	Rencana Penggunaan SiLPA	
II	SISA DAK Tahun 2021	6.202.959.713,00
A	DAK REGULER	13.765.118,00
1	DAK Bidang Pendidikan	9.658.114,00
2	DAK Bidang Kesehatan KB	4.107.004,00
3	DAK Bidang Jalan	0,00
B	DAK PENUGASAN	103.377.858,00
1	Bidang Sanitasi	7.115.727,00
2	Bidang Air Minum (Air Minum Pedesaan)	48.443.065,00
3	Bidang Irigasi	565.066,00
4	Bidang Pertanian	47.254.000,00
C	DAK NON FISIK	6.085.816.737,00
1	Bidang Pendidikan	3.230.393.480,00
-	BOP PAUD	346.800.000,00
-	BOP Kesetaraan Pendidikan	29.700.000,00
-	Dana Tunjangan Profesi Guru	1.825.609.440,00
-	Tambahan Penghasilan Guru	23.250.000,00
-	Tunjangan Khusus Guru	1.005.034.040,00
2	Bantuan Operasional dan Keluarga Berencana	2.350.125.667,00
-	BOK - Dinas Kesehatan	213.868.552,00
-	BOKB - Dinas KB	2.136.257.115,00
3	Dana Pelayanan Administrasi dan Kependudukan	186.175.820,00
4	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	24.301.080,00
5	Dana Fasilitas Penanaman Modal	1.011.400,00
6	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	46.241.320,00
7	BOK Tambahan (Insentif Nakes Covid-19)	247.567.970,00
III	SILPA MURNI (I - II)	24.561.832.307,01

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp20.544.000,00 dan Rp98.254.066,00.

Saldo Kas di Bendahara Penerima Tahun 2021 sebesar Rp20.544.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayan Parkir di Tepi Jalan pada Dinas Perhubungan

Saldo Kas di Bendahara Penerima Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp98.254.066,00 telah disetor sebesar Rp33.201.066,00 pada tahun 2021, dengan rincian pada **Lampiran 2.1.** terdiri atas retribusi pelayanan pasar atas sebesar Rp20.560.000,00 pada Dinas Perdagangan; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp7.200.000,00 dan sebesar Rp65.053.000,00 di reklasifikasi ke piutang lainnya - bagian lancar tuntutan kerugian daerah pada Dinas Perhubungan; Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp300.000,00 pada Dinas Perikanan; Pajak Mineral Bukan Logam



dan Batuan sebesar Rp495.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah; dan Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan atas Hasil Klaim/Denda BPJS (Dana JKN Non Kapitasi) yang sudah masuk ke rekening FKTP tetapi belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.646.066,00 dengan rincian pada Puskesmas Basse Sangtempe sebesar Rp1.066,00; Puskesmas Walenrang Utara sebesar Rp300.000,00; dan Puskesmas Walenrang Timur sebesar Rp4.345.000,00 sebagaimana terinci pada **Lampiran 2.1.1**

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp800,00 dan Rp17.432.949,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 sebesar Rp800,00 pada Dinas Koperasi dan UMKM

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2020 telah disetor keseluruhan sebesar Rp17.432.949,00 terdiri atas sisa UUDP Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp3.000.000,00; BKP-SDM sebesar Rp53,00; dan terdapat sisa dana yang tersimpan di kas bendahara pengeluaran BPKD-PPKD yang merupakan sisa dana BTT - Penanggulangan Covid yang masih tersimpan di rekening SKPD BPBD selaku pengelola dana Covid sebesar Rp57.896,00. Selain itu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat sisa kas di Bendahara Dana Pendidikan Gratis SD Negeri sebesar Rp6.935.000,00 dan SMP Negeri sebesar Rp7.440.000,00 yang merupakan belanja jasa yang tidak digunakan, dimana seluruhnya telah dikembalikan pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terinci pada **Lampiran 2.2**.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo kas yang terdapat di BLUD RSUD Batara Guru sebesar Rp29.919.591.575,00, yang terdiri atas kas di bendahara penerima sebesar Rp24.919.591.575,0 dan Saldo Deposito sebesar Rp5.000.000.000,00. Terkait pengelolaan keuangan dan aset RSUD Batara Guru, telah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan KAP S.KRISTIAJI Nomor 00065/2.1019/AU.5/11/1005-2/I/III/2022.

Penjelasan secara terinci Kas di BLUD beserta rekeningnya dapat dilihat pada **lampiran 2.3** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.51
Rincian Kas BLUD

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Kas Di Bendahara Penerimaan	24.919.591.575,00	13.615.902.769,00	11.303.688.806,00	83,02
2	Deposito	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(28,57)
	Jumlah	29.919.591.575,00	20.615.902.769,00	9.303.688.806,00	45,13



5.3.1.1.5 Kas Di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan sisa kas yang masih dipegang Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp121.995.355,00 dan Rp480.900.859,00.

Tabel 5.52
Rincian Kas Dana BOS

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Sekolah Dasar	86.768.255,00	279.024.259,00	(192.256.004,00)	(68,90)
2	Sekolah Menengah Pertama	35.227.100,00	201.876.600,00	(166.649.500,00)	(82,55)
	Jumlah	121.995.355,00	480.900.859,00	(358.905.504,00)	(74,63)

Sisa saldo Dana BOS yang masih tersimpan di Rekening bendahara Dana BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp121.995.355,00 terdiri atas sisa saldo pada rekening Dana BOS SD yang berjumlah 264 sekolah sebesar Rp86.768.255,00 dan saldo pada rekening Dana BOS SMP sejumlah 80 sekolah sebesar Rp35.227.100,00, dengan rincian pada **Lampiran 2.5**.

Sisa saldo Dana BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp480.900.859,00 dimanfaatkan oleh seluruh sekolah pada Triwulan II Tahun Anggaran 2021. Adapun rincian pemanfaatan Dana BOS selama TA 2020 untuk masing-masing sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 1.c dan lampiran 1.d**.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN merupakan sisa kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Puskesmas selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp218.402.205,00 dan Rp278.461.747,00.

Saldo Tahun 2021 sebesar Rp218.402.205,00 merupakan saldo di Rekening Bendahara JKN Kapitasi yang tersebar di seluruh FKTP Pemda Kabupaten Luwu sebagaimana terinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.53
Rincian Sisa Kas di Bendahara FKTP

(dalam Rupiah)

No.	Nama Rekening FKTP/Puskesmas	Nomor Rekening BPD	2021	2020
1	2	3	4	5
1	Larompong Selatan	920.020.000.010.126	8.066.497,00	144.781,00
2	Larompong	920.020.000.010.347	15.440.587,00	17.138.501,00
3	Suli	920.020.000.010.223	5.367.607,00	33.013.597,00
4	Suli Barat	920.020.000.010.240	914.181,00	12.041,00
5	Belopa	920.020.000.010.029	11.933,00	4.502,00
6	Belopa Utara	920.020.000.009.926	9.818.042,00	2.918.573,00
7	Bajo	920.020.000.009.942	8.016.613,00	2.662.577,00



Tabel 5.53
Rincian Sisa Kas di Bendahara FKTP

(dalam Rupiah)

No.	Nama Rekening FKTP/Puskesmas	Nomor Rekening BPD	2021	2020
1	2	3	4	5
8	Bajo Barat	920.020.000.009.969	9.171.190,00	149.736.759,00
9	Latimojong	920.020.000.010.207	56.182,00	489.167,00
10	Bastem	920.020.000.009.985	264.118,00	2.288,00
11	Bastem Utara	920.020.000.010.002	134.211,00	585.213,00
11	Kamanre	920.020.000.010.061	18.974.672,00	991,00
12	Ponrang Selatan	920.020.000.010.185	15.409.373,00	13.695.172,00
13	Ponrang	920.020.000.010.169	74.114,00	553.673,00
14	Noling	920.020.000.010.142	29.244.707,00	55.201,00
15	Bua	920.020.000.010.045	74,00	66.232,00
16	Walentrang	920.020.000.010.266	33.703.768,00	38.126.950,00
17	Walentrang Timur	920.020.000.010.304	12.086.459,00	64.684,00
18	Walentrang Utara	920.020.000.010.321	3.102.921,00	3.261.995,00
19	Walentrang Barat	920.020.000.010.282	30.158.209,00	15.637.185,00
20	Lamasi	920.020.000.010.088	17.434.836,00	25.071,00
21	Lamasi Timur	920.020.000.010.100	951.911,00	266.594,00
Jumlah			218.402.205,00	278.461.747,00

Selain rekening di atas, terdapat rekening pada Bank Sulsebar yang dikelola oleh bendahara FKTP, yang digunakan untuk menampung dana pembayaran jasa pelayanan secara transaksi non tunai, dengan rincian pada **Lampiran 2.4**

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan Sisa pemotongan pajak yang masih dipegang oleh Bendahara SKPD per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.458.181,00 dan Rp9.748.528,00 dengan perincian pada **Lampiran 2.6**.

5.3.1.1.8 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00 dan Rp0,00 merupakan Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) pada RSUD Batara Guru.

5.3.1.1.9 Piutang Pajak Daerah

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain yang diharapkan dapat dijadikan uang



dalam satu periode akuntansi. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan pembiayaan yang telah diakui dalam periode tertentu.

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor 132 Tahun 2019 tentang Akuntansi Piutang Pemerintah Daerah Luwu, maka dilakukan penilaian kualitas piutang dan penyisihan atas piutang yang tak tertagih. Dalam menetapkan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 5.5.2
Kebijakan Penyisihan Piutang

(dalam Rupiah)			
No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan
1	2	3	4
1	0 bulan	Lancar	5%
2	0-12 bulan	Kurang Lancar	10%
3	13-24 bulan	Diragukan	50%
4	> 24 bulan	Macet	100%

Adapun Daftar Mutasi Piutang Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang sampai dengan batas tertentu pada tanggal Neraca atau per 31 Desember 2021 belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu sebelum penyisihan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp10.665.334.693,46 mengalami kenaikan sebesar Rp43.393.730,0 atau sebesar (0,41%) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp10.621.940.963,46 dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.54
Rincian Piutang Pajak

(dalam Rupiah)					
No	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pajak Hotel	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	107.445.000,00	108.365.000,00	(920.000,00)	(0,85)
3	Piutang Pajak Reklame	41.184.853,00	87.530.515,00	(46.345.662,00)	(52,95)
4	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	688.880.123,39	580.252.441,39	108.627.682,00	18,72
5	Piutang PBB	8.809.880.873,07	8.852.116.898,07	(42.236.025,00)	(0,48)
6	Pajak Penerangan Jalan	1.009.443.844,00	985.176.109,00	24.267.735,00	2,46
Jumlah Piutang Pajak		10.665.334.693,46	10.621.940.963,46	43.393.730,00	0,41
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak		(7.732.394.493,24)	(7.873.579.828,12)	141.185.334,88	(1,79)
Nilai Bersih Piutang Pajak		2.932.940.200,22	2.748.361.135,34	184.579.064,88	6,72

Adapun Daftar Mutasi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 3.1**. Penjelasan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 diuraikan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel tidak mengalami kenaikan ataupun pengurangan dikarenakan merupakan piutang tak tertagih yang umur piutangnya lebih dari 2 tahun. Sebagaimana terinci pada **lampiran 3.1.1**
2. Terdapat penurunan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp920.000,00 per 31



- Desember 2021 dibandingkan dengan TA 2020, yang merupakan penyetoran piutang pajak restoran tahun 2020 sebagaimana terinci pada **lampiran 3.1.2f**. Sedangkan piutang pajak restoran tahun-tahun sebelumnya yakni piutang tahun 2008 sampai tahun 2012 tidak mengalami perubahan dengan total piutang tahun 2008 s.d. 2012 sebesar Rp107.445.000,00, dengan rincian pada **lampiran 3.1.2a - 3.1.2e**
3. Piutang Reklame pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp46.345.662,00) dibandingkan TA 2020 (sebelum disisihkan), dengan rincian berupa penyetoran piutang selama TA 2020 sebesar Rp47.445.665,00 dan penambahan piutang tahun 2021 sebesar Rp1.100.003,00 terinci pada **lampiran 3.1.3b-3.1.3c** Selain itu, terdapat sisa piutang sebesar Rp40.084.850,00 yang merupakan piutang tak tertagih tahun 2008 dan 2012. Adapun rincian Piutang Pajak Reklame dapat dilihat pada **lampiran 3.1.3a**.
 4. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp108.627.682,00 dibandingkan dengan TA 2020, dengan rincian berupa penambahan piutang yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selama TA 2021 sebesar Rp166.740.989,00 dan pengurangan piutang selama TA 2021 sebesar Rp57.792.859,00 yang terdiri atas pembayaran tunggakan pajak tahun 2017 sebesar Rp3.769.416,00; tunggakan pajak tahun 2019 sebesar Rp6.602.320,00; dan tunggakan pajak tahun 2020 sebesar Rp47.421.123,00. Selain itu terdapat koreksi sebesar Rp297.275,00 yang merupakan koreksi kurang catat penyetoran tahun 2014 sebesar Rp320.448,00 dan koreksi lebih bayar pajak sebesar Rp23.173,00 Adapun rincian piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp688.880.123,39 (sebelum penyisihan) dapat dilihat pada **lampiran 3.1.4a-3.1.4l**.
 5. Piutang PPJ sebesar Rp1.009.443.844,00 terdiri dari penambahan dari PPJ bulan Desember yang belum disetor hingga 31 Desember 2021 adapun piutang PPJ PT PLN sejak tahun 2010 sebesar Rp81.918.395,00, telah dihapuskan berdasarkan persuratan nomor 0512/AGA04.02/C1605.0000/2021. Terdapat penyetoran piutang tahun 2020 sebesar Rp903.257.714,00 pada tanggal 18 Januari 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.
 6. Piutang PBB sebagian merupakan pelimpahan dari Kanwil Pajak Pratama Palopo pada Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. BA-70/WPJ.15/KP.04/2014. Selain itu juga terdapat Penghapusan objek pajak bumi bangunan berdasarkan SK Nomor 704/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp253.129.567,00 sehingga saldo Piutang PBB Per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.809.880.873,07 sebagaimana terinci pada **lampiran 3.1.5**.

5.3.1.1.10 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola terkait yang sampai



dengan tanggal Neraca tertentu atau per 31 Desember 2021 belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah. Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu sebelum penyisihan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.046.353.843,00 mengalami penurunan sebesar Rp (Rp383.458.850,00) atau sebesar (26,82%) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1.429.812.693,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Adapun Daftar Mutasi Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 3.2.**

Tabel 5.55
Rincian Piutang Retribusi

No	Uraian	2021	2020	(Dalam Rupiah)	
				Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-Dinkes	504.944.600,00	424.046.900,00	80.897.700,00	19,08
2	Retribusi Pengendalian Menara	49.217.943,00	146.324.493,00	(97.106.550,00)	(66,36)
3	Retribusi Jasa Usaha Kayu	487.191.300,00	487.191.300,00	0,00	100,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	365.850.000,00	(360.850.000,00)	(98,63)
5	Retribusi Tempat Rekreasi Olah Raga	0,00	6.400.000,00	(6.400.000,00)	(100,00)
Jumlah Piutang Retribusi		1.046.353.843,00	1.429.812.693,00	(383.458.850,00)	(26,82)
Penyisihan Piutang Retribusi		(538.958.966,00)	(540.876.260,25)	1.917.294,25	(0,35)
Nilai Bersih Piutang		507.394.877,00	888.936.432,75	(381.541.555,75)	(42,92)

Penjelasan Piutang Retribusi 2021 sebagai berikut:

1. Selama TA 2021, terdapat penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp504.944.600,00 yang tersebar di 22 FKTP dan terdapat pengurangan atas piutang tahun 2020 melalui penyetoran oleh BPJS sebesar Rp424.046.900,00, dengan rincian pada **lampiran 3.2. dan 3.2.1**
2. Pada TA 2021, terdapat penyetoran Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp97.106.550,00, yang terdiri atas piutang dari PT Protelindo sebanyak 30 buah menara telekomunikasi selama periode tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp95.994.450,00 yang disetor pada 04 Februari 2021 dan piutang dari PT Telkomsel sebanyak 1 (satu) buah menara telekomunikasi sebesar Rp1.112.100,00.yang dihapuskan berdasarkan SK Nomor 680/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021. Disamping itu, terdapat sisa Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2014 sebesar Rp49.217.943,00 atas 4 (empat) menara telekomunikasi yang tidak diketahui kepemilikannya.
3. Piutang retribusi jasa usaha kayu sebesar Rp487.191.300,00 merupakan piutang retribusi jasa usaha kayu tahun 2014 pada PT Panply.
4. Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa alat berat pada dinas PUPR tahun 2020 sebesar Rp365.850.000,00 yang telah seluruhnya disetor ke kas daerah.
5. Piutang retribusi tempat rekreasi olah raga pada dinas Pariwisata tahun 2020 sebesar Rp6.400.000,00 merupakan *voucher* wisata yang telah disetor seluruhnya ke kas daerah.



5.3.1.1.11 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp5.996.278.246,00 dan Rp5.306.726.006,00. Piutang tahun 2020 sebesar Rp5.306.726.006,00 merupakan pembagian dividen atas penyertaan modal pada Bank BPD SulSelbar berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT BPD SulSelbar pada RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diterima pada tanggal 09 Juli 2021.

5.3.1.1.12 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp12.062.000.759,00 merupakan piutang Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap pihak ketiga selain piutang pajak dan retribusi dimana nilai ini terdiri atas saldo denda keterlambatan tahun 2014 sebesar Rp23.933.847,00; Saldo piutang BLUD jasa pelayanan Kesehatan sebesar Rp12.038.057.912,00; dan Saldo piutang lebih salur Dana ADD sebesar Rp9.000,00.

Saldo piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp12.062.000.759,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.484.435.367,00 atau sebesar 163,50% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp4.577.565.392,00 dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.56
Rekap Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Denda keterlambatan	23.933.847,00	23.933.847,00	0,00	100,00
2	Piutang BLUD	12.038.057.912,00	4.536.896.545,00	7.501.161.367,00	165,34
3	Piutang Kartu KEUR	0,00	16.735.000,00	(16.735.000,00)	(100,00)
4	Piutang Lebih Salur Dana ADD	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		12.062.000.759,00	4.577.565.392,00	7.484.435.367,00	163,50
Jumlah Penyisihan Piutang		(222.936.348,20)	(77.670.562,24)	(145.265.785,96)	187,03
Nilai Bersih Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		11.839.064.410,80	4.499.894.829,76	7.339.169.581,04	163,10

Adapun Daftar Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 3.3**.

5.3.1.1.13 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Luwu dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp50,00. Saldo ini merupakan kurang salur Dana Bagi Hasil Kehutanan Tahun 2010.



5.3.1.1.14 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Luwu yang belum diterima sebelum penyisihan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 20.160.296.960,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.761.176.395,00 atau sebesar 62,59% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp12.399.120.565,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.57
Rekap Piutang Transfer Antar Daerah

(dalam Rupiah)					
No	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	3.254.747.054,00	6.633.004.603,00	(3.378.257.549,00)	(50,93)
2	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.905.549.906,00	5.766.115.962,00	11.139.433.944,00	193,19
Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah		20.160.296.960,00	12.399.120.565,00	7.761.176.395,00	62,59
Jumlah Penyisihan Piutang Nilai Bersih Piutang Transfer Antar Daerah		(100.801.484,80)	(61.995.652,83)	(38.805.831,98)	62,59
		20.059.495.475,20	12.337.124.912,18	7.722.370.563,03	62,59

Penjelasan Piutang Transfer Antar Daerah sebagai berikut :

1. Pada piutang transfer bagi hasil dari pemerintah provinsi terdapat penambahan piutang pajak rokok tahun 2021 sebesar Rp3.254.747.054,00 merupakan pajak rokok untuk triwulan 4 tahun 2021 yang belum diterima hingga 31 Desember 2021. Sedangkan piutang tahun 2020 sebesar Rp5.790.440.949,00 telah diterima pada tanggal 29 Januari 2021, adapun koreksi sebesar Rp842.563.654,00 merupakan koreksi salah catat penetapan pajak rokok untuk bulan Desember 2020 yang dibayarkan pada 29 Januari 2021 berdasarkan SK Nomor 1317/V/Tahun2021.
2. Terdapat penambahan piutang transfer bagi hasil dari pemerintah provinsi atas Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Bahan Bakar, Air Permukaan PDAM, dan Air Permukaan Bakaru/Sawitto Tahun 2021 sebesar Rp16.905.549.906,00. Sedangkan piutang Tahun 2020 sebesar Rp5.766.115.962,00 telah terbayar pada tanggal 29 Januari 2021.

Adapun rincian Piutang Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 3.4**.

5.3.1.1.15 Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan piutang Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap pihak yang telah menandatangani persetujuan SKTJM untuk mengganti rugi kerugian daerah dan belum direalisasikan pembayarannya hingga per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan saldo sebelum penyisihan sebesar Rp278.409.815,00 dan Rp79.582.310,00 dengan rincian pada **Lampiran 4**.



5.3.1.1.16 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang dapat terealisasi selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan, dengan tarif penyisihan yang telah diatur pada Kebijakan Akuntansi No. 132 Tahun 2019 terkait Klasifikasi piutang dan penyisihan piutang tak tertagih. Jumlah Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp8.654.596.768,00 dan Rp8.585.939.627,57 dengan rincian berikut.

Adapun rincian penyisihan piutang Pemkab Luwu per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Tabel 5.58
Rekap Penyisihan Piutang

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
1	2	3	4
1	Penyisihan Piutang Pajak	7.732.394.493,24	7.873.579.828,12
	a. Pajak Hotel	8.500.000,00	8.500.000,00
	b. Pajak Restoran	107.445.000,00	107.445.000,00
	c. Pajak Reklame	40.090.350,02	40.161.977,50
	d. Pajak Air Bawah Tanah	0,00	2.000,00
	e. Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan	522.972.839,34	523.655.475,83
	f. PBB	7.048.339.084,66	6.812.107.908,78
	g. Pajak Penerangan Jalan	5.047.219,22	86.738.377,81
2	Penyisihan Piutang Retribusi	538.958.966,00	540.876.260,25
	a. Pengendalian Menara	49.217.943,00	49.703.475,75
	b. Jasa Usaha Kayu	487.191.300,00	487.191.300,00
	c. Pelayanan Kesehatan	2.524.723,00	2.120.234,50
	d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25.000,00	1.829.250,00
	e. Retribusi Tempat Rekreasi Olah Raga	0,00	32.000,00
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	222.936.348,20	77.670.562,24
	a. Denda keterlambatan	23.933.847,00	23.933.847,00
	b. Piutang BLUD	199.002.456,20	53.653.040,24
	c. Piutang Penjualan Kartu KEUR	0,00	83.675,00
	d. Piutang Lebih Salur	45,00	0,00
4	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	100.801.484,80	61.995.652,83
	a. Piutang Dana Bagi Hasil 2013	0,00	50,00
	b. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak kendaraan Bermotor	16.273.735,27	28.830.579,81
	c. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	84.527.749,53	33.165.023,02
5	Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	29.981.391,23	26.533.630,03
	a. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Sah	29.981.391,23	26.533.630,03
7	Penyisihan Piutang Lainnya	29.524.084,53	5.283.694,10
	a. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	29.524.084,53	5.283.694,10
	Total Penyisihan Piutang	8.654.596.768,00	8.585.939.627,57

5.3.1.1.17 Beban Dibayar Di Muka

Saldo Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2021 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2021 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Luwu. Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 sebesar 144.790.837,87 mengalami



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kenaikan sebesar Rp144.412.755,68 atau sebesar 38.196,13% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp378.082,19. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Tabel 5.59
Rekap Beban Dibayar Dimuka

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Beban Dibayar Dimuka Lainnya				
-	Beban Sewa Rumah Tunggu Kelahiran	2.500.000,00	378.082,19	2.121.917,81	561,23
2	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor				
-	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	142.290.837,87	0,00	142.290.837,87	0,00
	Jumlah Beban dibayar Dimuka	144.790.837,87	378.082,19	144.412.755,68	38.196,13

5.3.1.1.18 Persediaan

Persediaan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.934.581.186,51 mengalami penurunan sebesar Rp11.838.534.823,53 atau 47,79% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 Rp24.773.116.010,04 yang terdiri atas:

Tabel 5.60
Rincian Persediaan

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Bahan	70.142.700,00	0,00	70.142.700,00	100,00
a	Bahan Lainnya	70.142.700,00	0,00	70.142.700,00	100,00
1	Suku Cadang	1.576.659.793,86	1.455.368.812,45	121.290.981,41	8,33
a	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.165.689.173,99	903.518.792,53	262.170.381,46	29,02
b	Suku Cadang Alat Laboratorium	410.970.619,87	382.310.464,92	28.660.154,95	7,50
c	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	169.539.555,00	(169.539.555,00)	(100,00)
2	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	754.583.938,07	990.694.537,66	(236.110.599,59)	(23,83)
a	Alat Tulis Kantor	3.282.699,07	25.987.090,00	(22.704.390,93)	(87,37)
b	Kertas dan Cover	5.987.239,00	3.747.400,00	2.239.839,00	59,77
c	Bahan Cetak	703.121.300,00	796.177.550,00	(93.056.250,00)	(11,69)
d	Bahan Komputer	37.883.600,00	2.863.100,00	35.020.500,00	1.223,17
e	Alat Listrik	4.309.100,00	0,00	4.309.100,00	0,00
f	Perabot Kantor	0,00	1.657.000,00	(1.657.000,00)	(100,00)
g	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor	0,00	14.887.821,00	(14.887.821,00)	(100,00)
h	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	320.000,00	(320.000,00)	(100,00)
i	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	145.054.576,66	(145.054.576,66)	(100,00)
3	Obat-Obatan	10.146.409.985,58	8.883.718.535,93	1.262.691.449,65	14,21
a	Obat	10.146.409.985,58	8.883.718.535,93	1.262.691.449,65	14,21
4	Persediaan Untuk Tujuan Berjaga-jaga	200.744.725,00	0,00	200.744.725,00	100,00
a	Persediaan Untuk Tujuan Berjaga-jaga	200.744.725,00	0,00	200.744.725,00	100,00
5	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	133.630.244,00	13.443.334.124,00	(13.309.703.880,00)	(99,01)
a	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	133.630.244,00	13.443.334.124,00	(13.309.703.880,00)	(99,01)
6	Natura dan Pakan	52.409.800,00	0,00	52.409.800,00	100,00



Tabel 5.60
Rincian Persediaan

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
a	Natura dan Pakan Lainnya	52.409.800,00	0,00	52.409.800,00	100,00
JUMLAH PERSEDIAAN		12.934.581.186,51	24.773.116.010,04	(11.838.534.823,53)	(47,79)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu No. 132 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu bahwa pengakuan persediaan dengan menggunakan pendekatan beban dan metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah secara Periodik berdasarkan hasil inventarisasi opname Inspektorat, sedangkan metode penilaian yang digunakan adalah metode harga pembelian terakhir untuk barang habis pakai termasuk Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat dan menggunakan FIFO (*First in First Out*) untuk barang persediaan obat-obatan.

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD per 31 Desember 2021. Rekapitulasi dan Rincian Persediaan per- SKPD dijelaskan pada **Lampiran 6**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu dan investasi permanen lainnya.

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp55.569.713.837,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.507.603.447,00 atau sebesar 2,79% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp54.062.110.390,00 terdiri atas:

Tabel 5.61
Rincian Investasi Jangka Panjang

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Investasi jangka Panjang Non Permanen	31.484.625,00	243.766.800,00	(212.282.175,00)	(87,08)
2	Investasi jangka Panjang Permanen	55.538.229.212,00	53.818.343.590,00	1.719.885.622,00	3,20
Jumlah Investasi Jangka Panjang		55.569.713.837,00	54.062.110.390,00	1.507.603.447,00	2,79



5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu berupa dana yang disisihkan oleh Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemerintah Kabupaten Luwu merupakan Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2021 dengan nilai bersih setelah dikurangi penyisihan dana bergulir yang diragukan tertagih sebesar Rp31.484.625,00 dan Rp243.766.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62
Rincian Dana Bergulir

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Ekonomi	1.195.295.459,53	1.195.295.459,53	0,00	0,00
	- Bagian Ekonomi TA 2001	376.941.663,53	376.941.663,53	0,00	0,00
	- Bagian Ekonomi TA 2002	136.187.121,00	136.187.121,00	0,00	0,00
	- Bagian Ekonomi TA 2003	216.853.191,00	216.853.191,00	0,00	0,00
	- Bagian Ekonomi TA 2004	465.313.484,00	465.313.484,00	0,00	0,00
2	Dinas Perikanan dan Kelautan 2001-2004	139.528.845,00	139.528.845,00	0,00	0,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi TA 2007	514.133.800,00	514.133.800,00	0,00	0,00
4	Dinas Koperasi & UMKM	1.415.214.500,00	1.415.214.500,00	0,00	0,00
	- Dinas Koperasi & UMKM TA 2009	1.205.317.000,00	1.205.317.000,00	0,00	0,00
	- Dinas Koperasi & UMKM TA 2010	209.897.500,00	209.897.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.264.172.604,53	3.264.172.604,53	0,00	0,00
5	Penyisihan Dana Bergulir yang diragukan Ditagih	(3.232.687.979,53)	(3.020.405.804,53)	(212.282.175,00)	7,03
	Jumlah Dana Bergulir	31.484.625,00	243.766.800,00	(212.282.175,00)	(87,08)

Saldo dana bergulir sebesar Rp514.133.800,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi TA 2007 telah di diambil alih oleh inspektorat karena adanya reorganisasi sehingga Nomenklatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dihilangkan. Atas dana bergulir tersebut akan diinventarisir dan disiapkan proses penghapusannya.

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Dana Bergulir) Pemkab Luwu per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **lampiran 7**.



5.3.1.2.1.2 Penyisihan Dana Bergulir

Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang dimiliki Pemda Kabupaten Luwu sudah tidak dapat dikelola secara maksimal dari segi penagihan maupun penerimaannya. Pada tahun 2013 oleh Tim verifikasi Inspektorat telah dilakukan pendataan ulang dalam upaya penagihan kembali untuk semua objek penerima dana bergulir sejak tahun 2001 hingga 2010 di 4 (empat) SKPD yang menyalurkan dana bergulir yang mana pendataan tersebut mencakup mengenai kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi dana bergulir ini dilihat dari aspek usaha. Berdasarkan hal di atas ditemukan bahwa proses pengembalian pinjaman terhambat dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. Peminjam telah meninggal dunia. Ahli waris tidak mengetahui pinjaman tersebut sehingga tidak bersedia untuk bertanggung jawab;
2. Usaha peminjam pindah alamat keluar kota dan alamat tidak terdeteksi;
3. Usaha peminjam tutup dan tidak sanggup untuk melakukan pengembalian;
4. Peminjam mengakui telah melunasi, namun tidak dapat menunjukkan bukti pelunasan (kuitansi). Sementara data yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Luwu tidak terdapat pembayaran sesuai rekening koran bank; dan/atau
5. Peminjam mengakui telah melunasi dan menunjukkan bukti pelunasan (kuitansi) namun tidak terdapat penyetoran ke kas daerah (indikasi disalahgunakan oleh pengelola dana bergulir).

Hal ini menyebabkan saldo pengembalian dana bergulir yang diharapkan tidak sesuai dengan realisasi pengembalian hingga melewati batas akhir jatuh tempo pengembalian dana bergulir. Berdasarkan verifikasi data di lapangan penyisihan dana bergulir yang diragukan ditagih telah dilakukan sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 yang mengatur tentang Dana Bergulir dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 132 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu maka dilakukan penyisihan investasi non permanen dana bergulir tidak tertagih berdasar atas investasi non permanen dana bergulir sebagai berikut:

Tabel 5.63
Rincian Penyisihan Dana Bergulir

(Dalam Rupiah)

No. 1	Uraian 2	2021 3	2020 4
1	Bagian Ekonomi	1.195.295.459,53	1.195.295.459,53
	- Bagian Ekonomi TA 2001	376.941.663,53	376.941.663,53
	- Bagian Ekonomi TA 2002	136.187.121,00	136.187.121,00
	- Bagian Ekonomi TA 2003	216.853.191,00	216.853.191,00
	- Bagian Ekonomi TA 2004	465.313.484,00	465.313.484,00
2	Dinas Perikanan dan Kelautan 2001-2004	139.528.845,00	139.528.845,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi TA 2007	514.133.800,00	514.133.800,00
4	Dinas Koperasi & UMKM	1.383.729.875,00	1.171.447.700,00



Tabel 5.63
Rincian Penyisihan Dana Bergulir
 (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
1	2	3	4
	- Dinas Koperasi & UMKM TA 2009	1.205.317.000,00	1.024.519.450,00
	- Dinas Koperasi & UMKM TA 2010	178.412.875,00	146.928.250,00
	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	3.232.687.979,53	3.020.405.804,53

Sesuai Buletin Teknis Akuntansi Nomor 7 yang mengatur tentang Dana Bergulir dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 132 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu maka dana bergulir disajikan berdasar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Perincian dana bergulir berdasarkan tahun penyaluran dapat dilihat pada **Lampiran 7.1 s.d 7.8**. Penyajian dana bergulir secara nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.64
Rincian Nilai Bersih Dana Bergulir
 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
1	2	3	4
1	Bagian Ekonomi	0,00	0,00
	- Bagian Ekonomi TA 2001	0,00	0,00
	- Bagian Ekonomi TA 2002	0,00	0,00
	- Bagian Ekonomi TA 2003	0,00	0,00
	- Bagian Ekonomi TA 2004	0,00	0,00
2	Dinas Perikanan dan Kelautan 2001-2004	0,00	0,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi TA 2007	0,00	0,00
4	Dinas Koperasi & UMKM	31.484.625,00	243.766.800,00
	- Dinas Koperasi & UMKM TA 2009	0,00	180.797.550,00
	- Dinas Koperasi & UMKM TA 2010	31.484.625,00	62.969.250,00
	Jumlah Nilai Bersih Dana Bergulir	31.484.625,00	243.766.800,00

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Luwu berupa investasi permanen yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 sebesar Rp55.538.229.212,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.719.885.622,00 atau sebesar 3,20% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp53.818.343.590,00 sebagai berikut:

Tabel 5.65
Rincian Investasi Jangka Panjang
 (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	PT Bank Sulsel	16.172.000.000,00	16.172.000.000,00	0,00	0,00
2	PDAM Tirta Dharma	39.366.229.211,00	37.646.343.589,00	1.719.885.622,00	4,57
3	Perusda Kabupaten Luwu	1,00	1,00	0,00	0,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	55.538.229.212,00	53.818.343.590,00	1.719.885.622,00	3,20



1. Penyertaan Modal Pada PT. Bank Sulselbar

Saldo Investasi pada PT. Bank Sulsel tidak mengalami penambahan sejak tahun 2019 senilai Rp16.172.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal berbentuk saham atau menguasai 1,06% kepemilikan PT. Bank Sulsel. Selain nilai Penyertaan Modal Pemkab Luwu sebesar Rp16.172.000.000,00, terdapat penambahan nilai Penyertaan Modal sebesar Rp16.633.000.000,00 atau senilai 2,84% karena adanya Perubahan nilai Saham Pemkab Luwu berdasarkan Laporan daftar perincian Komposisi Kepemilikan Modal Disetor Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sulselbar yang dikeluarkan oleh PT Bank Sulselbar.

Penyertaan modal disajikan menggunakan metode biaya (*cost method*) yaitu sebesar harga perolehan. Bagi hasil berupa dividen yang diterima Pemda untuk laba Tahun Buku 2021 adalah sebesar Rp5.306.726.006,00 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.220.161.952,00.

2. Penyertaan Modal pada PDAM

Saldo Penyertaan Modal pada PDAM per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp39.366.229.211,00 dan Rp37.646.343.589,00 merupakan akumulasi dari nilai penyertaan modal Pemerintah Kab Luwu tahun 2021 sebesar Rp4.317.000.000,00 dan rugi bersih PDAM tahun 2021 sebesar (Rp2.597.114.378,00). Saldo atas penyertaan modal pada PDAM berdasarkan metode ekuitas (kepemilikan 100%) yaitu sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Laporan Hasil Pemeriksaan KAP Khairunnas Nomor 00006/2.1084/AU.2/10/0799-I/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 menyajikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. dengan perincian kekayaan bersih PDAM per 31 Desember 2021 tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.66
Nilai Penyertaan Modal ke PDAM

(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Penyertaan Modal Pemkab Luwu	Akumulasi Laba (Rugi)	Penyertaan Modal Per 31 Des 2021
1	2	3	4	5
1	2006	688.830.839,00	(1.374.407.114,09)	(685.576.275,09)
2	2007	0,00	(1.254.589.759,24)	(1.254.589.759,24)
3	Modal Hibah 2008	80.000.000,00	(987.061.343,42)	(907.061.343,42)
4	2009	0,00	(931.433.753,34)	(931.433.753,34)
5	2010	0,00	(766.694.716,39)	(766.694.716,39)
6	Koreksi KAP	0,00	53.895.608,48	53.895.608,48
7	2011	0,00	(1.071.719.531,00)	(1.071.719.531,00)
8	2012	0,00	(991.364.573,00)	(991.364.573,00)
9	2013	0,00	(1.278.175.213,00)	(1.278.175.213,00)
10	Koreksi KAP	31.890.302.394,00	(2.152.609.644,00)	29.737.692.750,00
11	2014	32.659.133.233,00	(10.754.160.039,00)	21.904.973.194,00
13	2015	41.152.133.233,00	(12.912.058.255,00)	28.240.074.978,00
15	2016	47.152.133.233,00	(15.496.449.959,00)	31.655.683.274,00



Tabel 5.66
Nilai Penyertaan Modal ke PDAM

No	Tahun	Penyertaan Modal Pemkab Luwu	Akumulasi Laba (Rugi)	(Dalam Rupiah)	
				Penyertaan Modal Per 31 Des 2021	
1	2	3	4	5	
17	2017	53.152.133.233,00	(18.030.262.824,00)	35.121.870.409,00	
18	2018	57.652.133.233,00	(21.167.145.629,00)	36.484.987.604,00	
19	2019	60.652.133.233,00	(23.634.187.730,00)	37.017.945.503,00	
20	2020	63.652.133.233,00	(26.005.789.644,00)	37.646.343.589,00	
21	2021	67.969.133.233,00	(28.602.904.022,00)	39.366.229.211,00	

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada PDAM Tirta Dharma per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **lampiran 8** dan **Lampiran 8.1**.

3. Penyertaan Modal Investasi Pada Perusda

Saldo Investasi pada Perusda sebesar Rp500.000.000,00 merupakan penyertaan modal bukan berbentuk saham. Penyertaan modal disajikan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Laporan Keuangan Perusda tahun buku 2012 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dengan Nomor 017/AU/KAP-MS/VII/2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik pada lembar terakhir terdapat hal-hal yang menjadi catatan sehingga diketahui bahwa Perusda sudah tidak beroperasi sejak Januari 2013 dan mengalami kerugian sehingga berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik akan dikaji lebih lanjut tentang keberadaan Perusda secara Legalitas.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.759.782.369.435,40 dan Rp3.509.936.994.117,45 sebelum akumulasi penyusutan sebesar (Rp1.341.503.275.475,18) tahun 2021 dan (Rp1.024.374.624.677,33) tahun 2020, sehingga Nilai Aset Tetap setelah Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.418.279.093.960,22 dan Rp2.485.562.369.440,12.

Aset tetap sebelum penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.759.782.369.435,40 mengalami kenaikan sebesar Rp249.845.375.317,95 atau sebesar 7,12% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.509.936.994.117,45 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67
Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	2021	2020	(dalam Rupiah)	
				Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	406.813.392.578,00	407.498.291.538,00	(684.898.960,00)	(0,17)
2	Peralatan dan Mesin	552.777.043.600,42	532.184.863.103,89	20.592.180.496,53	3,87
3	Gedung dan Bangunan	1.020.372.163.216,20	981.003.101.719,12	39.369.061.497,08	4,01
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.653.669.071.852,11	1.460.796.980.345,77	192.872.091.506,34	13,20
5	Aset Tetap Lainnya	93.441.466.806,21	87.641.523.089,21	5.799.943.717,00	6,62



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6	Konstruksi dalam Pengerjaan	32.709.231.382,46	40.812.234.321,46	(8.103.002.939,00)	(19,85)
	Jumlah Aset Tetap	3.759.782.369.435,40	3.509.936.994.117,45	249.845.375.317,95	7,12
	Akumulasi Penyusutan 2021	(1.341.503.275.475,18)	(1.024.374.624.677,33)	(317.128.650.797,85)	30,96
	Nilai Buku Aset Tetap	2.418.279.093.960,22	2.485.562.369.440,12	(67.283.275.479,90)	(2,71)

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat didistribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung yaitu Biaya Administrasi, Biaya Perencanaan, Biaya Pengawasan, Biaya Kepanitiaan.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi, Bidang Aset dan SKPD terkait kesesuaian nilai dan jumlah Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dengan nilai aset yang disajikan pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021, terdapat mutasi Penambahan dan Pengurangan nilai Aset Tetap yang cukup signifikan dan mempengaruhi pencatatan nilai aset di Laporan Keuangan Tahun 2021 ini selain penambahan dari belanja modal antara lain:

1. Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah telah diterapkan pada pencatatan aset tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Per 31 Desember 2020. Namun masih banyak juga penyesuaian penggolongan jenis barang yang ditemukan pada pencatatan aset tahun 2021. Pengaruh penerapan permendagri 108 tersebut menyebabkan banyaknya barang yang berpindah antar KIB atau reklasifikasi mengikuti penggolongan dan kodefikasi barang yang terbaru.
2. DPA SKPD tahun 2021 telah mengakomodir perubahan penggolongan dan kodefikasi barang sesuai Permendagri No 108 tahun 2016 berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga diperlukan penyesuaian dalam pencatatan akuntansi dalam laporan keuangan Pemda Kabupaten Luwu.
3. Terdapat kesalahan atau kurang catat nilai perolehan aset pada tahun-tahun sebelumnya sehingga menambah atau mengurangi nilai aset tetap Pemda Kabupaten Luwu.
4. Terdapat perlakuan *extracomptabel* atas aset dibawah minimal kapitalisasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Aset tetap untuk aset yang diperoleh Tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya sehingga mengurangi nilai aset tetap Pemda Kabupaten Luwu.



5. Terdapat Penambahan Aset dari Belanja Dana BOS, Dana JKN Kapitasi, dan yang bersumber dari BLUD RSUD Batara Guru. Aset tersebut sudah tercatat dalam aplikasi SIMDA Barang dan menjadi bagian dari aset Pemda Luwu sehingga secara keseluruhannya mempengaruhi penambahan dalam aset tetap Pemda Kabupaten Luwu. Selain itu pada mutasi Dana BOS terdapat pengurangan mutasi koreksi terhadap aset yang berasal dari penerima Dana BOS Sekolah Swasta.
6. Pada Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Metode Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap Pemda Luwu dijelaskan prosedur dan metode penyusutan yang diterapkan pada Aset Tetap Pemda Luwu mulai 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020 untuk menghitung beban penyusutan tahun berjalan dan Koreksi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, sehingga secara keseluruhan mempengaruhi pengurangan dalam aset tetap Pemda Kabupaten Luwu.
7. Terdapat aset tanah yang disewakan kepada pihak ketiga yang seharusnya dikategorikan aset lainnya. Namun mengingat aset yang disewakan menempati sebagian dari aset yang masih digunakan oleh entitas Pemerintah Kabupaten Luwu dan dokumen kepemilikan masih menyatu dengan dokumen induk maka tetap dicatat sebagai aset tetap tanah. Aset-aset tanah tersebut yaitu:

Tabel 5.68
Daftar Aset tanah yang disewakan

(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	Awal Kontrak	Jatuh Tempo
1	2	3	4
1	Sewa Lahan ATM BNI - Sekretariat Daerah	02 Januari 2020	01 Januari 2025
2	Sewa Lahan ATM BRI-Sekretariat Daerah	01 September 2018	31 Agustus 2023
3	Sewa Lahan ATM BNI - RSUD Batara Guru	20 Oktober 2019	19 Oktober 2024
4	Sewa Lahan ATM BRI - RSUD Batara Guru	16 Januari 2020	15 Januari 2021
5	Sewa Lahan ATM BPD-RSUD Batara Guru	29 Agustus 2018	29 Agustus 2023
6	Sewa Lahan Telkomsel - Dinas Pariwisata	13 November 2018	12 November 2023

Adapun rincian mutasi aset tetap dapat dilihat per-SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

5.3.1.3.1 Tanah

Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp406.813.392.578,00 dan Rp407.498.291.538,00. Nilai aset Tanah ini sudah termasuk dengan aset tanah di bawah Jalan dan Irigasi dengan perincian per SKPD pada **lampiran 9**, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	407.498.291.538,00
Mutasi Penambahan	Rp	1.862.249.520,00
Mutasi Pengurangan	Rp	2.547.148.480,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	406.813.392.578,00

Rincian penambahan Aset Tanah sejumlah Rp1.862.249.520,00 terdiri dari :

Realisasi Belanja Modal	Rp	71.067.680,00
Penambahan Mutasi KIB	Rp	55.662.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penambahan Mutasi SKPD	Rp	23.618.800,00
Penambahan Hibah	Rp	1.711.901.040,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	1.862.249.520,00

Penjelasan atas penambahan nilai Aset Tanah sebagai berikut :

1. Penambahan belanja modal sebesar Rp71.067.680,00 pada Dinas Pertanahan;
2. Penambahan Mutasi KIB sebesar Rp55.662.000,00 pada Sekretariat Daerah ;
3. Penambahan mutasi SKPD sebesar Rp23.618.800,00 pada Dinas PUPR berasal dari Sekretariat Daerah;
4. Penambahan Hibah sebesar Rp1.711.901.040,00 dengan rincian
 - a. Hibah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.795.620 terdiri dari Polindes Lamasi Kelurahan Lamasi Kec. Lamasi dengan Nomor Sertifikat 20.08.11.01.4.00012 sebesar Rp2.199.620,00; Posyandu Desa Pabbarassang Kec. Bua dengan Sertifikat Nomor 20.08.06.14.4.00004 sebesar Rp3.600.000,00; Pustu Belopa Desa Belopa Kec. Belopa dengan Nomor sertifikat 20.08.04.04.4.00008 sebesar Rp3.996.000;
 - b. Hibah sebesar Rp234.576.000,00 dari masyarakat pada Dinas Sosial berdasarkan sertifikat Nomor 20.08.06.14.4.00003 tanggal 22 Desember 2020;
 - c. Hibah sebesar Rp60.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dari masyarakat Desa Sampeang berdasarkan sertifikat Nomor 20.08.02.05.4.00003 tanggal 29 Desember 2021;
 - d. Hibah sebesar Rp150.881.000,00 pada Dinas Kepemudaan Dan Olah raga terdiri dari hibah tanah lapangan sepak bola Desa Tabah Kec. Walenrang Timur sebesar Rp124.026.000,00 berdasarkan sertifikat Nomor 20.08.19.02.4.00003 dan hibah tanah lapangan sepak bola Desa Ilan Batu Kec. Walenrang Barat sebesar Rp26.855.000,00 dengan Nomor Sertifikat 20.08.18.01.4.00004;
 - e. Hibah jalan produksi sebesar Rp449.094.000,00 pada Dinas Perikanan terdiri dari hibah Kepala Desa Salu Paremang berdasarkan BA Nomor./DS-SP/K-K/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 sebesar Rp130.000.000,00; hibah dari Kepala Desa Muladimeng Kec. Ponrang berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor 374/KP/DS.MD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp20.020.000,00; hibah dari Kepala Desa Wara Kec. Kamanre berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor 3/DS-WR/K-K/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp201.600.000,00; hibah dari Kepala Desa Pompengan Pantai Kec. Lamasi Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor 018/K-LT/DS.PP/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 sebesar Rp47.424.000,00; hibah dari Kepala Desa Murante berdasarkan Surat



Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp.50.050.000,00;

- f. Hibah sebesar Rp 867.365.720,00 pada dinas Perdagangan dari Pasar Desa Wiwitan Timur berdasarkan sertifikat Nomor 20.08.11.10.4.00001 tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp661.618.520,00 Pasar Keppe Desa Rantebelu Kec. Larompong berdasarkan sertifikat Nomor 20.08.10.09.4.00005 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp205.747.200,00;
- g. Hibah sebesar Rp128.700,00 pada Kecamatan Ponrang dari Hibah masyarakat berdasarkan BA Nomor 135/HB/PRG/IX/2020 tanggal 18 September 2020.

Rincian pengurangan aset Tanah sejumlah Rp2.547.148.480,00 terdiri dari :

Pengurangan Mutasi Koreksi	Rp	804.800.000,00
Pengurangan Mutasi KIB	Rp	126.729.680,00
Pengurangan Mutasi SKPD	Rp	23.618.800,00
Mutasi ke Aset Lainnya	Rp	1.592.000.000,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	2.547.148.480,00

Penjelasan atas pengurangan nilai Aset Tanah sebagai berikut :

1. Pengurangan Mutasi Koreksi sebesar Rp804.800.000,00 pada Dinas PUPR merupakan penghapusan atas tanah Kantor Dinas PU yang lama yang berada di Kota Palopo berdasarkan SK Bupati Luwu Nomor 39 Tahun 2003 tentang pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Luwu ke Pemerintah Kota Palopo tanggal 10 September 2003 dan Berita Acara Penyerahan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu ke Pemerintah Kota Palopo Nomor 028/006/IX/UMPER/03 tanggal 18 September 2003.
2. Pengurangan Mutasi KIB sebesar Rp126.729.680,00 terdiri atas mutasi KIB sebesar Rp 71.067.680,00 pada dinas pertanahan berpindah KIB ke Konstruksi Dalam Pengerjaan; mutasi KIB sebesar Rp 55.662.000,00 pada Sekretariat Daerah mutasi pada KIB tanah
3. Pengurangan Mutasi SKPD sebesar 23.618.800.000,00 pada Sekretariat Daerah yang di mutasi ke Dinas PUPR.
4. Mutasi ke Aset Lainnya sebesar Rp1.592.000.000,00 merupakan mutasi Tanah pada Dinas perdagangan yang dipihak ketiga-kan sebesar Rp800.000.000,00 pada Pasar Padang Sappa dan sebesar Rp792.000.000,00 pada Pasar Sentral Lamasi.



5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp552.777.043.600,42 dan Rp532.184.863.103,89. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp430.087.359.436,63) dan (Rp373.333.823.556,36) sehingga Nilai Buku Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp122.689.684.163,79 dan Rp158.851.039.547,53 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.69
Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan Mesin

(dalam Rupiah)					
No.	SKPD	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Alat-Alat Berat	29.829.187.082,97	33.427.929.082,97	(3.598.742.000,00)	(10,77)
2	Alat-Alat Angkutan	124.806.731.771,02	121.462.265.029,02	3.344.466.742,00	2,75
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.229.037.826,63	2.360.192.226,65	(131.154.400,02)	(5,56)
4	Alat Pertanian dan Peternakan	9.805.817.119,65	9.431.123.853,65	374.693.266,00	3,97
5	Alat Kntr dan Rumah Tangga	109.243.894.891,70	102.441.799.458,78	6.802.095.432,92	6,64
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	10.677.989.694,91	10.377.340.476,91	300.649.218,00	2,90
7	Alat Kedokteran	131.871.856.274,15	136.953.560.404,16	(5.081.704.130,00)	(3,71)
8	Alat Laboratorium	47.048.025.881,36	48.673.053.003,73	(1.625.027.122,37)	(3,34)
9	Alat Keamanan	0,00	395.098.960,00	(395.098.960,00)	(100,00)
10	Komputer	77.613.041.197,05	58.182.430.296,04	19.430.610.901,01	33,40
11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Alat Pengeboran	19.919.000,00	0,00	19.919.000,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	32.000.000,00	7.000.000,00	25.000.000,00	357,14
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	1.789.996.549,00	1.428.149.550,00	361.846.999,00	25,34
16	Alat Peraga	132.106.150,00	0,00	132.106.150,00	0,00
17	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
18	Rambu-Rambu	6.337.912.155,98	5.723.569.755,98	614.342.400,00	10,73
19	Peralatan olahraga	1.338.528.006,00	1.320.351.006,00	18.177.000,00	1,38
	Jumlah Aset Peralatan Mesin	552.777.043.600,42	532.184.863.103,89	20.592.180.496,53	3,87
	Akumulasi Penyusutan	(430.087.359.436,63)	(373.333.823.556,36)	(56.753.535.880,27)	15,20
	Nilai Buku Aset Peralatan Mesin	122.689.684.163,79	158.851.039.547,53	(36.161.355.383,74)	19,07

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per-SKPD dapat dilihat pada lampiran 9. Mutasi aset peralatan mesin tersebut diuraikan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	532.184.863.104,87
Mutasi Penambahan	Rp	82.863.477.769,96
Mutasi Pengurangan	Rp	62.271.297.274,41
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	552.777.043.600,42

Rincian penambahan aset Peralatan dan Mesin sejumlah Rp82.863.477.769,96 terdiri dari :



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Belanja Modal	Rp	35.459.338.181,00
Realisasi BM dana BOS/JKN/BLUD	Rp	3.948.198.022,00
Penambahan Mutasi Koreksi	Rp	337.995.788,94
Penambahan Mutasi KIB	Rp	29.044.606.692,00
Penambahan Mutasi SKPD	Rp	9.984.901.547,02
Penambahan Hibah	Rp	4.088.437.539,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	82.863.477.769,96

Penjelasan atas rincian penambahan aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

1. Penambahan belanja modal sebesar Rp35.459.338.181,00 merupakan belanja modal yang bersumber dari APBD;
2. Penambahan aset yang bersumber dari dana JKN dan BLUD sebesar Rp3.948.198.022,00 dengan JKN Kapitasi sebesar Rp1.623.820.000,00 dan BLUD sebesar Rp2.324.378.022,00
3. Penambahan mutasi koreksi salah catat sebesar Rp337.995.788,94 terdiri dari

1 RSUD Batara Guru	Rp	7.575.000,00
2 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp	148.724.988,94
3 Dinas Perhubungan	Rp	32.000.000,00
4 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Rp	13.200.000,00
5 Dinas Perdagangan	Rp	39.427.800,00
6 Sekretariat Daerah	Rp	69.128.000,00
7 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	1.490.000,00
8 Kecamatan Basse Sangtempe	Rp	26.450.000,00
Jumlah	Rp	337.995.788,94

4. Penambahan mutasi KIB sebesar Rp29.044.606.692,00,00 terdiri atas:

1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp	20.379.378.999,00
2 Dinas Kesehatan	Rp	4.638.447.390,00
3 RSUD Batara Guru	Rp	2.357.247.120,00
4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp	24.800.000,00
5 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp	19.800.000,00
6 Dinas Sosial	Rp	2.500.000,00
7 Dinas Ketahanan Pangan	Rp	19.600.000,00
8 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rp	1.433.333,00
10 Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Rp	705.066.800,00
11	Rp	17.000.000,00
12 Dinas Pariwisata	Rp	58.270.000,00
13 Dinas Pertanian	Rp	14.812.050,00
14 Dinas Perdagangan	Rp	27.593.500,00
15 Sekretariat Daerah	Rp	442.165.000,00
16 Inspektorat	Rp	1.700.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah	Rp	60.446.000,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	3.800.000,00
19	Sekretariat DPRD	Rp	152.481.000,00
20	Kecamatan Bupon	Rp	34.648.000,00
21	Kecamatan Kamanre	Rp	13.724.000,00
22	Kecamatan Suli	Rp	18.520.000,00
23	Kecamatan Suli Barat	Rp	20.500.000,00
	Jumlah	Rp	29.044.606.692,00

5. Penambahan mutasi SKPD sebesar Rp9.984.901.547,02 terdiri atas:

1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp	232.100.000,00
2	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Rp	26.300.000,00
3	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	Rp	15.150.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Rp	457.199.800,00
5	Dinas Perhubungan	Rp	6.158.768.027,02
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan		
6	Persandian	Rp	252.400.000,00
7	Dinas Koperasi Ukm Dan Perindustrian	Rp	13.858.160,00
8	Sekretariat Daerah	Rp	502.370.000,00
	Inspektorat	Rp	14.562.000,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah	Rp	27.628.500,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	99.343.500,00
12	Badan Pendapatan Daerah	Rp	294.475.600,00
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya		
13	Manusia	Rp	777.450.000,00
14	Sekretariat DPRD	Rp	35.000.000,00
15	Kecamatan Bajo Barat	Rp	171.500.000,00
16	Kecamatan Basse Sangtempe	Rp	415.600.000,00
17	Kecamatan Belopa Utara	Rp	194.510.000,00
18	Kecamatan Suli Barat	Rp	235.000.000,00
	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan		
19	Masyarakat	Rp	61.685.960,00
	Jumlah	Rp	9.984.901.547,02

6. Jumlah Penambahan Hibah sebesar Rp 4.088.437.539,00 terdiri atas

- Hibah sebesar Rp 3.929.432.000,00 pada Dinas Pendidikan merupakan hibah atas barang LCD Proyektor/Infocus sebesar Rp.197.150.000,00 berupa aset Note Book sebesar Rp.3.681.000.000,00; Personal Komputer lainnya sebesar Rp.6.682.000,00; Modem sebesar Rp.44.600.000,00 yang berasal dari Kementerian Pendidikan Direktorat Sekolah Menengah Pertama berdasarkan BA nomor 1955/C/DM.01.02/2021, tanggal 28 Juni 2021;
- Hibah sebesar Rp 7.095.539,00 pada Dinas Sosial merupakan hibah barang Tenda dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan BA nomor; 460/0864/Sinsos, tanggal 16 Januari 2021;



- c. Hibah sebesar Rp 151.910.000,00 pada Dinas Perpustakaan berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.93.129.300,00; Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp.3.005.200,00; Komputer sebesar Rp.55.775.500,00 dari Perpustakaan Nasional berdasarkan BA nomor 4900/4.2/PLK.03.4/X/2021 Tanggal 19 Oktober 2021

Rincian Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin sejumlah Rp62.271.297.274,41
terdiri dari:

Pengurangan Mutasi Koreksi	Rp	217.260.000,03
Pengurangan Mutasi KIB	Rp	24.678.651.645,00
Pengurangan Mutasi SKPD	Rp	9.984.901.547,02
Pengurangan Mutasi ke Aset lainnya	Rp	23.887.187.157,36
Mutasi Extracomtable	Rp	3.503.296.925,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	62.271.297.274,41

Penjelasan atas rincian pengurangan aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan mutasi koreksi akibat salah catat sebesar Rp217.260.000,03 terdiri atas :

1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp	133.210.000,03
2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Rp	13.200.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah	Rp	31.500.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	1.490.000,00
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	37.860.000,00
	Jumlah	Rp	217.260.000,03

2. Pengurangan mutasi KIB sebesar Rp24.678.651.645,00 terdiri atas:

1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp	16.013.533.952,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	4.638.447.390,00
3	RSUD Batara Guru	Rp	2.374.137.120,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp	24.800.000,00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp	19.800.000,00
6	Dinas Sosial	Rp	2.500.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	Rp	19.600.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Rp	30.673.500,00
	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rp	1.433.333,00
10	Dinas Perhubungan	Rp	705.066.800,00
11	Dinas Pariwisata	Rp	58.270.000,00
12	Dinas Pertanian	Rp	14.812.050,00
13	Dinas Perdagangan	Rp	27.593.500,00
14	Sekretariat Daerah	Rp	442.165.000,00
15	Inspektorat	Rp	1.700.000,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah	Rp	60.446.000,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	3.800.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18	Sekretariat Dprd	Rp	152.481.000,00
19	Kecamatan Bupon	Rp	34.648.000,00
20	Kecamatan Kamanre	Rp	13.724.000,00
21	Kecamatan Suli	Rp	18.520.000,00
22	Kecamatan Suli Barat	Rp	20.500.000,00
	Jumlah	Rp	24.678.651.645,00
3. Pengurangan mutasi SKPD sebesar Rp9.984.901.547,02 terdiri atas;			
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp	6.688.237.827,02
2	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Rp	171.500.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	Rp	35.000.000,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Rp	356.500.000,00
5	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Rp	202.400.000,00
6	Dinas Pertanian	Rp	37.015.000,00
7	Sekretariat Daerah	Rp	586.550.000,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah	Rp	231.267.800,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	124.893.760,00
10	Badan Pendapatan Daerah	Rp	163.227.160,00
11	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	708.800.000,00
12	Sekretariat DPRD	Rp	194.510.000,00
13	Kecamatan Bajo Barat	Rp	125.000.000,00
14	Kecamatan Basse Sangtempe	Rp	235.000.000,00
15	Kecamatan Belopa Utara	Rp	125.000.000,00
	Jumlah	Rp	9.984.901.547,02
4. Pengurangan Mutasi ke Aset Lainnya pada aset rusak berat sebesar Rp23.887.187.157,36 terdiri atas:			
1	RSUD Batara Guru	Rp	16.345.703.699,36
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp	4.489.869.275,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	111.356.000,00
4	Dinas Sosial	Rp	35.040.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	Rp	42.437.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rp	490.460.550,00
7	Berencana	Rp	1.849.132.875,00
8	Dinas Perikanan	Rp	38.300.000,00
9	Dinas Pertanian	Rp	285.582.358,00
10	Inspektorat	Rp	141.019.000,00
11	Kecamatan Bajo Barat	Rp	30.517.700,00
12	Kecamatan Basse Sangtempe	Rp	27.768.700,00
	Jumlah	Rp	23.887.187.157,36



5. Pengurangan Mutasi extracompatible sebesar Rp3.503.296.925,00 yang dikenakan minimal kapitalisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada tahun 2021 sehingga berdampak ke pengurangan aset tetap pada SKPD berikut:

1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp	2.989.706.261,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	299.567.390,00
3	Rsud Batara Guru	Rp	115.529.240,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	2.800.000,00
5	Dinas Sosial	Rp	2.500.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rp	54.628.834,00
7	Dinas Perhubungan	Rp	750.000,00
8	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Rp	20.000.000,00
9	Dinas Pertanian	Rp	889.200,00
10	Dinas Perdagangan	Rp	600.000,00
11	Sekretariat Daerah	Rp	8.690.000,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	4.500.000,00
13	Sekretariat Dprd	Rp	1.276.000,00
14	Kecamatan Kamanre	Rp	1.210.000,00
15	Kecamatan Ponrang	Rp	650.000,00
	Jumlah	Rp	3.503.296.925,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 sebelum penyusutan adalah sebesar Rp1.020.372.163.216,20 dan Rp981.003.101.719,12. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp171.799.520.443,00) dan (Rp140.742.270.344,00), sehingga Nilai Buku Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp848.572.642.773,20 dan Rp840.260.831.375,12, dengan perincian nilai aset pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.70
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Gedung	982.510.741.240,94	946.131.907.484,86	36.378.833.756,08	3,85
2	Bangunan Monumen	4.487.699.973,00	4.487.699.973,00	0,00	0,00
3	Bangunan Menara	37.850.000,00	37.850.000,00	0,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	33.335.872.002,26	30.345.644.261,26	2.990.227.741,00	9,85
	Jumlah Aset Gedung dan Bangunan	1.020.372.163.216,20	981.003.101.719,12	39.369.061.497,08	4,01
	Akumulasi Penyusutan	(171.799.520.443,00)	(140.742.270.344,00)	(31.057.250.099,00)	2,07
	Nilai Buku Aset Peralatan Mesin	848.572.642.773,20	840.260.831.375,12	8.311.811.398,08	0,99



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per-SKPD dapat dilihat pada **lampiran 9**. Mutasi Aset Gedung dan Bangunan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	981.003.101.719,11
Penambahan	Rp	83.951.612.924,09
Pengurangan	Rp	44.582.551.427,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	1.020.372.163.216,20

Rincian penambahan aset Gedung dan Bangunan sejumlah Rp86.743.412.924,09 terdiri dari:

Realisasi Belanja Modal	Rp	47.813.909.075,09
Realisasi BM dana JKN/BLUD	Rp	641.352.220,00
Penambahan Mutasi KIB	Rp	8.204.590.229,00
Penambahan Mutasi SKPD	Rp	27.162.379.400,00
Penambahan Hibah	Rp	129.382.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	83.951.612.924,09

Penjelasan atas rincian penambahan aset Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Penambahan belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.813.909.075,09 yang bersumber dari APBD;
2. Penambahan aset tetap gedung sebesar Rp641.813.909.075,09 yang bersumber dari JKN Kapitasi Dinas Kesehatan sebesar Rp90.000.000,00; dan yang bersumber dari dana BLUD sebesar Rp551.352.220,00
3. Terdapat penambahan atas mutasi KIB pada SKPD sebesar Rp8.204.590.229,00 berikut ;

1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp	3.903.004.798,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	3.240.018.531,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp	109.615.900,00
4	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Rp	480.630.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang		
5	Daerah	Rp	195.271.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	198.250.000,00
7	Kecamatan Bupon	Rp	77.800.000,00
	Jumlah Penambahan Mutasi KIB	Rp	8.204.590.229,00

4. Penambahan Mutasi SKPD sebesar Rp27.162.379.400,00 terdiri dari SKPD::

	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dari		
1	Sekretariat Daerah	Rp	7.083.958.100,00
	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi dari		
2	PUPR	Rp	2.980.845.000,00
3	Dinas Perhubungan dari PUPR	Rp	1.150.102.500,00
4	Dinas Pariwisata dari Dinas Pertanian	Rp	49.880.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5	Sekretariat Daerah dari BKPSDM	Rp	15.897.593.800,00
	Jumlah Penambahan Mutasi SKPD	Rp	27.162.379.400,00

5. Penambahan hibah pada RSUD Batara guru sebesar Rp129.382.000,00 merupakan hibah barang berupa Rumah Singgah dari BRI berdasarkan berita acara nomor No dokumen: B.800/155/RSUD-KCXIII/LOG/02/2021

Rincian pengurangan aset Gedung dan Bangunan sejumlah Rp47.374.351.427,00 terdiri dari :

Pengurangan Mutasi Koreksi	Rp	1.078.750.000,00
Pengurangan Mutasi KIB	Rp	16.116.109.027,00
Pengurangan Mutasi SKPD	Rp	27.162.379.400,00
Pengurangan Mutasi ke Aset lainnya	Rp	225.313.000,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	44.582.551.427,00

Penjelasan atas rincian pengurangan aset Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan Mutasi Koreksi akibat Barang yang diserahkan ke Palopo sebesar Rp 1.078.750.000,00 pada Dinas PUPR berdasarkan SK Bupati Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Aset Pemerintah Kab. Luwu ke Pemerintah Kota Palopo tgl 10 September 200 dan Berita Acara Penyerahan Aset Pemerintah Daerah Kab. Luwu ke Pemerintah Kota Palopo Nomor 028/006/IX/Umper/03 tanggal 18 September 2003.
2. Pengurangan Mutasi KIB sebesar Rp16.116.109.027,00 dengan rincian sebagai berikut:

1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp	5.118.272.396,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	8.581.276.031,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp	1.044.810.900,00
4	mutasi ke KDP	Rp	509.492.000,00
5	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Rp	480.630.000,00
6	Dinas Perikanan	Rp	105.577.700,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	198.250.000,00
8	Kecamatan Bupon	Rp	77.800.000,00
	Jumlah Pengurangan Mutasi KIB	Rp	16.116.109.027,00

3. Pengurangan Mutasi SKPD sebesar Rp 27.162.379.400,00 terdiri atas

	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
1	Mutasi ke Dinas Perhubungan Rp.1.150.102.500,00	Rp	4.130.947.500,00
	Mutasi ke Nakertrans Rp.2.980.845.000,00		
2	Dinas Pertanahan Mutasi Ke Dinas Pariwisata	Rp	49.880.000,00
3	Sekretariat Daerah Mutasi ke Dinas PUPR Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	Rp	7.083.958.100,00
4	Sumber Daya Manusia mutasi ke Sekretariat Daerah	Rp	15.897.593.800,00



Jumlah Pengurangan Mutasi SKPD Rp 27.162.379.400,00

4. Mutasi ke aset Lainnya sebesar Rp225.313.000,00 terdiri dari mutasi bangunan pasar pada Dinas Perdagangan berupa kemitraan aset yang dipihak ketiga-kan berupa Pasar Sentral Lamasi sebesar Rp25.725.000,00 dan mutasi ke aset lainnya - aset rusak berat berupa bangunan Puskesmas Kamanre yang telah di rehab dengan membangun bangunan baru sebesar Rp199.588.000,00

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.653.669.071.852,11 dan Rp1.460.796.980.345,77. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp739.616.395.595,55 dan Rp510.298.530.776,97, sehingga Nilai Buku Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp914.052.676.256,56 dan Rp950.498.449.568,80, dengan rincian aset dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.71
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)					
No.	SKPD	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Jalan dan Jembatan	1.267.329.072.902,87	1.108.326.696.461,88	159.002.376.440,99	14,35
2	Irigasi/Bangunan Air	343.010.163.641,30	311.917.031.027,96	31.093.132.613,34	9,97
3	Instalasi	35.942.396.861,23	34.036.449.913,23	1.905.946.948,00	5,60
4	Jaringan	7.387.438.446,71	6.516.802.942,70	870.635.504,01	13,36
Jumlah Aset Tetap		1.653.669.071.852,11	1.460.796.980.345,77	192.872.091.506,34	13,20
Akumulasi Penyusutan		(739.616.395.595,55)	(510.298.530.776,97)	(229.317.864.818,58)	44,94
Nilai Buku Jalan, Irigasi dan Jaringan		914.052.676.256,56	950.498.449.568,80	(36.445.773.312,24)	(3,83)

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per-SKPD dapat dilihat pada **lampiran 9**. Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	1.460.796.980.345,78
Penambahan	Rp	250.668.557.251,32
Pengurangan	Rp	57.796.465.744,99
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	1.653.669.071.852,11

Rincian **penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sejumlah Rp250.668.557.251,32** terdiri dari :

Realisasi Belanja Modal	Rp	148.494.525.567,00
Realisasi Belanja Modal BLUD	Rp	274.566.565,00
Penambahan Mutasi Koreksi	Rp	214.676.224,00
Penambahan Mutasi KIB	Rp	59.626.027.356,32
Penambahan Mutasi SKPD	Rp	12.354.998.500,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penambahan Hibah	Rp	29.703.763.039,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	250.668.557.251,32

Penjelasan atas rincian penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antara lain:

1. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp148.494.525.567,00 merupakan yang bersumber dari APBD;
2. Realisasi Belanja Modal dari dana BLUD RSUD Batara Guru sebesar Rp274.566.565,00.
3. Penamabahan mutasi koreksi nilai aset atas jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp214.676.224,00 berupa pengakuan hutang pengadaan aset - jaringan listrik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Penambahan mutasi KIB sebesar Rp59.626.027.356,32 dengan rincian sebagai berikut:

1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp	1.555.484.598,00
2	RSUD Batara Guru	Rp	149.886.200,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp	56.082.020.724,32
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	306.250.000,00
5	Dinas Perikanan	Rp	105.577.700,00
6	Kecamatan Bajo	Rp	59.861.000,00
7	Kecamatan Belopa	Rp	787.460.000,00
8	Kec. Belopa Utara	Rp	321.929.950,00
9	Kecamatan Bupon	Rp	32.374.870,00
10	Kecamatan Kamanre	Rp	33.434.314,00
11	Kecamatan Larompong Selatan	Rp	52.342.300,00
12	Kecamatan Suli Barat	Rp	111.554.000,00
13	Kecamatan Walenrang Barat	Rp	27.851.700,00
	Jumlah	Rp	59.626.027.356,32

5. Penambahan mutasi sebesar Rp12.354.998.500,00 pada Dinas Perhubungan berupa Jaringan dari Dinas Dinas PUPR berdasarkan Berita Acara Nomor 028/226/BA-STB/PUPR/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021.
6. Penambahan Hibah sebesar Rp29.703.763.039,00 pada PUPR merupakan Hibah Jalan Kabupaten dari Direktorat Jendereal Bina Marga berdasarkan berita acara PS.04.03-Bb13/PJN.WII.II/1275 Tanggal 07-09-2021

Rincian pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sejumlah Rp57.796.465.744,98 terdiri dari :

Pengurangan Mutasi KIB	Rp	43.523.547.939,32
Pengurangan Mutasi SKPD	Rp	12.354.998.500,00
Pengurangan extracompatible	Rp	1.917.919.305,66
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	57.796.465.744,98

Penjelasan atas rincian pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Pengurangan mutasi KIB sebesar Rp43.523.547.939,32 dengan rincian sebagai berikut:

1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp	340.217.000,00
2	Rsud Batara Guru	Rp	149.886.200,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp	41.606.636.605,32
4	Kecamatan Bajo	Rp	59.861.000,00
5	Kecamatan Belopa	Rp	787.460.000,00
6	Kec. Belopa Utara	Rp	321.929.950,00
7	Kecamatan Bupon	Rp	32.374.870,00
8	Kecamatan Kamanre	Rp	33.434.314,00
9	Kecamatan Larompong Selatan	Rp	52.342.300,00
10	Kecamatan Suli Barat	Rp	111.554.000,00
11	Kecamatan Walenrang Barat	Rp	27.851.700,00
	Jumlah	Rp	43.523.547.939,32

2. Mutasi SKPD sebesar Rp12.354.998.500,00 pada Dinas PUPR berupa asset Jaringan yang di muatsi ke Dinas Perhubungan dengan Nomor 028/226/BA-STB/PUPR/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021
3. Pengurangan *Extracomptabel* sebesar Rp1.917.919.305,66 akibat penerapan batas minimum kapitalisasi aset tetap berdasarkan Peraturan Bupati nomor 71 tentang Kebijakan akuntansi dengan rincian sebagai berikut:

1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp	83.019.720,66
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp	823.894.694,00
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp	551.119.309,00
4	Dinas Perikanan	Rp	49.526.800,00
5	Kecamatan Belopa	Rp	89.255.000,00
6	Kecamatan Bupon	Rp	87.719.010,00
7	Kecamatan Larompong	Rp	62.455.000,00
8	Kecamatan Ponrang Selatan	Rp	104.476.322,00
9	Kecamatan Walenrang Utara	Rp	66.453.450,00
	Pengurangan <i>Extracomptable</i>	Rp	1.917.919.305,66

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp93.441.466.806,21 dan Rp87.641.523.089,21, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.72
Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)					
No.	SKPD	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Bahan Perpustakaan	85.740.494.382,21	79.940.550.665,21	5.799.943.717,00	7,26
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.583.368.335,00	1.583.368.335,00	0,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3	Tanaman	9.937.500	9937500	0,00	0,00
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	6.107.666.589,00	6.107.666.589,00	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	93.441.466.806,21	87.641.523.089,21	5.799.943.717,00	0,62

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per-SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 9**, dengan uraian mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	87.641.523.089,21
Penambahan	Rp	16.157.296.118,00
Pengurangan	Rp	10.357.352.401,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	93.441.466.806,21

Rincian penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp16.157.296.118,00 terdiri dari:

Realisasi Belanja Modal	Rp	191.563.637,00
Realisasi Belanja Modal dana BOS	Rp	10.165.788.764,00
Penambahan Mutasi KIB	Rp	5.799.943.717,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	16.157.296.118,00

Penjelasan atas rincian penambahan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Penambahan belanja modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp191.563.637,00 yang bersumber dari APBD;
2. Realisasi Belanja Modal dana BOS sebesar Rp10.165.788.764,00
3. Penambahan Mutasi KIB sebesar Rp5.799.943.717,00 pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp10.357.352.401,00 merupakan:

Pengurangan Mutasi KIB	Rp	10.182.788.764,00
Pengurangan Mutasi ke Aset Lainnya	Rp	174.563.637,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	10.357.352.401,00

Penjelasan atas rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan Mutasi KIB sebesar Rp10.182.788.764,00 dengan rincian:
 - 1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp 10.165.788.764,00
 - 2 Persandian Rp 17.000.000,00
- Jumlah Rp 10.182.788.764,00**



2.	Pengurangan mutasi ke aset lainnya berupa aset tak berwujud sebesar Rp174.563.637,00		
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	35.000.000,00
2	Dinas Pariwisata	Rp	99.800.000,00
3	Inspektorat	Rp	39.763.637,00
	Jumlah	Rp	174.563.637,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya atau telah selesai pembangunannya tapi belum dimanfaatkan sesuai fungsi dan penggunaannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp34.794.235.282,46 dan Rp40.812.234.321,46 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73
Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2021	2020	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	194.483.592,46	43.151.000,00	151.332.592,46	350,70
2	Bangunan	16.890.000,00	10.660.840.619,46	(10.643.950.619,46)	(99,84)
3	Jalan dan Jembatan	16.666.016.007,00	29.801.992.702,00	(13.135.976.695,00)	(44,08)
4	Bangunan Air / Irigasi	15.327.652.583,00	306.250.000,00	15.021.402.583,00	3.904,95
5	Aset Tetap Lainnya	2.489.553.100,00	0,00	2.489.553.100,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	34.794.235.282,46	40.812.234.321,46	(6.017.999.039,00)	(14,75)

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran 9.3 dan 9.3.1 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp	40.812.234.321,46
Penambahan	Rp	21.886.270.055,00
Pengurangan	Rp	27.904.269.094,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	34.794.235.282,46

Rincian penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sejumlah Rp21.886.270.055,00 merupakan mutasi KIB pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.74
Penambahan KDP 2021

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Jumlah
1	2	4
1	Dinas Kesehatan	5.341.257.500,00
2	RSUD Batara Guru	16.890.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	15.847.922.875,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	509.492.000,00
5	Dinas Perpustakaan	99.640.000,00



Tabel 5.74
Penambahan KDP 2021

(dalam Rupiah)		
No.	SKPD	Jumlah
1	2	4
6	Dinas Pertanahan	71.067.680,00
	Jumlah	21.886.270.055,00

Rincian pengurangan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sejumlah Rp27.904.269.094,00 merupakan mutasi KIB pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.75
Pengurangan KDP 2021

(dalam Rupiah)		
No.	SKPD	Jumlah
1	2	4
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	27.402.748.094,00
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	195.271.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	306.250.000,00
	Jumlah	27.904.269.094,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp1.341.503.275.475,18) dan (Rp1.024.374.624.677,33), sebagaimana terperinci per-SKPD pada **lampiran 9**.

Pemerintah Kabupaten Luwu menerapkan penyusutan aset tetap dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa memperhitungkan nilai residu/nilai sisa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.76
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)					
No.	Jenis	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Peralatan dan Mesin	(430.087.359.436,63)	(373.333.823.556,36)	(56.753.535.880,27)	15,20
2	Gedung dan Bangunan	(171.799.520.443,00)	(140.742.270.344,00)	(31.057.250.099,00)	22,07
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(739.616.395.595,55)	(510.298.530.776,97)	(229.317.864.818,58)	44,94
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(1.341.503.275.475,18)	(1.024.374.624.677,33)	(317.128.650.797,85)	30,96

5.3.1.4 Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 sebelum amortisasi dan penyisihan piutang adalah sebesar Rp82.121.035.026,40 dan Rp56.415.255.780,00 dikurangi amortisasi dan penyisihan piutang lainnya sebesar (Rp39.781.157.827,00) dan (Rp17.865.576.909,00) sehingga jumlah aset lainnya setelah dikurangi amortisasi dan penyisihan piutang sebesar Rp42.339.877.199,40 dan Rp38.549.678.871,00.



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Lainnya setelah penyisihan dan amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp Rp42.339.877.199,40 mengalami kenaikan sebesar Rp3.790.198.328,40 atau sebesar 9,83% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp38.549.678.871,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.77
Mutasi Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
I	Tagihan Jangka Panjang	3.783.557.647,00	3.983.136.192,00	(199.578.545,00)	(5,01)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	30.450.400,00	30.450.400,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.753.107.247,00	3.952.685.792,00	(199.578.545,00)	(5,05)
a	Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara	3.104.050.580,00	3.166.226.725,00	(62.176.145,00)	(1,96)
	- Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	(3.166.226.725,00)	3.166.226.725,00	(100,00)
	- Nilai Bersih Tuntutan Ganti rugi	3.104.050.580,00	0,00	3.104.050.580,00	0,00
b	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	649.056.667,00	786.459.067,00	(137.402.400,00)	(17,47)
	- Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	(693.247.467,00)	693.247.467,00	(100,00)
	- Nilai Bersih Tuntutan Ganti rugi	649.056.667,00	93.211.600,00	555.845.067,00	596,33
II	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.617.725.000,00	0,00	1.617.725.000,00	0,00
1	Kerja Sama Pemanfaatan	1.617.725.000,00	0,00	1.617.725.000,00	0,00
III	Aset Tak Berwujud	23.601.807.901,00	23.329.454.264,00	272.353.637,00	1,17
1	Hak Cipta	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00
	- Akumulasi Amortisasi	(21.420.000,00)	(18.360.000,00)	(3.060.000,00)	16,67
	- Nilai Bersih aset Tak Berwujud	9.180.000,00	12.240.000,00	(3.060.000,00)	(25,00)
2	Aset Tidak Berwujud Lainnya	23.571.207.901,00	23.298.854.264,00	272.353.637,00	1,17
	- Akumulasi Amortisasi	(16.028.530.883,00)	(13.987.742.717,00)	(2.040.788.166,00)	14,59
	- Nilai Bersih aset Tak Berwujud	7.542.677.018,00	9.311.111.547,00	(1.768.434.529,00)	(18,99)
IV	Aset Lain-Lain	53.117.944.478,40	29.102.665.324,00	24.015.279.154,40	82,52
1	Aset Lain-Lain	53.117.944.478,40	29.102.665.324,00	24.015.279.154,40	82,52
	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	(23.731.206.944,00)	0,00	(23.731.206.944,00)	0,00
	- Nilai Bersih aset Tak Berwujud	29.386.737.534,40	9.311.111.547,00	20.075.625.987,40	215,61
	Jumlah Aset Lainnya sebelum Penyisihan	82.121.035.026,40	56.415.255.780,00	25.705.779.246,40	45,57
	Jumlah Penyisihan Aset Lainnya	(39.781.157.827,00)	(17.865.576.909,00)	(21.915.580.918,00)	122,67
	Jumlah Aset Lainnya	42.339.877.199,40	38.549.678.871,00	3.790.198.328,40	9,83

Adapun rincian mutai Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran 10.

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tagihan Jangka Panjang merupakan Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp3.783.557.647,00 dan Rp123.662.000,00.

5.3.1.4.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan piutang yang timbul dari transaksi penjualan aset milik Pemkab Luwu secara angsuran melalui



perjanjian berupa angsuran penjualan kendaraan dinas sebesar Rp30.450.400,00 tidak mengalami kenaikan dan penurunan hingga 31 Desember 2021 dengan perincian pada **lampiran 10.1**.

5.3.1.4.1.2 Tuntutan Ganti Rugi

a. Tuntutan Ganti Rugi terhadap Bendahara

Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp3.104.050.580,00 merupakan mutasi atas kerugian daerah berdasarkan SKTJM namun telah lewat jatuh tempo dan tidak ada penyelesaian dari pihak yang ter-hutang dengan perincian pada **lampiran 10**, dengan mutasi sebagai berikut:

b. Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Bukan Bendahara

Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Bukan Bendahara sebesar Rp649.056.667,00 dengan perincian pada **lampiran 10.2.1-10.2.15**, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal 01 Jan 2021	Rp	786.459.067,00
Penambahan	Rp	0,00
Pengurangan	Rp	137.402.400,00
Saldo Akhir 31 Des 2021	Rp	649.056.667,00

5.3.1.4.2 Kemitraan dengan pihak ketiga

Saldo Kemitraan Pihak Ketiga Pemerintah daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.617.725.000,00 dan Rp0,00 berupa kerjasama pemanfaatan bangunan pasar berupa:

1. Pasar Padang Sappa dengan perjanjian nomor No. 10 Tahun 2004 tanggal 15 Juli 2004 sepakat untuk melakukan kerjasama untuk pembangunan Pasar Padang Sappa dengan PT. Multi Engka Utama dengan penetapan anggaran biaya proyek sebesar Rp28.872.500.000,00. Jangka Waktu pengelolaan selama 25 tahun dihitung mulai tanggal Surat keputusan pengelolaan Pasar Padang Sappa. Adapaun nilai aset yang tercatat sebagai aset kemitraan pihak ketiga di Pemda Luwu berupa Tanah sebesar Rp800.000.000,00.
2. Pasar Sentral Lamasi dengan perjanjian No. 180/112/IX/Huk/2012 pada 24 September 2012 sepakat untuk melakukan kerjasama pemanfaatan bangunan pasar dengan melakukan revitalisasi Pasar Sentral Lamasi dengan penetapan anggaran proyek revitalisasi sebesar Rp29.386.900.000,00. Jangka Waktu pengelolaan selama 30 tahun. Adapaun nilai aset yang tercatat di Pemda Luwu sebesar Rp 817.725.000,00 berupa Tanah sebesar Rp792.000.000,00 dan Bangunan sebesar Rp 25.725.000,00

5.3.1.4.3 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp23.601.807.901,00 dan Rp23.329.454.264,00 dikurangi akumulasi amortisasi sebesar (Rp16.049.950.883,00) dan



(Rp14.006.102.717,00) sehingga nilai ATB bersih per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp7.551.857.018,00 dan Rp9.323.351.547,00 merupakan Aset dalam bentuk Hak Cipta dan Aset Tidak Berwujud Lainnya berupa Hasil Kajian dan *Software* dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.78
Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Hak Cipta	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00
2	Aset Tidak Berwujud Lainnya	23.571.207.901,00	23.298.854.264,00	272.353.637,00	1,17
a	Hasil Kajian	21.974.634.164,00	21.874.834.164,00	99.800.000,00	0,46
b	Software	1.596.573.737,00	1.424.020.100,00	172.553.637,00	12,12
Jumlah Aset Tak Berwujud		23.601.807.901,00	23.329.454.264,00	272.353.637,00	1,17
Jumlah Akumulasi Amortisasi ATB		(16.049.950.883,00)	(14.006.102.717,00)	(2.043.848.166,00)	14,59
Jumlah ATB Setelah Amortisasi		7.551.857.018,00	9.323.351.547,00	(1.771.494.529,00)	(19,00)

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran 10.3, dengan penjabaran sebagai berikut :

Saldo Awal 01 Januari 2021	Rp	23.329.454.264,00
Penambahan	Rp	272.353.637,00
Pengurangan	Rp	0,00
Saldo Akhir 31 Desember 2021	Rp	23.601.807.901,00
Akumulasi Amortisasi 2021	Rp	16.049.950.883,00
Saldo Aset Lainnya Setelah Amortisasi	Rp	7.551.857.018,00

Rincian penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp272.353.637,00 sebagai berikut:

Hak Cipta	Rp	0,00
Hasil Kajian	Rp	99.800.000,00
<i>Software</i>	Rp	172.553.637,00
Jumlah Penambahan ATB	Rp	272.353.637,00

5.3.1.4.3.1 Hak Cipta

Hak cipta senilai Rp30.600.000,00 merupakan Hak Cipta atas Kopi Bisan merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Hingga tahun 2019 Hak Cipta Pemda Kabupaten Luwu tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.



5.3.1.4.3.2 Hasil Kajian

Aset Tak Berwujud lainnya Pemda Kabupaten Luwu berupa Hasil Kajian pada tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp21.974.634.164,00 dan Rp21.874.834.164,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.79
Rincian Hasil Kajian pada Aset Tidak berwujud Lainnya
(dalam Rupiah)

No.	Hasil Kajian	2021	2020
1	2	4	5
1	Film Dokumenter	46.000.000,00	46.000.000,00
	Akumulasi Amortisasi Hak Kajian	(35.650.000,00)	(31.050.000,00)
	Nilai Buku	10.350.000,00	14.950.000,00
2	DED	21.828.834.164,00	21.828.834.164,00
	Akumulasi Amortisasi Hak Kajian	(15.116.601.073,00)	(13.225.406.795,00)
	Nilai Buku	6.712.233.091,00	8.603.427.369,00
3	Kajian	99.800.000,00	21.828.834.164,00
	Akumulasi Amortisasi Hak Kajian	(1.663.333,00)	(13.225.406.795,00)
	Nilai Buku	98.136.667,00	8.603.427.369,00
	Jumlah Hasil Kajian sebelum Amortisasi	21.974.634.164,00	21.874.834.164,00
	Jumlah Akumulasi Amortisasi	(15.153.914.406,00)	(13.256.456.795,00)
	Jumlah Hasil Kajian	6.820.719.758,00	8.618.377.369,00

5.3.1.4.3.3 Software

Aset Tak Berwujud lainnya Pemda Kabupaten Luwu berupa *Software* pada tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp1.596.573.737,00 dan Rp1.424.020.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80
Rincian Software pada Aset Tak Berwujud Lainnya
(dalam Rupiah)

No.	Aset Tak Berwujud/Sistem Komputer	SKPD	2021	2020
1	2	3	4	5
1	Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas	Sekertariat Daerah	49.060.000,00	49.060.000,00
2	Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas	Sekertariat DPRD	74.233.500,00	74.233.500,00
3	Sistem Informasi Kepegawaian	BKP-SDM	66.566.600,00	66.566.600,00
4	SIM PBB (Windows 2008 standar)	Bapenda	10.000.000,00	10.000.000,00
5	SIM BPHTB	Bapenda	200.500.000,00	200.500.000,00
6	SIMRS	RSUD Batara Guru	55.000.000,00	55.000.000,00
7	SIM Jalan dan Jembatan	Dinas Bina Marga	22.500.000,00	22.500.000,00
8	Sistem Pelayanan Terpadu Online Magatti	BP3M	132.500.000,00	132.500.000,00
9	Aplikasi Persediaan Obat	RSUD Batara Guru	98.010.000,00	98.010.000,00
10	Aplikasi Antrian dan Registrasi Pelayanan	Dinas Dukcapil	50.000.000,00	50.000.000,00
11	Aplikasi DKB PDAK (Data Konsolidasi Bersih/Berkala)	Dinas Dukcapil	50.000.000,00	50.000.000,00
12	Simonev	BPP Litbang	50.000.000,00	50.000.000,00
13	E-Planning	BPP Litbang	50.000.000,00	50.000.000,00
14	Sistem Informasi Pegawai Mandiri	BKP-SDM	174.900.000,00	174.900.000,00
15	Sistem Informasi SSH	BPKD	9.350.000,00	9.350.000,00
16	Sistem Informasi Koperasi Luwu (SIKOPRAL)	Dinas Koperasi	30.000.000,00	30.000.000,00
17	Sistem Informasi Manajemen Perizinan	DPMPSTP	179.900.000,00	179.900.000,00
18	Sistem Data Dan Informasi Gender dan Anak	DP3A	28.000.000,00	28.000.000,00
19	Aplikasi SIKDA	Dinkes (Puskesmas Suli Barat)	5.000.000,00	5.000.000,00



Tabel 5.80
Rincian Software pada Aset Tak Berwujud Lainnya
(dalam Rupiah)

No.	Aset Tak Berwujud/Sistem Komputer	SKPD	2021	2020
1	2	3	4	5
20	Sistem Informasi Pertanahan	Pertanahan	39.500.000,00	39.500.000,00
21	Aplikasi E-Kinerja	BKP-SDM	49.000.000,00	49.000.000,00
22	Aplikasi Pelaporan Bencana	BPBD	35.000.000,00	0,00
23	Website Inspektorat Daerah	Inspektorat	14.911.364,00	0,00
24	Aplikasi Taat BMD	Inspektorat	24.852.273,00	0,00
25	Aplikasi SIMTARU	PUPR	97.790.000,00	0,00
Jumlah Nilai Aset Tak Berwujud			1.596.573.737,00	1.424.020.100,00
Jumlah Akumulasi Amortisasi			(874.616.477,00)	(593.375.579,00)
Jumlah Software / Perangkat Lunak			721.957.260,00	830.644.521,00

5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

Saldo Aset lain-lain Per 31 Desember 2021 dan 2020 sebelum penyisihan piutang sebesar Rp53.117.944.478,40 dan Rp29.102.665.324,00, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp23.731.206.944,00) dan (Rp0,00) sehingga nilai ATB bersih per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp29.386.737.534,40 dan Rp29.102.665.324,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.81
Aset Lain-Lain
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Lainnya atas UYHD 2003-2009	2.194.238.008,00	2.194.238.008,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi TA 2005	157.977.066,00	157.977.066,00	0,00	0,00
3	Piutang Pegawai TA 2007	12.388.650,00	12.388.650,00	0,00	0,00
4	Piutang Lain-lain	108.103.350,00	108.103.350,00	0,00	0,00
5	Barang Rusak Berat	50.645.237.404,40	26.629.958.250,00	24.015.279.154,40	90,18
Jumlah Aset Lain-Lain		53.117.944.478,40	29.102.665.324,00	24.015.279.154,40	82,52
Jumlah Penyusutan Aset Lain-Lain		(23.731.206.944,00)	0,00	(23.731.206.944,00)	0,00
Jumlah Nilai Bersih Aset Lain-Lain		29.386.737.534,40	29.102.665.324,00	284.072.210,40	0,98

Rincian mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **lampiran 10**, dengan penjabaran sebagai berikut:

Saldo Awal 01 Jan 2021	Rp	29.102.665.324,00
Penambahan	Rp	24.094.193.157,40
Pengurangan	Rp	78.914.003,00
Saldo Akhir 31 Des 2021	Rp	53.117.944.478,40

Rincian penambahan Aset Lain-Lain sebesar Rp23.894.605.157,40 merupakan:

1. Penambahan barang rusak berat senilai Rp24.094.193.157,40 di beberapa SKPD dengan rincian pada **lampiran 10.4**.

Rincian pengurangan Aset Lain-Lain sebesar Rp78.914.003,00 merupakan pengurangan atas aset Rusak berat terdiri dari:

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	11.566.003,00
-----------------------------------	----	---------------



2	Dinas PUPR Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Rp	14.688.000,00
3	SDM	Rp	39.975.000,00
4	Dinas Perdagangan	Rp	12.685.000,00
	Jumlah pengurangan Aset lainnya-Aset lainnya	Rp	78.914.003,00

Penjelasan Akun Aset Lain-Lain :

- 1) Piutang atas UYHD tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp2.194.238.008,00, sebagaimana terperinci pada **lampiran 10**;
- 2) Piutang Retribusi TA 2005 dengan piutang awal sebesar Rp157.977.066,00. Berdasarkan penelusuran nilai ini diketahui sebagai IMB proyek Pasar Padang Sappa;
- 3) Piutang Pegawai dengan piutang awal sebesar Rp12.388.650,00. Akun ini merupakan jumlah piutang pegawai yang tidak mengalami penurunan atau tidak ada pembayaran sejak 2008 hingga tahun 2018;
- 4) Piutang Lain-Lain sebesar Rp108.103.350,00. Akun ini juga tidak mengalami perubahan disebabkan Penanggung Jawab pada Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi TA 2010 diketahui telah meninggal dunia.
- 5) Inventaris Barang yang akan dihapus Aset lain-lain merupakan kumpulan aset tetap yang direklasifikasi dari peralatan dan mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang telah rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan lagi sebesar Rp50.445.649.404,40 berupa barang dengan kondisi rusak berat dan barang non operasional dengan rincian pada **lampiran 10.4**.

1.1.1.1.1 Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. Perlakuan amortisasi untuk tahun 2021 diterapkan dengan masa manfaat 10 tahun dengan menggunakan Aplikasi Simda BMD yang menggunakan metode pencatatan metode garis lurus berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor Nomor 132 Tahun 2019 yang didalamnya termasuk mengatur tentang Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi aset tidak berwujud Pemda Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp16.049.950.883,00) dan (Rp14.006.102.717,00), dengan perincian per SKPD pada **lampiran 10.3.1**.

5.3.1.4.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp23.731.206.944,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)					
No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Peralatan dan Mesin	23.675.322.304,00	0,00	23.731.206.944,00	100,00



Tabel 5.82
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
2	Gedung dan Bangunan	55.884.640,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penyusutan Aset Lain-Lain		23.731.206.944,00	0,00	23.731.206.944,00	100,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dengan perincian per SKPD pada lampiran 10.4.2

5.3.2 KEWAJIBAN

Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.483.476.733,05 mengalami kenaikan sebesar Rp780.559.799,99 atau sebesar 3,96% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp19.702.916.933,06 yang terdiri atas:

Tabel 5.83
Rincian Kewajiban

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Kewajiban Jangka Pendek	20.483.476.733,05	19.702.916.933,06	780.559.799,99	3,96
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		20.483.476.733,05	19.702.916.933,06	780.559.799,99	3,96

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.483.476.733,05 mengalami kenaikan sebesar Rp780.559.799,99 atau sebesar 3,96% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 Rp19.702.916.933,06 yang terdiri atas:

Tabel 5.84
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.458.181,00	399.396.075,00	(397.937.894,00)	(99,63)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	293.710.210,15	266.780.052,61	26.930.157,54	10,09
3	Utang Belanja	19.892.125.817,90	18.947.769.505,45	944.356.312,45	4,98
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	296.182.524,00	88.971.300,00	207.211.224,00	232,90
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		20.483.476.733,05	19.702.916.933,06	780.559.799,99	3,96

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.458.181,00 dan Rp399.396.075,00 terdiri dari:

Tabel 5.85
Rincian Utang PFK

No.	Uraian	2021	2020
1	2	3	3
1	Potongan PPH 21 TA 2006	0,00	389.647.547,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2	Hutang Pajak PPh	1.458.181,00	9.748.528,00
Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		1.458.181,00	399.396.075,00

Penjelasan Rincian Utang PFK adalah sebagai berikut:

- a) Tahun 2020 Pemda Luwu memiliki Utang PFK-PPh 21 TA.2006 sebesar Rp389.647.547,00 merupakan Utang PPh 21 Pemda Luwu terhadap KPP Pratama Palopo. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Luwu telah melakukan penghapusan Utang PFK berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 677/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, namun sebelumnya Pemda Luwu telah melakukan persuratan terkait konfirmasi utang PPh 21 kepada KPP Pratama Palopo dan mendapatkan balasan persuratan dengan nomor S-630/WPJ.15/KP/04/2021 tanggal 15 April 2021 menjelaskan bahwa utang PPh 21 Pemerintah Kabupaten Luwu telah masuk dalam kategori daluarsa sejak 5 (lima) tahun dari tahun berlakunya pajak dan tidak ada hak untuk melakukan penagihan pajak setelah melampaui 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun penerbitan pajak, dengan rincian utang PPh Pasal 21 pada **lampiran 11.1**.
- b) Kewajiban berupa pajak yang dipotong Bendahara Pengeluaran BPBD pada Belanja Bantuan Tak Terduga di SKPD BPBD selaku Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp1.458.181,00 yang belum disetor ke kas Negara hingga 31 Desember 2021.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp293.710.210,15 dan Rp266.780.052,61 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.86
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)			
No.	Uraian	2021	2020
1	2	3	4
1	Pendapatan Sewa ATM	45.946.917,32	55.956.954,98
2	Pendapatan Sewa Lahan	56.833.333,96	87.250.000,96
3	Pendapatan Reklame	190.678.592,75	123.573.096,67
4	Pendapatan Sewa Gedung	251.366,12	0,00
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka		293.710.210,15	266.780.052,61

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu yang timbul karena Pemerintah Kabupaten Luwu telah menerima uang/kas. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Luwu belum menyerahkan barang/jasa kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Pemkab Luwu per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **lampiran 12**; **lampiran 12.1**; dan **lampiran 12.2**.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja sebesar 31 Desember 2021 dan 2020 Rp19.892.125.817,90 dan Rp18.947.769.505,45 merupakan utang Pemerintah Kabupaten Luwu yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang



pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya/digunakan barang/jasa tersebut, dengan rincian per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.87
Rincian Utang Belanja

(dalam Rupiah)			
No.	Uraian	2021	2020
1	2	3	4
I	Utang Belanja Pegawai	568.750.000,00	6.584.289.000,00
1	Utang Tunjangan Profesi Guru	0,00	6.574.674.900,00
2	Utang Tunjangan Khusus Guru	0,00	9.614.100,00
3	Utang Tambahan Penghasilan Guru 2021	568.750.000,00	0,00
II	Utang Belanja Barang dan Jasa	19.323.375.817,90	12.363.480.505,45
1	Utang PPJ 2010	0,00	3.385.795,45
2	Utang Belanja Listrik	441.722.816,00	475.591.767,00
3	Utang Belanja Air	5.872.665,00	1.686.984,00
4	Utang Belanja Telephone	10.229.982,00	11.146.028,00
5	Utang Belanja Internet	21.352.069,00	25.254.752,00
6	Utang Belanja TV Kabel	50.000,00	1.037.650,00
7	Utang Belanja Surat Kabar	4.920.000,00	5.900.000,00
8	Utang Makan Minum	8.325.000,00	0,00
9	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	17.870.040.512,19	10.678.240.406,00
10	Utang Klaim Pelayanan Kesehatan	58.814.500	354.144.083,00
11	Utang PKB Kendaraan Dinas	902.048.274,00	807.093.040,00
	Jumlah Belanja	19.892.125.817,90	18.947.769.505,45

Utang belanja pada umumnya terjadi karena pihak ketiga melaksanakan penyediaan barang atau jasa terlebih dahulu/dimuka dan melakukan penagihan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Rincian utang beban per-SKPD dapat dilihat pada **lampiran 13**.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp296.182.524,00 dan Rp88.971.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam Rupiah)			
No.	Uraian	2021	2020
1	2	3	4
1	Utang Pengadaan aset	222.251.224,00	0,00
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	73.931.300,00	88.971.300,00
	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	296.182.524,00	88.971.300,00

5.3.2.1.5 Utang Pengadaan Aset

Utang Pengadaan Aset per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp222.251.224,00 dan Rp0,00 dengan rincian pada **Lampiran 14**.

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp73.931.300,00 dan Rp88.971.300,00 utang ini merupakan reklasifikasi dari akun utang pihak ketiga yang dihapus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Utang ini tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:



Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp73.931.300,00 terdiri dari saldo Utang retensi dan non retensi pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

- a) Utang Retensi Pihak Ketiga sebesar Rp63.931.300,00 terdiri dari:

Tabel 5.89
Rincian Utang Retensi
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
1	2	3	4
1	Dinas Bina Marga	29.011.150,00	29.011.150,00
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	30.753.750,00	30.753.750,00
3	Dinas Pariwisata	4.166.400,00	4.166.400,00
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya		63.931.300,00	63.931.300,00

Rincian Utang Retensi Pihak Ketiga dapat dilihat pada **lampiran 14**.

- b) Utang Non Retensi sebesar Rp10.000.000,00 merupakan utang kepada pihak ketiga pada Dinas Pariwisata untuk Pengadaan Konstruksi Hutan Wisata (Lanjutan) pada TA 2010.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Luwu yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu. Jumlah saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.615.385.441.972,42 mengalami penurunan kekayaan bersih sebesar Rp62.574.409.651,58 atau 2,3% jika dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.677.959.851.624,00

Secara rinci tentang kenaikan ekuitas tahun 2021 dijelaskan pada CALK tentang Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN DAERAH-LO

Pendapatan Daerah-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Luwu dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatannya itu Pendapatan Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.457.704.440.566,60 mengalami penurunan sebesar Rp11.338.223.725,82 atau sebesar 0,77% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.469.042.664.292,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90
Rincian Pendapatan – LO
(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan	2021	2020	Kenaikan/penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	140.695.133.434,68	113.982.568.820,34	26.712.564.614,34	23,44
2	Pendapatan Transfer – LO	1.214.286.129.603,00	1.246.323.060.735,68	(32.036.931.132,68)	(2,57)



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	102.723.177.528,92	108.737.034.736,40	(6.013.857.207,48)	(5,53)
	Jumlah	1.457.704.440.566,60	1.469.042.664.292,42	(11.338.223.725,82)	(0,77)

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp140.695.133.434,68 mengalami kenaikan sebesar Rp26.712.564.614,34 atau 23,44% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp113.982.568.820,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91
Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

(dalam Rupiah)

No.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	2021	2020	Kenaikan/penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	27.153.111.897,86	24.289.929.758,68	2.863.182.139,18	11,79
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	6.825.409.994,15	8.105.146.121,65	(1.279.736.127,50)	(15,79)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	5.999.631.274,00	10.526.887.958,00	(4.527.256.684,00)	(43,01)
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	100.716.980.268,67	71.060.604.982,01	29.656.375.286,66	41,73
	Jumlah	140.695.133.434,68	113.982.568.820,34	26.712.564.614,34	23,44

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2021, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2021 dan dikurangi pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2021.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp27.153.111.897,86 mengalami kenaikan sebesar Rp2.863.182.139,18 atau 11,79% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.289.929.758,68 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.92
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam Rupiah)

Pendapatan Pajak Daerah – LO		2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel – LO	132.307.251,00	59.620.804,00	72.686.447,00	121,91
2	Pajak Restoran – LO	1.871.277.396,00	1.620.684.217,00	250.593.179,00	15,46
3	Pajak Hiburan – LO	7.400.000,00	9.685.000,00	(2.285.000,00)	(23,59)
4	Pajak Reklame – LO	573.716.100,92	897.677.236,08	(323.961.135,16)	(36,09)
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	11.366.251.576,00	10.625.443.835,00	740.807.741,00	6,97
6	Pajak Air Tanah – LO	15.406.996,44	14.067.280,10	1.339.716,34	9,52
7	Pajak Sarang Burung Walet - LO	3.000.000,00	3.950.000,00	(950.000,00)	(24,05)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	2.859.826.304,00	2.706.548.538,00	153.277.766,00	5,66
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	7.619.801.345,00	6.499.236.017,00	1.120.565.328,00	17,24
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	2.704.124.928,50	1.853.016.831,50	851.108.097,00	45,93
Jumlah		27.153.111.897,86	24.289.929.758,68	2.863.182.139,18	11,79

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.825.409.994,15 mengalami penurunan sebesar Rp1.279736.127,50 atau 15,79% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.105.146.121,65 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.93
Rincian Pendapatan Pajak Retribusi Daerah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Pajak Retribusi Daerah – LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas – LO	3.214.944.234,00	4.488.262.789,00	(1.273.318.555,00)	(28,37)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	141.090.000,00	135.950.000,00	5.140.000,00	3,78
3	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.686.177.000,00	1.242.012.000,00	444.165.000,00	35,76
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	248.140.000,00	179.730.000,00	68.410.000,00	38,06
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	687.581.411,15	752.918.237,65	(65.336.826,50)	(8,68)
6	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	16.760.000,00	7.468.000,00	9.292.000,00	124,42
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	19.410.000,00	21.851.000,00	(2.441.000,00)	(11,17)
8	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila – LO	6.090.000,00	1.590.000,00	4.500.000,00	283,02
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LO	16.100.000,00	24.600.000,00	(8.500.000,00)	(34,55)
10	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah – LO	72.750.000,00	40.250.000,00	32.500.000,00	80,75
11	Retribusi Izin untuk Mendirikan Bangunan – LO	546.101.349,00	829.427.795,00	(283.326.446,00)	(34,16)



Tabel 5.93
Rincian Pendapatan Pajak Retribusi Daerah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Pajak Retribusi Daerah – LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
12	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi – LO	1.265.000,00	3.605.000,00	(2.340.000,00)	(64,91)
13	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	32.516.000,00	31.416.000,00	1.100.000,00	3,50
14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	136.485.000,00	346.065.300,00	(209.580.300,00)	(60,56)
	Jumlah	6.825.409.994,15	8.105.146.121,65	(1.279.736.127,50)	(15,79)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.999.631.274,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp4.527.256.684,00 atau 43,01% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yang terealisasi sebesar Rp10.526.887.958,00

Tabel 5.94

Rincian Pendapatan Hasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan – LO

(dalam Rupiah)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		2021	2020	Kenaikan/penurunan	%
1		2	3	4	5
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LO	5.999.631.274,00	10.526.887.958,00	(4.527.256.684,00)	(43,01)
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.999.631.274,00	10.526.887.958,00	(4.527.256.684,00)	(43,01)

5.4.1.1.2 Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO

Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-lain PAD untuk periode Tahun Anggaran 2021

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp100.716.980.268,67 dan mengalami kenaikan sebesar Rp29.656.375.286,66 atau 41,73% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp71.060.604.982,01 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.95
Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO

(dalam Rupiah)

No.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO	37.200.000,00	144.066.000,00	(106.866.000,00)	(74,18)
2	Penerimaan Jasa Giro – LO	2.412.199.447,00	2.841.119.444,30	(428.919.997,30)	(15,10)
3	Pendapatan Bunga – LO	1.928.636.109,62	3.163.092.564,70	(1.234.456.455,08)	(39,03)
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	1.228.553.202,30	278.631.977,97	949.921.224,33	340,92
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	10.604.948,00	0,00	10.604.948,00	100,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	648.845.986,32	124.853.334,00	523.992.652,32	419,69
7	Pendapatan Denda Pajak – LO	2.182.956,00	1.642.809,00	540.147,00	32,88
8	Pendapatan dari Pengembalian –LO	257.073.165,00	113.559.937,00	143.513.228,00	126,38
9	Pendapatan BLUD – LO	74.250.033.568,43	45.018.294.345,52	29.231.739.222,91	64,93
10	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	693.835,00	23.799.339,00	(23.105.504,00)	(97,08)
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	19.940.957.051,00	19.268.708.980,00	672.248.071,00	3,49
12	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	0,00	82.836.250,52	(82.836.250,52)	(100,00)
Jumlah		100.716.980.268,67	71.060.604.982,01	29.656.375.286,66	41,73

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.214.286.129.603,00 mengalami penurunan sebesar Rp32.036.931.132,68 atau 28,12% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.246.323.060.735,68, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.96
Rincian Pendapatan Transfer – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer – LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	1.153.148.608.581,00	1.162.171.725.375,00	(9.023.116.794,00)	(0,78)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	61.137.521.022,00	84.151.335.360,68	(23.013.814.338,68)	(27,35)
Jumlah		1.214.286.129.603,00	1.246.323.060.735,68	(32.036.931.132,68)	(28,12)

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Realiasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.153.148.608.581,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.023.116.794,00 atau 0,78% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.162.171.725.375,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Bagi Hasil Pajak – LO	15.464.452.631,00	12.341.107.623,00	3.123.345.008,00	25,31
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	8.412.174.623,00	3.776.062.462,00	4.636.112.161,00	122,78
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	647.227.070.000,00	652.082.657.000,00	(4.855.587.000,00)	(0,74)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	271.177.191.327,00	273.535.661.290,00	(2.358.469.963,00)	(0,86)
5	DID	17.862.280.000,00	220.436.237.000,00	(202.573.957.000,00)	(91,90)
6	Dana Desa	193.005.440.000,00	0,00	193.005.440.000,00	100,00
	Jumlah	1.153.148.608.581,00	1.162.171.725.375,00	(9.023.116.794,00)	(0,78)

Tabel 5.98

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Bagi Hasil Pajak – LO	15.464.452.631,00	12.341.107.623,00	3.123.345.008,00	25,31
a)	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan – LO	7.740.831.003,00	5.021.880.202,00	2.718.950.801,00	54,14
b)	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LO	7.523.255.962,00	7.121.797.135,00	401.458.827,00	5,64
d)	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LO	200.365.666,00	197.430.286,00	2.935.380,00	1,49
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	8.412.174.623,00	3.776.062.462,00	4.636.112.161,00	122,78
a)	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LO	38.468.049,00	15.645.301,00	22.822.748,00	145,88
b)	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (<i>Land-Rent</i>) – LO	1.030.267.675,00	0,00	1.030.267.675,00	100,00
c)	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) – LO	4.790.021.181,00	2.682.851.416,00	2.107.169.765,00	78,54
d)	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	1.357.619.150,00	788.276.289,00	569.342.861,00	72,23
e)	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LO	1.195.798.368,00	289.289.456,00	906.508.912,00	313,36
f)	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi-LO	200,00	0,00	200,00	100,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.98
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	647.227.070.000,00	652.082.657.000,00	(4.855.587.000,00)	(0,74)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	271.177.191.327,00	273.535.661.290,00	(2.358.469.963,00)	(0,86)
a)	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum – LO	0,00	9.750.339.000,00	(9.750.339.000,00)	(100,00)
b)	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi (Reguler)-LO	0,00	551.250.000,00	(551.250.000,00)	(100,00)
c)	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	DAK Bidang Kesehatan – LO	0,00	37.412.878.656,00	(37.412.878.656,00)	(100,00)
e)	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Pelayanan Kesehatan Rujukan (Reguler)-LO	19.719.440.941,00	0,00	19.719.440.941,00	100,00
f)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penguatan Intervensi Stunting (Penugasan)- LO	1.194.550.000,00	0,00	1.194.550.000,00	100,00
g)	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan – LO	1.647.744.150,00	1.163.660.000,00	484.084.150,00	41,60
h)	DAK Bidang Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	DAK Bidang Lingkungan Hidup – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	DAK Bidang Pertanian – LO	6.210.844.000,00	540.000.000,00	5.670.844.000,00	1.050,16
k)	DAK Bidang Pendidikan – LO	40.424.842.432,00	50.120.386.779,00	(9.695.544.347,00)	(19,34)
l)	DAK Bidang Infrastruktur Publik Daerah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
m)	DAK Non Fisik – LO	118.957.386.804,00	126.982.219.586,00	(8.024.832.782,00)	(6,32)
n)	DAK Bidang Sentra IKM – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
o)	DAK Bidang Pariwisata – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
p)	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi (Penugasan)-LO	14.322.809.000,00	1.302.000.000,00	13.020.809.000,00	1.000,06
q)	DAK Bidang Perpustakaan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
r)	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (Penugasan) – LO	8.997.832.000,00	590.028.000,00	8.407.804.000,00	1.424,98
s)	DAK Bidang Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
t)	DAK Bidang Jalan (Reguler) – LO	31.674.757.000,00	0,00	31.674.757.000,00	100,00
u)	DAK Bidang Jalan (Penugasahan) – LO	13.801.991.000,00	0,00	13.801.991.000,00	100,00
v)	DAK Bidang Infrastruktur Jalan – LO	0,00	39.848.793.000,00	(39.848.793.000,00)	(100,00)
w)	DAK Bidang Irigasi (Penugasan) – LO	14.224.994.000,00	1.242.789.269,00	12.982.204.731,00	1.044,60
x)	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman – LO	0,00	4.031.317.000,00	(4.031.317.000,00)	(100,00)



Tabel 5.98

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
5	DID	17.862.280.000,00	220.436.237.000,00	(202.573.957.000,00)	(91,90)
6	Dana Desa	193.005.440.000,00	0,00	193.005.440.000,00	100,00
Jumlah		1.153.148.608.581,00	1.162.171.725.375,00	(9.023.116.794,00)	(0,78)

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO untuk periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp61.137.521.022,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp23.013.814.338,68 atau sebesar 27,35% bila dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp84.151.335.360,68.

Tabel 5.99

Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	56.615.793.022,00	32.614.682.188,06	24.001.110.833,94	73,59
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO	0,00	17.723.334.172,62	(17.723.334.172,62)	(100,00)
3	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi-LO	4.521.728.000,00	33.813.319.000,00	(29.291.591.000,00)	(86,63)
Jumlah		61.137.521.022,00	84.151.335.360,68	(23.013.814.338,68)	(27,35)

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp102.723.177.528,92 dan mengalami penurunan sebesar Rp6.013.857.207,48 atau (5,35%) bila dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp108.737.034.736,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100

Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah – LO	47.631.267.528,92	51.351.499.650,40	(3.720.232.121,48)	(7,24)
2	Pendapatan Lainnya – LO	0,00	341.085.086,00	(341.085.086,00)	(100,00)
3	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	55.091.910.000,00	57.044.450.000,00	(1.952.540.000,00)	(3,42)
Jumlah		102.723.177.528,92	108.737.034.736,40	(6.013.857.207,48)	(5,53)

5.4.2 BEBAN

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan



terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2021 dan tahun 2020 sebesar Rp1.361.657.210.545,31 mengalami kenaikan sebesar Rp87.283.969.398,08 atau sebesar 6,85% bila dibandingkan dengan beban tahun 2020 sebesar Rp1.274.373.241.147,23.

5.101

Rincian Beban-LO

(dalam Rupiah)

No	Beban – LO	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Operasi	908.935.666.279,31	852.326.763.989,56	56.608.902.289,75	6,64
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	190.670.561.919,00	158.890.690.741,67	31.779.871.177,33	100,00
3	Beban Transfer	262.050.982.347,00	263.155.786.416,00	(1.104.804.069,00)	(0,42)
	Jumlah	1.361.657.210.545,31	1.274.373.241.147,23	87.283.969.398,08	6,85

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi merupakan beban berupa pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Di tahun 2020 Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas masih diurai berdasarkan nama rekening sedangkan di tahun 2021 Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Hibah ditahun 2021 digabung menjadi satu nama rekening yaitu Beban Barang dan Jasa. Beban Penyusutan dan Amortisasi ditahun 2020 disatukan sedangkan ditahun 2021 diurai menjadi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Beban Penyusutan Aset Lainnya, dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud, disebabkan adanya perubahan Nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp908.935.666.279,31 mengalami kenaikan sebesar Rp56.608.902.289,75 atau sebesar 6,64% bila dibandingkan dengan beban tahun 2020 sebesar Rp852.326.763.989,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.102

Rincian Beban Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Beban Operasi	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Pegawai	546.080.013.930,00	508.073.711.514,00	38.006.302.416,00	7,48
2	Beban Barang dan Jasa	332.667.998.463,22	310.004.074.464,46	22.663.923.998,76	100,00
3	Beban Hibah	13.273.561.404,00	30.799.034.476,00	(17.525.473.072,00)	(56,90)
4	Beban Bantuan Sosial	13.764.390.000,00	988.036.000,00	12.776.354.000,00	1.293,11
6	Beban Penyisihan Piutang	340.305.929,09	445.754.436,10	(105.448.507,01)	(23,66)
7	Beban Lain-lain	2.809.396.553,00	2.016.153.099,00	793.243.454,00	39,34
	Jumlah	908.935.666.279,31	852.326.763.989,56	56.608.902.289,75	6,64



5.4.2.1.1

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp546.080.013.930,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp38.006.302.416,00 bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp508.073.711.514,00 atau 7,48% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.103
Rincian Beban Pegawai – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Pegawai – LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	390.615.561.808,00	386.698.817.248,00	3.916.744.560,00	1,01
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	24.103.813.739,00	29.097.612.688,00	(4.993.798.949,00)	(17,16)
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	651.600.000,00	450.000.000,00	201.600.000,00	44,80
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	301.607.499,00	(301.607.499,00)	(100,00)
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	176.854.199,00	(176.854.199,00)	(100,00)
6	Beban Uang Lembur – LO	0,00	1.331.739.000,00	(1.331.739.000,00)	(100,00)
7	Beban Tunjangan Profesi Guru PNSD – LO	0,00	79.028.886.880,00	(79.028.886.880,00)	(100,00)
8	Beban Tunjangan Khusus Guru – LO	0,00	10.988.194.000,00	(10.988.194.000,00)	(100,00)
9	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.808.564.998,00	0,00	116.808.564.998,00	100,00
10	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.948.402.232,00	0,00	12.948.402.232,00	100,00
11	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	469.131.153,00	0,00	469.131.153,00	100,00
12	Beban Pegawai BLUD	482.940.000,00	0,00	482.940.000,00	100,00
	Jumlah	546.080.013.930,00	508.073.711.514,00	38.006.302.416,00	7,48

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa merupakan saldo Beban barang dan jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp332.667.998.463,22 mengalami kenaikan sebesar Rp22.663.923.998,76 atau sebesar 7,31% bila dibandingkan dengan beban tahun 2020 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp310.004.074.464,46 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104
Rincian Beban Barang dan Jasa – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Barang dan Jasa – LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Barang Pakai Habis	80.160.636.166,02	32.756.539.429,87	47.404.096.736,15	144,72
2	Beban Barang Tak habis pakai	16.959.000,00	0,00	16.959.000,00	100,00
3	Beban Jasa Kantor	65.011.192.925,26	114.700.786.690,00	(49.689.593.764,74)	(43,32)



Tabel 5.104
Rincian Beban Barang dan Jasa – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Barang dan Jasa – LO	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	31.400.141.204,00	25.808.753.557,00	5.591.387.647,00	21,66
5	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.509.972.500,00	1.087.550.000,00	7.422.422.500,00	682,49
6	Beban Sewa gedung dan bangunan	1.171.439.082,19	389.681.605,48	781.757.476,71	200,61
7	Beban Jasa konsultasi konstruksi	2.390.264.800,00	4.639.415.800,00	(2.249.151.000,00)	(48,48)
8	Beban Jasa konsultasi Non Konstruksi	393.180.000,00	117.000.000,00	276.180.000,00	236,05
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	262.327.500,00	0,00	262.327.500,00	100,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.271.894.724,00	645.480.300,00	626.414.424,00	97,05
11	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak daerah bagi pegawai Non ASN	96.460.000,00	0,00	96.460.000,00	100,00
12	Beban Pemeliharaan Tanah	1.078.810.825,00	3.884.501.666,00	(2.805.690.841,00)	(72,23)
13	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.863.836.806,00	5.639.111.893,00	(2.775.275.087,00)	(49,21)
14	Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan	4.781.541.156,00	6.920.178.252,17	(2.138.637.096,17)	(30,90)
15	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.032.400.325,00	4.221.899.376,00	(3.189.499.051,00)	(75,55)
16	Beban Perjalanan Dinas	30.685.467.432,00	29.334.613.525,00	1.350.853.907,00	4,60
17	Beban Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain masyarakat	647.950.000,00	4.210.120.000,00	(3.562.170.000,00)	(84,61)
18	Beban barang dan jasa BOS	45.285.026.740,00	27.814.894.214,00	17.470.132.526,00	62,81
19	Beban Barang dan Jasa BLUD	55.608.497.277,75	47.833.548.155,94	7.774.949.121,81	16,25
	Jumlah	332.667.998.463,22	310.004.074.464,46	22.663.923.998,76	7,31

5.4.2.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban hibah per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.273.561.404,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp17.525.473.072,00 atau (56,90%) dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2020 sebesar Rp30.799.034.476,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.105
Rincian Beban Hibah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Hibah – LO	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	150.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	200,00
2	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	14.136.367.222,00	(14.136.367.222,00)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	3.601.500.000,00	(3.601.500.000,00)	(100,00)
4	Beban Hibah kepada Loan Readsi	0,00	7.501.047.350,00	(7.501.047.350,00)	(100,00)
5	Beban Hibah kepada Partai Politik	1.170.619.904,00	1.170.619.904,00	0,00	0,00



Tabel 5.105
Rincian Beban Hibah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Hibah – LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
6	Beban Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	0,00	4.339.500.000,00	(4.339.500.000,00)	(100,00)
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.062.700.000,00	0,00	8.062.700.000,00	0,00
8	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.890.241.500,00	0,00	3.890.241.500,00	0,00
	Jumlah	13.273.561.404,00	30.799.034.476,00	(17.525.473.072,00)	(56,90)

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp13.764.390.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp12.776.354.000 atau 1.293,11% dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial tahun 2020 Rp988.036.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.106
Rincian Beban Bantuan Sosial – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Bantuan Sosial – LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	13.202.390.000,00	892.000.000,00	12.310.390.000,00	1.380,09
2	Beban Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	0,00	96.036.000,00	(96.036.000,00)	(100,00)
3	Beban Bantuan Sosial yang Direncanakan kepada Individu	562.000.000,00	0,00	562.000.000,00	0,00
	Jumlah	13.764.390.000,00	988.036.000,00	12.776.354.000,00	1.293,11

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp340.305.929,09 dan mengalami penurunan sebesar Rp105.448.507,01 atau 23,66% dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp445.754.436,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.107
Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Penyisihan Piutang – LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	10.286.172,08	294.969.088,20	(284.682.916,12)	(96,51)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	429.488,50	3.717.292,25	(3.287.803,75)	(88,45)
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.981.391,23	26.533.630,03	3.447.761,20	(13,00)
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	169.283.307,95	53.653.040,25	115.630.267,70	215,51
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	100.801.484,80	61.995.602,82	38.805.881,98	62,6



Tabel 5.107
Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Penyisihan Piutang – LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
6	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	29.524.084,53	4.885.782,55	24.638.301,98	504,29
Jumlah		340.305.929,09	445.754.436,10	(105.448.507,01)	(23,66)

5.4.2.1.6 Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain merupakan Beban yang didalamnya terdapat Beban Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.809.396.553,00 mengalami kenaikan sebesar Rp793.243.454,00 atau 39,34% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp2.016.153.099,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.108

Rincian Beban Lain-lain – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Lain-lain – LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	2.597.114.378,00	1.803.507.524,00	793.606.854,00	44,00
2	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	212.177.175,00	(212.177.175,00)	(100,00)
3	Beban Lain-lain	212.282.175,00	468.400,00	211.813.775,00	45.220,70
Jumlah		2.809.396.553,00	2.016.153.099,00	793.243.454,00	39,34

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp190.670.561.919,00 mengalami kenaikan sebesar Rp31.779.871.177,33 atau 20,00% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp158.890.690.741,67 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.109

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	48.586.237.435,00	44.811.709.816,27	3.774.527.618,73	8,42
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.405.008.912,00	25.836.977.874,00	(4.431.968.962,00)	(17,15)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	118.631.475.646,00	86.472.723.736,40	32.158.751.909,60	37,19
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	3.991.760,00	0,00	3.991.760,00	100,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak berwujud	2.043.848.166,00	1.769.279.315,00	274.568.851,00	15,52
Jumlah		190.670.561.919,00	158.890.690.741,67	31.779.871.177,33	20,00



5.4.2.2.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.586.237.435,00 dan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.110
Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Alat-alat Besar Darat	1.654.065.041,00	1.654.072.290,00	(7.249,00)	(0,00)
2	Beban Penyusutan Alat-alat Besar Apung	3.671.250,00	3.671.250,00	0,00	0,00
3	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	305.882.789,00	240.725.004,52	65.157.784,48	27,07
4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	9.184.650.948,00	11.275.846.034,00	(2.091.195.086,00)	(18,55)
5	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Tak Bermotor	3.251.250,00	1.062.500,00	2.188.750,00	206,00
6	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	67.100.833,00	65.442.500,00	1.658.333,00	2,53
7	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
8	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	40.689.786,00	39.376.468,00	1.313.318,00	3,34
9	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	16.499.020,00	28.918.573,00	(12.419.553,00)	(42,95)
10	Beban Penyusutan Alat Ukur	76.867.834,00	107.742.241,00	(30.874.407,00)	(28,66)
11	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	1.290.489.775,00	506.077.883,77	784.411.891,23	155,00
12	Beban Penyusutan Alat Kantor	2.757.563.050,00	2.173.031.173,17	584.531.876,83	26,90
13	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	5.804.020.317,00	5.987.039.152,00	(183.018.835,00)	(3,06)
14	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat	823.299.186,00	712.546.487,00	110.752.699,00	15,54
15	Beban Penyusutan Alat Studio	551.925.911,00	861.356.299,26	(309.430.388,26)	(35,92)
16	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	115.710.975,00	198.359.965,00	(82.648.990,00)	(41,67)
17	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	167.696.544,00	178.919.342,00	(11.222.798,00)	(6,27)
18	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	8.565.792.873,00	8.670.235.100,65	(104.442.227,65)	(1,20)
19	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	171.071.376,00	38.626.802,00	132.444.574,00	342,88
20	Beban Penyusutan Unit-unit Laboratorium	3.217.596.620,00	3.084.706.814,72	132.889.805,28	4,31
21	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir	7.048.978,00	0,00	7.048.978,00	100,00
22	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	22.377.227,00	(22.377.227,00)	(100,00)
23	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.247.656.888,00	1.932.856.487,47	(685.199.599,47)	(35,45)
24	Beban Penyusutan Alat laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8.546.330,00	11.148.949,00	(2.602.619,00)	(23,34)



Tabel 5.110

Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
25	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	7.429.502,00	10.212.985,00	(2.783.483,00)	(27,25)
26	Beban Penyusutan alat laboratorium lingkungan Hidup	4.334.880,00	9.459.552,00	(5.124.672,00)	(54,17)
27	Beban Penyusutan peralatan laboratorium Hidrox	78.655.675,00	4.310.100,00	74.345.575,00	1.724,92
28	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
29	Beban Penyusutan Komputer	10.374.491.815,00	5.579.391.320,71	4.795.100.494,29	85,94
30	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	1.306.520.763,00	0,00	1.306.520.763,00	100,00
31	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin	663.967,00	0,00	663.967,00	100,00
32	Beban Penyusutan Sumur	9.719.833,00	0,00	9.719.833,00	100,00
33	Beban Penyusutan Alat Pelindung	26.074.878,00	0,00	26.074.878,00	100,00
34	Beban Penyusutan Alat SAR	43.957.496,00	0,00	43.957.496,00	100,00
35	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan	43.252.864,00	0,00	43.252.864,00	100,00
36	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	44.035.368,00	0,00	44.035.368,00	100,00
37	Beban Penyusutan Unit Peralatan	333.334,00	0,00	333.334,00	100,00
38	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	499.266.090,00	0,00	499.266.090,00	100,00
39	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	63.103.396,00	0,00	63.103.396,00	100,00
40	Beban Penyusutan Senjata Api	0,00	190.000,00	(190.000,00)	(100,00)
41	Beban Penyusutan Persetujuan Non Senjata Api	0,00	25.417.283,00	(25.417.283,00)	(100,00)
42	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan perlindungan	0,00	1.385.590.032,00	(1.385.590.032,00)	(100,00)
Jumlah		48.586.237.435,00	44.811.709.816,27	3.774.527.618,73	8,42

5.4.2.2.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.405.008.912,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.431.968.962,00 atau 17,15% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp25.836.977.874,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.111
Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan bangunan gedung tempat kerja	19.444.288.399,00	22.762.016.398,00	(3.317.727.999,00)	(14,58)
2	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	1.204.618.688,00	2.337.626.724,00	(1.133.008.036,00)	(48,47)
3	Bangunan Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	89.754.000,00	120.839.025,00	(31.085.025,00)	(25,72)
4	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan	757.000,00	899.500,00	(142.500,00)	(15,84)
5	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	665.590.825,00	615.596.227,00	49.994.598,00	8,12
	Jumlah	21.405.008.912,00	25.836.977.874,00	(4.431.968.962,00)	(17,15)

5.4.2.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2021 sebesar Rp118.631.475.646,00 mengalami kenaikan sebesar Rp32.158.751.909,60 atau 37,19% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp86.472.723.736,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112
Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Jalan	99.308.494.144,00	64.759.248.664,40	34.549.245.479,60	53,35
2	Beban Penyusutan Jembatan	2.690.823.792,00	4.901.400.795,00	(2.210.577.003,00)	(45,10)
3	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	2.376.908.033,00	2.861.389.200,00	(484.481.167,00)	(16,93)
4	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	119.568.894,00	136.400.118,00	(16.831.224,00)	(12,34)
5	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa dan Polder	11.311.600,00	10.474.750,00	836.850,00	7,99
7	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	11.368.512.325,00	10.680.349.828,00	688.162.497,00	6,44
8	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	33.756.180,00	33.756.180,00	0,00	100,00
9	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	1.151.884.898,00	1.378.647.951,00	(226.763.053,00)	(16,45)
10	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	204.987.528,00	117.566.055,00	87.421.473,00	74,36
11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	425.987.100,00	426.841.697,00	(854.597,00)	(0,20)
12	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	279.870.594,00	169.156.950,00	110.713.644,00	65,45
13	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	100,00
14	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	44.740.258,00	45.176.756,00	(436.498,00)	(0,97)



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	1.540.000,00	770.000,00	770.000,00	100,00
16	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	117.594.520,00	229.036.383,00	(111.441.863,00)	(48,66)
17	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	169.347.792,00	316.366.065,00	(147.018.273,00)	(46,47)
18	Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan	8.343.285,00	8.434.951,00	(91.666,00)	(1,09)
19	Beban Penyusutan Instalasi Gas	35.416.600,00	44.613.048,00	(9.196.448,00)	(20,61)
20	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	64.915.000,00	64.915.000,00	0,00	100,00
21	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	15.362.266,00	16.130.816,00	(768.550,00)	(4,76)
22	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	88.372.262,00	126.523.114,00	(38.150.852,00)	(30,15)
23	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	29.485.499,00	12.474.649,00	17.010.850,00	136,36
24	Beban Penyusutan Jaringan Gas	84.253.076,00	133.050.766,00	(48.797.690,00)	(36,68)
Jumlah		118.631.475.646,00	86.472.723.736,40	32.158.751.909,60	37,19

5.4.2.2.4 Beban Penyusutan Aset Lainnya

Beban Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp3.991.760,00 dan Rp0,00

5.4.2.2.5 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.043.848.166 mengalami kenaikan sebesar Rp247.568.851,00 atau 15,52% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp1.769.279.315,00

Tabel 5.113

Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam Rupiah)

No.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	3.060.000,00	7.660.000,00	(4.600.000,00)	(60,05)
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	157.300.555,00	1.761.619.315,00	(1.604.318.760,00)	(91,07)
3	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.875.256.778,00	0,00	1.875.256.778,00	100,00
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	8.230.833,00	0,00	8.230.833,00	100,00
Jumlah		2.043.848.166,00	1.769.279.315,00	274.568.851,00	15,52

5.4.2.3 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan Beban Transfer per 31 Desember 2021 sebesar Rp262.050.982.347,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.104.804.069 atau 0,42% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp263.155.786.416,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.3.1 Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil merupakan Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.795.532.359,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp145.192.943,00 atau 5,48% bila



dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp2.650.339.416,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114
Rincian Beban Bagi Hasil – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Bagi Hasil - LO	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.167.392.308,00	2.053.811.784,00	113.580.524,00	5,53
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	628.140.051,00	596.527.632,00	31.612.419,00	5,30
Jumlah		2.795.532.359,00	2.650.339.416,00	145.192.943,00	5,48

5.4.2.3.2 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan merupakan Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp259.255.449.988,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.249.997.012,00 atau 0,48% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp260.505.447.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115
Rincian Beban Bantuan Keuangan – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Bantuan Keuangan - LO	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	259.255.449.988,00	0,00	259.255.449.988,00	100,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Alokasi Dana Desa)	0,00	67.500.007.000,00	(67.500.007.000,00)	(100,00)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa)	0,00	193.005.440.000,00	(193.005.440.000,00)	(100,00)
Jumlah		259.255.449.988,00	260.505.447.000,00	(1.249.997.012,00)	(0,48)

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.116
Rincian Surplus/Defisit dari Operasi – LO

(dalam Rupiah)

No.	Surplus / Defisit dari Operasi	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	1.457.704.440.566,60	1.469.042.664.292,42	(11.338.223.725,82)	(0,77)
2	Beban	1.361.657.210.545,31	1.274.373.241.147,23	87.283.969.398,08	6,85
Surplus/Defisit dari Operasi (1-2)		96.047.230.021,29	194.669.423.145,19	(98.622.193.123,90)	(50,66)



5.4.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2021 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp556.641.392,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO

(dalam Rupiah)

No.	Surplus / Defisit dari Non Operasional	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	0,00	556.641.392,00	556.641.392,00	100
2	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Operasi		0,00	556.641.39200	556.641.392,00	100

5.4.5 POS LUAR BIASA

5.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa pada tahun 2021 dan tahun 2020 sebesar 0,00 dan 0,00.

5.4.5.2 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa pada tahun 2021 dan tahun 2020 sebesar Rp1.421.335.930,00 dan Rp7.522.248.111,00

Tabel 5.118
Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa– LO

(dalam Rupiah)

No.	Suplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Luar Biasa	1.421.335.930,00	7.522.248.111,00	(6.100.912.181,00)	(81,10)
Jumlah		(1.421.335.930,00)	(7.522.248.111,00)	6.100.912.181,00	(81,10)



5.4.6 SURPLUS/DEFISIT –LO

Surplus/Defisit- LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 terjadi surplus sebesar Rp94.625.894.091,29 dan Rp187.703.816.426,19.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari Laporan Keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas Investasi Non Keuangan, dan aktivitas pendanaan. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran.

Realisasi Arus Kas Bersih Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp7.761.813.209,91) terjadi penurunan sebesar Rp37.693.708.794,32 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp29.931.895.584,41 terdiri atas:

Tabel 5.119
Rincian Arus Kas Bersih

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	Aktivitas Operasi	243.567.586.848,18	318.507.021.654,41	(74.939.434.806,23)
2	Aktivitas Investasi	(247.004.109.711,09)	(285.584.000.690,00)	38.579.890.978,91
3	Aktivitas Pendanaan	(4.317.000.000,00)	(2.999.850.000,00)	(1.317.150.000,00)
4	Aktivitas Transitoris	(8.290.347,00)	8.724.620,00	434.273,00
	Arus Kas Bersih	(7.761.813.209,91)	29.931.895.584,41	(37.693.708.794,32)

Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari Arus Keluar Kas di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD.

Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD begitu pula dengan sisa dana yang berada di 22 FKTP Dinas Kesehatan, sisa Dana BOS, dan sisa Dana BLUD RSUD Batara Guru merupakan bagian dari Kas di Kas Daerah walaupun sisa dananya per 31 Desember 2021 tidak disetor di Kas Daerah. Realisasi kas bersih yang dapat dirinci dan dijelaskan adalah sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas



bersih aktifitas operasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.120
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	Arus Kas Masuk	1.404.479.365.394,18	1.451.196.842.647,71	(46.717.477.253,53)
2	Arus Kas Keluar	1.160.911.778.546,00	1.132.689.820.993,30	28.221.957.552,70
	Arus Kas Bersih	243.567.586.848,18	318.507.021.654,41	(74.939.434.806,23)

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp243.567.586.848,19 mengalami penurunan sebesar Rp74.939.434.806,23 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp318.507.021.654,41. Realisasi arus kas aktivitas operasi yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.404.479.365.394,18 mengalami penurunan sebesar Rp46.717.477.253,53 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.451.196.842.647,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	Penerimaan Pajak Daerah	26.841.950.253,94	23.594.549.937,60	3.247.400.316,34
2	Penerimaan Retribusi Daerah	7.211.565.399,00	6.694.425.568,00	517.139.831,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.310.079.034,00	5.220.161.952,00	89.917.082,00
4	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	93.044.224.384,24	86.883.793.283,49	6.160.431.100,75
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	15.464.452.631,00	12.341.107.623,00	3.123.345.008,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	8.412.174.623,00	3.776.062.462,00	4.636.112.161,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	647.227.070.000,00	652.082.657.000,00	(4.855.587.000,00)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	271.177.191.327,00	273.535.661.290,00	(2.358.469.963,00)
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	210.867.720.000,00	220.436.237.000,00	(9.568.517.000,00)
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	48.012.052.973,00	29.012.328.779,00	18.999.724.194,00
11	Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya	0,00	17.723.334.172,62	(17.723.334.172,62)
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi	4.521.728.000,00	33.813.319.000,00	(29.291.591.000,00)
13	Penerimaan Hibah	66.389.156.769,00	86.083.204.580,00	(19.694.047.811,00)
	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	1.404.479.365.394,18	1.451.196.842.647,71	(46.717.477.253,53)



Realisasi Arus Masuk Kas sejumlah Rp1.404.479.365.394,18 merupakan Arus Masuk Kas atas Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Saldo Penerimaan Pajak Daerah sejumlah Rp26.841.950.253,94 merupakan Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.122
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Pajak Hotel	132.307.251,00	59.620.804,00	72.686.447,00
2	Pajak Restoran	1.872.197.396,00	1.619.764.217,00	252.433.179,00
3	Pajak Hiburan	7.400.000,00	9.685.000,00	(2.285.000,00)
4	Pajak Reklame	687.167.259,00	586.412.675,00	100.754.584,00
5	Pajak Penerangan Jalan	11.260.065.446,00	10.686.182.683,00	573.882.763,00
6	Pajak Air Tanah	15.406.996,44	14.467.280,10	939.716,34
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.751.373.174,00	2.677.206.410,00	74.166.764,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	7.408.907.803,00	6.084.244.037,00	1.324.663.766,00
9	Pajak BPHTB	2.704.124.928,50	1.853.016.831,50	851.108.097,00
10	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	3.950.000,00	(950.000,00)
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah		26.841.950.253,94	23.594.549.937,60	3.247.400.316,34

1.1.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah sejumlah Rp7.211.565.399,00 merupakan Saldo Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.123
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.138.692.600,00	3.580.119.023,00	(441.426.423,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	141.090.000,00	136.100.000,00	4.990.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.686.193.000,00	1.279.417.000,00	406.776.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	93.450.000,00	376.668.000,00	(283.218.000,00)
5	Retribusi Tempat Pelelangan	17.060.000,00	11.378.000,00	5.682.000,00
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	19.410.000,00	10.481.000,00	8.929.000,00
8	Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa	6.090.000,00	1.590.000,00	4.500.000,00



Tabel 5.123

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	22.500.000,00	18.200.000,00	4.300.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	72.750.000,00	40.250.000,00	32.500.000,00
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	546.101.349,00	829.427.795,00	(283.326.446,00)
12	Retribusi Izin Trayek	1.265.000,00	3.605.000,00	(2.340.000,00)
13	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	32.516.000,00	31.416.000,00	1.100.000,00
14	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	255.340.000,00	118.895.000,00	136.445.000,00
15	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	946.628.000,00	7.920.000,00	938.708.000,00
16	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	232.479.450,00	248.958.750,00	(16.479.300,00)
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah		7.211.565.399,00	6.694.425.568,00	517.139.831,00

1.1.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bagian Laba BUMD)

Realisasi penerimaan Bagian Laba BUMD Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp5.310.079.034,00 dan Rp5.220.161.952,00 yang berasal dari :

Tabel 5.124

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Bagian Laba atas Penyerrtaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.310.079.034,00	5.220.161.952,00	89.917.082,00
Jumlah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		5.310.079.034,00	5.220.161.952,00	89.917.082,00

1.1.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah adalah penerimaan diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp93.044.224.384,24 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp86.883.793.283,49 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.125

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Jasa Giiro	2.412.199.447,00	2.841.119.444,30	(428.919.997,30)
2	Pendapatan Bunga	1.928.636.109,62	3.163.092.564,70	(1.234.456.455,08)
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.103.901.842,30	311.192.785,97	792.709.056,33



Tabel 5.125

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.604.948,00	0,00	10.604.948,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	648.845.986,32	124.853.334,00	523.992.652,32
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.182.956,00	1.642.809,00	540.147,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	693.835,00	23.799.339,00	(23.105.504,00)
8	Pendapatan BLUD	66.739.129.044,00	60.702.258.677,00	6.036.870.367,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	257.073.165,00	113.559.937,00	143.513.228,00
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	19.940.957.051,00	19.577.258.950,00	363.698.101,00
11	Lain-lain PAD yang Sah lainnya	0,00	25.015.442,52	(25.015.442,52)
Jumlah Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah		93.044.224.384,24	86.883.793.283,49	6.160.431.100,75

1.1.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp15.464.452.631,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.126

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	7.740.831.003,00	5.021.880.202,00	2.718.950.801,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 21	6.992.326.037,00	0,00	0,00
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 / 29	530.929.925,00	7.121.797.135,00	(6.590.867.210,00)
4	Bagi Hasil Cukai Tembakau	200.365.666,00	197.430.286,00	2.935.380,00
Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		15.464.452.631,00	12.341.107.623,00	(3.123.345.008,00)

1.1.1.1.6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.412.174.623,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.776.062.462,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.127

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	38.468.049,00	15.645.301,00	22.822.748,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2	Bagi Hasil dari iuran Tetap (<i>Land Rent</i>)	1.030.267.675,00	0,00	1.030.267.675,00
3	Bagi Hasil dari iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi (<i>Royalti</i>)	4.790.021.181,00	2.682.851.416,00	2.107.169.765,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.357.619.150,00	788.276.289,00	569.342.861,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	200,00	0,00	200,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.195.798.368,00	289.289.456,00	906.508.912,00
Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		8.412.174.623,00	3.776.062.462,00	4.636.112.161,00

1.1.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Umum

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp647.227.070.000,00 dan Rp652.082.657.000,00

1.1.1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp271.177.191.327,00 dan Rp273.535.661.290,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.128

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Dana Alokasi Khusus

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	39.848.793.000,00	(39.848.793.000,00)
2	DAK Bidang Jalan Reguler	31.674.757.000,00	0,00	31.674.757.000,00
3	DAK Bidang Jalan Penugasan	13.801.991.000,00	0,00	13.801.991.000,00
4	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	205.661.117,00	0,00	205.661.117,00
5	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-SD	24.165.988.939,00	0,00	24.165.988.939,00
6	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	15.570.210.426,00	0,00	15.570.210.426,00
7	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	482.981.950,00	0,00	482.981.950,00
8	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	9.731.947.108,00	0,00	9.731.947.108,00
9	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	2.882.185.045,00	0,00	2.882.185.045,00
10	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	5.679.380.788,00	0,00	5.679.380.788,00
11	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.144.550.000,00	0,00	1.144.550.000,00
12	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.425.928.000,00	0,00	1.425.928.000,00
13	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
14	DAK Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana	6.210.844.000,00	0,00	6.210.844.000,00



Tabel 5.128

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Dana Alokasi Khusus
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
15	dan Prasarana fisik dasar pembangunan pertanian DAK Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.647.744.150,00	0,00	1.647.744.150,00
16	DAK Bidang Air Minum-Penugasan	8.997.832.000,00	590.028.000,00	8.407.804.000,00
17	DAK Bidang Sanitasi-Penugasan	14.322.809.000,00	1.302.000.000,00	13.020.809.000,00
18	DAK Bidang Irigasi-Penugasan	14.224.994.000,00	1.242.789.269,00	12.982.204.731,00
19	Bidang Infrastruktur Air Minum (Reguler)	0,00	9.750.339.000,00	(9.750.339.000,00)
20	Bidang Infrastruktur Sanitasi (Reguler)	0,00	551.250.000,00	(551.250.000,00)
21	Bidang Kesehatan	0,00	37.412.878.656,00	(37.412.878.656,00)
22	Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	1.163.660.000,00	(1.163.660.000,00)
23	Bidang Pertanian	0,00	540.000.000,00	(540.000.000,00)
24	Bidang Pendidikan	0,00	50.120.386.779,00	(50.120.386.779,00)
25	Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	4.031.317.000,00	(4.031.317.000,00)
26	DAK Non Fisik	118.957.386.804,00	126.982.219.586,00	(8.024.832.782,00)
Jumlah Penerimaan Dana Alokasi Khusus		271.177.191.327,00	273.535.661.290,00	(2.358.469.963,00)

1.1.1.1.9 Penerimaan Dana Penyesuaian

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Penyesuaian Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp210.867.720.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 Dana Penyesuaian sebesar Rp220.436.237.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.129

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Dana Penyesuaian
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Dana Desa	193.005.440.000,00	193.005.440.000,00	0,00
2	Dana Insentif Daerah	17.862.280.000,00	27.430.797.000,00	(9.568.517.000,00)
Jumlah Penerimaan Dana Penyesuaian		210.867.720.000,00	220.436.237.000,00	(9.568.517.000,00)

1.1.1.1.10 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya



merupakan transfer antar daerah. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sejumlah Rp48.012.052.973,00 dan Rp29.012.328.779,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.130

Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Bagi Hasil	48.012.052.973,00	29.012.328.779,00	18.999.724.194,00
Jumlah Penerimaan Bagi Hasil Pajak		48.012.052.973,00	29.012.328.779,00	18.999.724.194,00

1.1.1.11 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya merupakan transfer Pemerintah Provinsi. Realisasi penerimaan bagi hasil Lainnya Pemerintah Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sejumlah Rp0,00 dan Rp17.723.334.172,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.131

Rincian Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Transfer dari Pemerintah Daerah lainnya	0,00	17.723.334.172,62	(17.723.334.172,62)
Jumlah Dana Bagi Hasil Lainnya		0,00	17.723.334.172,62	(17.723.334.172,62)

1.1.1.12 Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi merupakan transfer Pemerintah Provinsi. Realisasi penerimaan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sejumlah Rp4.521.728.000,00 dan Rp33.813.319.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.132

Rincian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.521.728.000,00	33.813.319.000,00	(29.291.591.000,00)
Jumlah Penerimaan Bantuan Keuangan		4.521.728.000,00	33.813.319.000,00	(29.291.591.000,00)



1.1.1.1.13 Penerimaan Pendapatan Hibah

Jumlah tersebut merupakan realisasi Penerimaan Pendapatan Hibah Kabupaten Luwu Periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sejumlah Rp66.389.156.769,00 dan Rp86.083.204.580,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133
Rincian Penerimaan Pendapatan Hibah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	11.297.246.769,00	86.083.204.580,00	(74.785.957.811,00)
2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55.091.910.000,00	0,00	55.091.910.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah		66.389.156.769,00	86.083.204.580,00	(19.694.047.811,00)

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Realisasi Arus Keluar Kas sejumlah Rp1.160.911.778.546,00 merupakan saldo Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

Tabel 5.134
Rincian Arus Kas Keluar- Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	552.095.552.930,00	501.489.422.514,00	50.606.130.416,00
2	Belanja Barang	327.508.336.935,00	315.280.744.276,30	12.227.592.658,70
3	Belanja Hibah	13.273.561.404,00	44.001.424.476,00	(30.727.863.072,00)
4	Belanja Bantuan Sosial	562.000.000,00	988.036.000,00	(426.036.000,00)
5	Belanja Bantuan Keuangan	259.255.458.988,00	260.505.447.000,00	(1.249.988.012,00)
6	Belanja Tak Terduga	1.421.335.930,00	7.774.407.311,00	(6.353.071.381,00)
7	Bagi Hasil Pajak	2.167.392.308,00	2.053.811.784,00	113.580.524,00
8	Bagi Hasil Retribusi	628.140.051,00	596.527.632,00	31.612.419,00
9	Investasi Jangka Pendek	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.160.911.778.546,00	1.132.689.820.993,30	28.221.957.552,70

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 terjadi defisit sebesar Rp247.004.109.711,09 dan Rp285.584.000.690,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.135

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Arus Kas Masuk	37.200.000,00	767.885.205,00	(730.685.205,00)
2	Arus Kas Keluar	247.041.309.711,09	286.351.885.895,00	(39.310.576.183,91)
Arus Kas Bersih		(247.004.109.711,09)	(285.584.000.690,00)	38.579.890.978,91

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 terjadi surplus sebesar Rp37.200.000,00 dan Rp767.885.205,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	583.569.205,00	(583.569.205,00)
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	37.200.000,00	65.400.000,00	(28.200.000,00)
3	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	118.916.000,00	(118.916.000,00)
Jumlah Arus Kas Masuk Non Keuangan		37.200.000,00	767.885.205,00	(730.685.205,00)

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 terjadi Defisit sebesar Rp247.041.309.711,09 dan Rp286.351.885.895,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.137

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Perolehan Tanah	71.067.680,00	228.592.550,00	(157.524.870,00)
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	39.388.536.203,00	49.722.400.159,00	(10.333.863.956,00)
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	48.455.261.295,09	60.253.228.410,00	(11.797.967.114,91)
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	148.769.092.132,00	142.180.178.739,00	6.588.913.393,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	10.357.352.401,00	33.967.486.037,00	(23.610.133.636,00)
Jumlah Arus Kas Keluar Non Keuangan		247.041.309.711,09	286.351.885.895,00	(39.310.576.183,91)



5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Arus Kas Masuk	0,00	150.000,00	(150.000,00)
2	Arus Kas Keluar	4.317.000.000,00	3.000.000.000,00	1.317.000.000,00
	Arus Kas Bersih	(4.317.000.000,00)	(2.999.850.000,00)	(1.317.150.000,00)

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp4.317.000.000,00) yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.139
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir	0,00	150.000,00	(150.000,00)
	Jumlah Arus Kas Masuk Pendanaan	0,00	150.000,00	(150.000,00)

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Realisasi Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2021 untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp4.317.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.140
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.317.000.000,00	3.000.000.000,00	1.317.000.000,00
2	Pengembalian Dana BOS	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	4.317.000.000,00	3.000.000.000,00	1.317.000.000,00

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.141

Rincian Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Arus Kas Masuk	86.987.729.473,00	73.441.534.595,00	13.546.194.878,00
2	Arus Kas Keluar	86.996.019.820,00	73.432.809.975,00	13.563.209.845,00
	Arus Kas Bersih	(8.290.347,00)	8.724.620,00	(17.014.967,00)

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2021 sebesar Rp86.987.729.473,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.142

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	86.987.729.473,00	73.441.534.595,00	13.546.194.878,00
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	86.987.729.473,00	73.441.534.595,00	13.546.194.878,00

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Realisasi kas keluar dari aktivitas Transitoris yang digunakan untuk pengeluaran perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan pembayaran Utang PFK 2021 terdiri dari:

Tabel 5.143

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	86.987.729.473,00	73.431.786.067,00	13.555.943.406,00
2	Pembayaran Utang PFK 2020	8.290.347,00	1.023.908,00	7.266.439,00
	Jumlah Arus Kas Keluar Non Anggaran	86.996.019.820,00	73.432.809.975,00	13.563.209.845,00

5.5.5 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir Kas sebesar Rp61.046.784.136,01 merupakan jumlah keseluruhan kas per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp7.839.523.275,91 dari saldo kas tahun 2020 sebesar Rp68.886.307.411,92 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.144
Rincian Saldo Akhir Kas

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2021	2020	
1	2	3	4	5
1	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(7.761.813.209,91)	29.931.895.584,41	(37.693.708.794,32)
2	Saldo Awal Kas di BUD & Bendahara Pengeluaran dengan rincian:	68.788.053.345,92	38.856.157.761,51	29.931.895.584,41
	- Kas di Kas Daerah	47.385.606.493,92	17.164.593.492,51	30.221.013.001,41
	-Kas di Bendahara Pengeluaran	17.432.949,00	13.399.792,00	4.033.157,00
	-Kas di BLUD	20.615.902.769,00	12.376.236.640,00	8.239.666.129,00
	- Kas Dana BOS	480.900.859,00	1.044.951.829,00	(564.050.970,00)
	- Kas Dana Kapitasi pada FKTP	278.461.747,00	8.255.952.100,00	(7.977.490.353,00)
	- Kas Lainnya	9.748.528,00	1.023.908,00	8.724.620,00
3	Saldo Akhir Kas BUD & Bendahara Pengeluaran (1+2)	61.026.240.136,01	68.788.053.345,92	(7.761.813.209,91)
4	Saldo Akhir Kas Di Bendahara Penerimaan	20.544.000,00	98.254.066,00	(77.710.066,00)
	Saldo Akhir Kas	61.046.784.136,01	68.886.307.411,92	(7.839.523.275,91)

Terdapat selisih antara SiLPA Tahun 2021 dengan saldo Kas Tahun 2021 di Laporan Arus Kas sebesar Rp3.608.894.272,00. Selisih ini terjadi karena penghapusan utang PFK tahun 2006 berdasarkan SK Bupati Luwu nomor 677/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp389.647.547,00 dan Deposito BLUD RSUD Batara Guru yang jatuh temponya melewati 3 bulan sehingga disajikan sebagai Investasi Jangka Pendek sebesar Rp4.000.000.000,00, dan Kas Lainnya sebesar Rp1.458.181,00,00 yang merupakan saldo utang PFK di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.145
Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
1	2	3	4
1	Ekuitas Awal	2.677.959.851.624,10	2.474.043.787.495,29
2	Surplus/Defisit LO	94.625.894.091,29	187.703.816.426,19
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
4	Koreksi Ekuitas Lainnya	(155.115.299.842,97)	16.212.247.702,62
5	EKUITAS AKHIR	2.617.470.445.872,42	2.677.959.851.624,10

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut:



- 1) Saldo awal ekuitas tahun 2021 sebesar Rp2.677.959.851.624,10 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020;
- 2) Surplus/defisit-LO sebesar Rp94.625.894.091,29 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021.
- 3) Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp155.115.299.842,97) dapat dijelaskan sebagai dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.146
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2021	2020
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:			
I	Koreksi ekuitas lainnya		
a)	Koreksi Aset Tetap	41.964.989,92	22.252.685.691,98
b)	Koreksi Extracompatible/Aset Rusak berat	(5.432.032.233,66)	(6.943.966.246,49)
c)	Mutasi barang	(448.988.860,00)	(2.493.715.453,00)
d)	Mutasi Koreksi Lain-lain:	(149.276.243.739,23)	3.397.243.710,13
	1 Koreksi Aset Lain-lain	3.659.895.647,00	0,00
	2 Koreksi Penghapusan Piutang PBB	(193.199.666,54)	(1.381.673.188,00)
	3 Mutasi Piutang Lainnya	(932.414.402,00)	0,00
	4 Koreksi Penyisihan Piutang	210.606.788,20	(271.758.695,36)
	5 Mencatat Koreksi Beban	0,00	(74.645.000,00)
	6 Koreksi hutang PFK	389.647.547,00	160.160.415,55
	7 Mencatat koreksi hutang beban	(114.759.200,00)	0,00
	8 Koreksi hutang kepada pihak ketiga	(84.955.234,00)	0,00
	9 Koreksi pendapatan diterima di muka	22.078.769,96	168.358.731,00
	10 Koreksi saldo akumulasi penyusutan tahun sebelumnya	(152.181.251.108,85)	264.601.771,00
	11 Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap yang dirusakberatkan	0,00	2.731.611.797,00
	12 Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan	(51.892.880,00)	1.800.587.878,94
II	Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya	(155.115.299.842,97)	16.212.247.702,62

Penjelasan Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp155.115.299.842,97) sebagai berikut:

- a) Koreksi Aset tetap sebesar Rp41.964.989,92 merupakan transaksi penyesuaian aset tetap yang disebabkan oleh adanya koreksi penambahan dan pengurangan aset, adanya kurang catat maupun lebih catat nilai aset tetap tahun 2021.
- b) Koreksi Aset Rusak Berat sebesar (Rp5.432.032.233,66) merupakan transaksi penyesuaian aset lainnya yang disebabkan karena adanya aset rusak berat yang dihapuskan dan dikenakan extracomptabel.
- c) Koreksi kurang catat atas mutasi antar SKPD sebesar (Rp448.988.860,00)
- d) Mutasi Koreksi Lain-lain sebesar (Rp149.276.243.739,23) dengan perincian pada **tabel 5.147**
- 4) Saldo Akhir Ekuitas sebesar Rp2.617.470.445.872,42 merupakan Saldo Ekuitas Tahun 2021.



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Profil Pemerintah Kabupaten Luwu

1. Sejarah Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu merupakan pemekaran dari Kabupaten Luwu yang terpisah dari Kota Palopo. Pusat Pemerintahan dipindahkan dari Kota Palopo ke Kota Belopa sejak Tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi Ibukota sejak 13 Februari 2006. Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan dan 207 Desa/Kelurahan.

2. Keadaan Geografis Pemerintah Kabupaten Luwu

Secara geografis, Kabupaten Luwu terletak pada koordinat antara 2°3'45" sampai 3°37'30" LS dan 119°15" sampai 121°43'11" BB. Secara administratif, Kabupaten Luwu berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Tana Toraja di sebelah Utara, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Luwu disebelah Selatan, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah Barat, serta Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di sebelah Timur. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo. Adapun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau dikenal dengan sebutan WALMAS.

3. Pejabat Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Luwu dipimpin oleh :

- a) Bupati Luwu : DR. Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd
- b) Wakil Bupati : Syukur Bijak
- c) Ketua DPRD Kab. Luwu : Rusli Sunali
- d) Pj. Sekretaris Daerah Kab. Luwu : Drs. H. Sulaiman, MM



BAB VII
PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021.


BUPATI LUWU

Dr. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd